



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch. Hoesin Palembang 30126

Telp : (0711) 354915 Fax : (0711) 321707

Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselfprov.go.id

Website : dinkes.provsumsel.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 004 /SK/ DINKES/ 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026
17. Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 005/SK/DINKES/2024 tentang Penetpan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026
18. Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 006/KEP/KES/II/2024 tentang Penetpan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- c. Melakukan evaluasi internal penerapan LKjIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Melaksanakan Pelaporan LKjIP SKPD melalui Aplikasi E-Performance

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2026



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 004 /SK/DINKES/2026
TANGGAL : 28 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Syifa Amandasari, S.AB	Anggota
5.	Deasi Yuliani, SE	Anggota
6.	Sari Apriany, S.ST	Anggota
7.	Musafaq Harisusilo, SH	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. H. Trisnawarman, M.Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan merupakan laporan tahunan yang ketiga dari implementasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

LKjIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029. Metode dan Teknik penyusunan LKjIP ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya dan hendaknya dapat menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan instropeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu media untuk membangun kebersamaan dan sinergisitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandaskan semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dan Sumatera Selatan pada khususnya.

Demikian LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, semoga digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 28 Februari 2026



**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan**

dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Peran Strategis Dinas Kesehatan	3
1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov. Sumsel.....	6
1.4 Landasan Hukum.....	8
1.5 Maksud & Tujuan Penyusunan LKjIP	10
1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	13
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025-2029	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	44
3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	51
3.3 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	154
3.4 Akuntabilitas Keuangan	172
3.5 Penghargaan di Bidang Kesehatan	185
BAB IV PENUTUP	197

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029.....	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	31
Tabel 2.3	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	34
Tabel 2.4	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	35
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Sumatera Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025	44
Tabel 3.2	Persentase Stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	53
Tabel 3.3	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025	57
Tabel 3.4	Target Sesuai IKU dan IKK beserta Capaian 5 Tahun Sebelumnya .	61
Tabel 3.5	Capaian Prevalensi Obesitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 .	62
Tabel 3.6	Data Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs) Dan Kabupaten Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Tahun 2025	65
Tabel 3.7	Penyebab Kematian Balita Tahun 2025	67
Tabel 3.8	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024	71
Tabel 3.9	Target sesuai IKU dan IKK beserta Capaian 5 Tahun Sebelumnya	77
Tabel 3.10	Jumlah Penderita dan Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue Per Kab/Kota Tahun 2025	77
Tabel 3.11	Capaian prevalensi depresi > 15 tahun prov. Sumsel tahun 2025	80
Tabel 3.12	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	88
Tabel 3.13	Data Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs) Dan Kabupaten Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Tahun 2025	91
Tabel 3.14	Jumlah Klinik Pratama dan PMD Berjejaring yang Melaksanakan dan Melaporkan Program Prioritas yang Terdata dalam Dashboard Kemkes	93
Tabel 3.15	Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	95
Tabel 3.16	Capaian Unit Transfusi Darah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	96
Tabel 3.17	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemberian Suplementasi Vitamin A pada usia 6-59 bulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	101
Tabel 3.18	Cakupan Anak Usia 6-23 Bulan Mendapat Mpasi Prov Sumsel Tahun 2025	104
Tabel 3.19	Persentase Kab/Kota yang melakukan pemantauan praktik MPASI pada anak usia 6-23 bulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	104
Tabel 3.20	Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	105
Tabel 3.21	Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	107
Tabel 3.22	Persentase Kab./Kota Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Pkg) Pada Kelompok Usia Dewasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	109
Tabel 3.23	Persentase Kab./Kota yang Melakukan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	112
Tabel 3.24	Data Kabupaten/Kota Dengan Tpp Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan E-Monev Hsp Tahun 2025	113
Tabel 3.25	Persentase Capaian Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat	

kesehatan sesuai Standar Tahun 2025	118
Tabel 3.26 Capaian Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat Kesehatan yang sesuai dengan standar Tahun 2025	118
Tabel 3.27 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	119
Tabel 3.28 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi	120
Tabel 3.29 Laporan tingkat kepuasan pasien pada pelayanan di fasyankes	121
Tabel 3.30 Rumah Sakit Umum Daerah Lengkap 7 Spesialis	123
Tabel 3.31 Data PBF Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	125
Tabel 3.32 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Kefarmasian di Faskes DasarTingkat Provinsi Sumsel Tahun 2025	127
Tabel 3.33 Ketersediaan Rerata Prov Sumsel	128
Tabel 3.34 Persentase ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2025	129
Tabel 3.35 Persentase Fasyankes Terdaftar Ke Siskn Prov Sumsel Tahun 2025	131
Tabel 3.36 Capaian pelaporan INM dan IKP Laboratorium Kesehatan tahun 2025	134
Tabel 3.37 Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Daerah dengan ketersediaan SPA sesuai standar	136
Tabel 3.38 Perubahan IKS Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024	141
Tabel 3.39 Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	142
Tabel 3.40 Distribusi Capaian Posyandu Siklus Hidup	144
Tabel 3.41 Distribusi Capaian Kampanye Germas	146
Tabel 3.42 Distribusi Capaian Kader Posynadu yang mengikuti 25 Keterampilan Dasar Kecakapan Kader	148
Tabel 3.43 Distribusi Capaian Kader Posyandu yang memiliki tingkatan strata Madya	150
Tabel 3.3.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	151
Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sampai Desember 2025	169
Tabel 3.4.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Desember 2025	179

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Persentase Stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	52
Grafik 3.2	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025	56
Grafik 3.3	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025	57
Grafik 3.4	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Triwulan IV (empat) Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan....	58
Grafik 3.5	Kepesertaan BPJS Kesehatan Per Kab/Kota di Sumatera Selatan s.d Desember 2025	59
Grafik 3.6	Capaian TSR TBC SO Kohort 2024 Prov Sumsel	60
Grafik 3.7	Prevalensi Obesitas >18 Tahun	63
Grafik 3.8	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Sumsel Tahun 2023 – 2025	64
Grafik 3.9	Jumlah Kematian Balita Tahun 2025	66
Grafik 3.10	Jumlah Kematian Balita Tahun 2025	68
Grafik 3.11	Jumlah Kematian Bayi Tahun 2025	70
Grafik 3.12	Jumlah Kematian Bayi Tahun 2025 Gangguan pernafasan dan kardiovaskular	72
Grafik 3.13	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan ANC 6 Kali Ibu Hamil Antenatal Care (K6) Tahun 2025	74
Grafik 3.14	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita Tahun 2025	75
Grafik 3.15	Persentase ibu hamil KEK Tahun 2025	76
Grafik 3.16	Capaian TC Prov Sumsel Tahun 2025	76
Grafik 3.17	Distribusi Angka Kesakitan DBD	78
Grafik 3.18	Prevalensi Rate Kusta Prov Sumsel 2025	79
Grafik 3.19	Persentase ODHIV baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV..	79
Grafik 3.20	Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian	80
Grafik 3.21	Capaian Prevalensi Depresi	81
Grafik 3.22	Persentase Merokok pada Penduduk Prov Sumsel Tahun 2025	82
Grafik 3.23	Grafik capaian skrining diabetes melitus	83
Grafik 3.24	Grafik Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining DM >60%	84
Grafik 3.25	Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2025	84
Grafik 3.26	Pencapaian Indikator Bukan Campak-Bukan Rubella (<i>Discarded Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	85
Grafik 3.27	Jumlah Penderita Pada KLB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025	86
Grafik 3.28	Jumlah Penderita KLB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025	87
Grafik 3.29	Distribusi Populasi Rentan Yang Berisiko Terdampak KLB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025	89
Grafik 3.30	Distribusi Populasi Rentan Yang Berisiko Terdampak KLB Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025	89
Grafik 3.31	Distribusi Frekuensi KLB PD3I Kab/Kota di Prov Sumsel Tahun 2021 - 2025	90
Grafik 3.32	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas air minumnya sesuai standar	92
Grafik 3.33	Persentase Lanjut Usia Mandiri Tahun 2025	97
Grafik 3.34	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan KB Pasca Persalinan	

Tahun 2025	98
Grafik 3.35 Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Pemantauan Konsumsi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Tahun 2025.....	99
Grafik 3.36 Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	100
Grafik 3.37 Pemberian Suplementasi Vitamin A pada usia 6-59 bulan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	102
Grafik 3.38 Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar Tahun 2025	103
Grafik 3.39 Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	106
Grafik 3.40 Persentase Kab./Kota Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Pkg) >80% Pada Kelompok Usia Dewasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	109
Grafik 3.41 Persentase Kab./Kota Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Pkg) Gratis >80% Pada Kelompok Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	110
Grafik 3.42 Persentase Kab./Kota Yang Melakukan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	113
Grafik 3.43 Kabupaten Kota Jumlah Tfu Terdaftar Dengan Jumlah Tfu Memenuhi Syarat	115
Grafik 3.44 Capaian status akreditasi Puskesmas Kab/Kota Tahun 2025	116
Grafik 3.45 Capaian Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	117
Grafik 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi Pengendalian & Pengawasan Cabang PAK TW IV 2025	124
Grafik 3.47 Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL	128
Grafik 3.48 Persentase Ketersediaan Vaksin IRL di Puskesmas se Prov. Sumatera Selatan Tahun 2025	129
Grafik 3.49 Persentase Fasyankes Terdaftar Ke SIKN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	132
Grafik 3.50 Kepatuhan Puskesmas Melaporkan INM di Prov Sumsel 2025.....	133
Grafik 3.51 Capaian Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	142
Grafik 3.52 Capaian Posyandu yang memberikan Layanan Siklus hidup	143
Grafik 3.53 Capaian Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat)	145
Grafik 3.54 Capaian Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	147
Grafik 3.55 Capaian Kabupaten / Kota yang memiliki Strata Madya	149

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu LKjIP Dinas Kesehatan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah “**Sumsel Maju Terus Untuk Semua**”. Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang tercantum dalam misi pertama yang berbunyi “***Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing***”.

Dalam mencapai visi dan misi, Dinas Kesehatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan);
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat.

Prioritas pembangunan kesehatan dengan fokus pada program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Salah satu fokus utama adalah program Bebas Iuran BPJS Kesehatan Kelas III melalui skema Berkat Plus, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, dapat memperoleh jaminan kesehatan tanpa beban iuran. Program ini diharapkan mampu

meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional serta memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2025 penduduk Sumatera Selatan yang telah memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat JKN KIS sebesar 100,38% atau sebanyak 9.169.710 jiwa, dari total 9.135.317 jiwa penduduk Sumatera Selatan yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat JKN KIS berarti pencapaiannya melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 98,3%. Menjamin setiap penduduk Sumatera Selatan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan disetiap jenjang pelayanan kesehatan melalui pencapaian persentase kepesertaan penduduk terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Keselamatan ibu melahirkan dan anak dalam rangka untuk menurunkan jumlah kematian ibu maternal & jumlah kematian bayi. Sepanjang Tahun 2025 kematian ibu sudah mampu diturunkan secara signifikan yaitu dari 110 kasus diTahun 2024 menjadi 95 kasus kematian ibu diTahun 2025, yang artinya untuk kasus kematian ibu ini sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 122 Kasus kematian ibu. Tinginya kasus kematian ibu ini secara tidak langsung dikarenakan kurangnya kesadaran ibu untuk ANC rutin di karenakan kesibukan ibu serta keterlambatan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan. Sebagian sarana dan prasarana di PKM tidak sesuai standar Permenkes No. 43 tahun 2019, kompetensi dan kepatuhan petugas (bidan) dalam memberikan asuhan kesehatan terutama pada masa hamil (ANC) yang belum sesuai standar, cakupan ANC sampai 6 Kali masih belum dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan, dan keterbatasan jumlah USG di FKTP sehingga skrining masalah pada kehamilan masih belum optimal serta hasil rekomendasi AMP masih belum dilaksanakan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Audit Maternal Perinatal, pemantapan pelaksanaan ANC terpadu, koordinasi *District Team Problem Solving* (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak, pembinaan kepada tenaga kesehatan yang masih melakukan pertolongan persalinan di non fasilitas kesehatan. Walaupun pencapaiannya fluaktif namun secara umum kualitas hidup sudah membaik, derajat kesehatan masyarakat yang membaik dilihat dari berbagai indikator kesehatan ibu dan anak dan perbaikan gizi keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mencapai hal tersebut telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, penetapan kinerja, dan tata cara evaluasi lampiran kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong akuntabilitas kinerja sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri merupakan syarat utama bagi pemerintahan dalam memenuhi aspirasi Masyarakat guna mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan sah agar penyelenggaraan pemerintah serta Pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SAKIP pada hakikatnya adalah sistem manajemen berbasis hasil yang berfungsi sebagai alat untuk membangun instansi pemerintah yang lebih akuntabel sehingga mampu bekerja dengan efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam penerapannya, setiap instansi pemerintah diwajibkan Menyusun dokumen perencanaan strategis (*Strategic Plan*), rencana kerja (*Performance Plan*), perjanjian kinerja (*Performance Agreement*), serta laporan pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability Report*).

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan

bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut mencakup kinerja instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan capaian serta tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga memberikan Gambaran atas keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan posisi tanggung jawab Gubernur dibantu oleh SKPD Dinas Kesehatan dengan amanah dari rakyat/masyarakat.



1.2 Peran Strategis Dinas Kesehatan

Kedudukan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur menjalankan tugasnya diwilayahnya dibidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Kedudukan Dinas Kesehatan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terakhir Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan.

Dalam mewujudkan Visi Daerah “*Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua*”. Sedangkan misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi pertama “*Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing*”.

Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan :



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Upaya kesehatan dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan kewilayahan keterpaduan ketiga jenis pelayanan kesehatan ini dengan didukung oleh pengelolaan adminstrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta pengaturan hukum kesehatan keterpaduan unsur-unsur tersebut diharapkan dapat menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut selaras dengan kriteria sistem kesehatan yang baik menurut WHO-SEARO yang berbunyi sebagai berikut : *“A good health system delivers **QUALITY SERVICES** to all people, when and where they need them. The exact configuration of services varies from country to country but in all case requires **a robust financing***

mechanism, a well-trained and adequately paid workforce, reliable information on which to base decisions and policies, well maintained facilities and logistics to deliver quality medicines and technologies”.

Tema prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 difokuskan pada upaya untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Program Prioritas Pembangunan Daerah mencakup 12 Program Strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
4. Pendidikan yang berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderfull 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

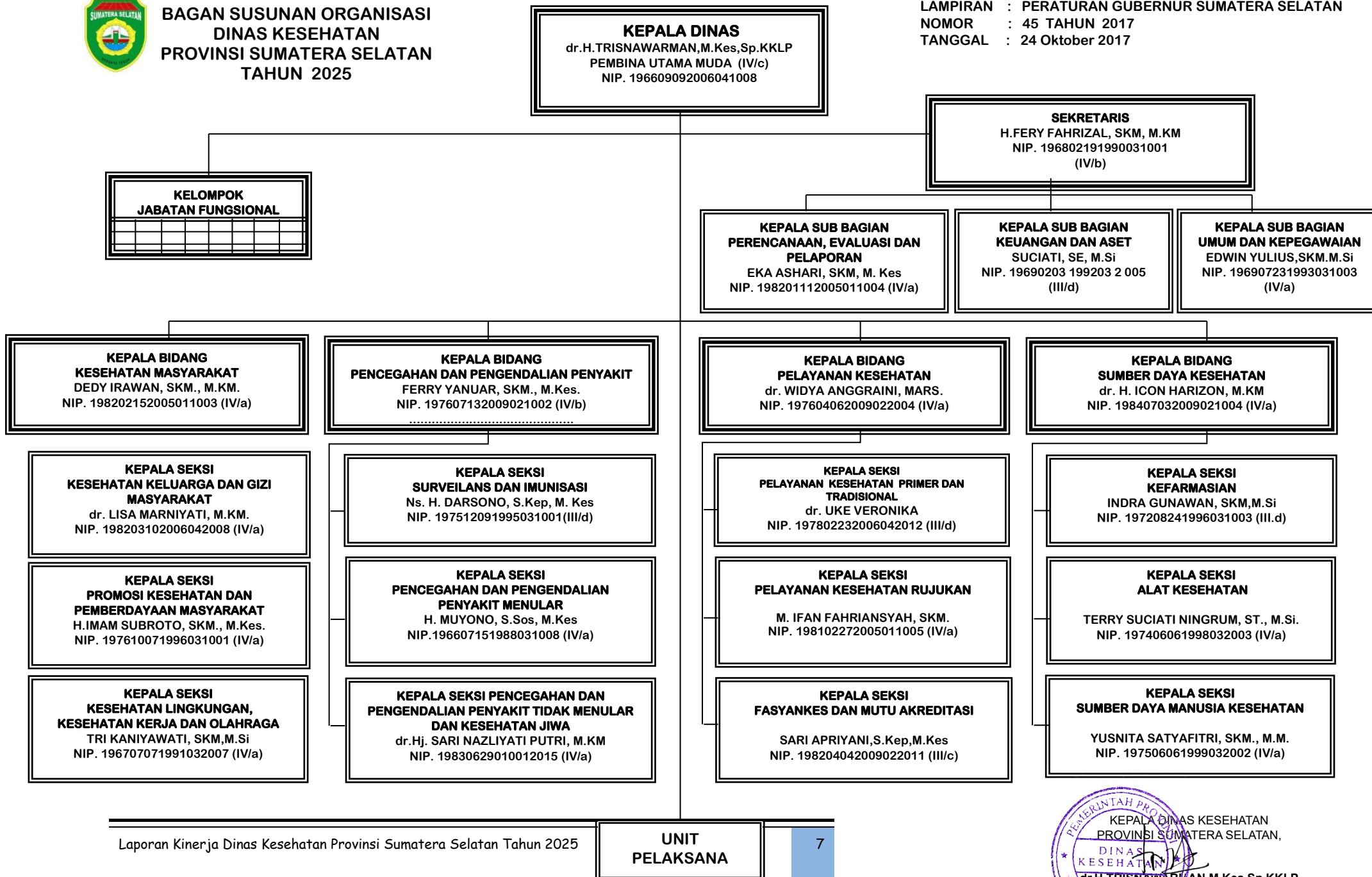
1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017



1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 5 dan 6), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
- 6) Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD; kemudian Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda;

- 8) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Instruksi Presiden Nomor. 29 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Nomor. 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 ;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 No. 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

- 16) Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- 17) Peraturan Gubernur Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Prov. Sumsel;
- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023 yang memuat Tiga Prasyarat Pelembagaan PUG (Regulasi, SDM dan Data Terpilah) dan Tujuh Proses Pelaksanaan PUG;
- 19) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 ;
- 20) Keputusan Gubernur Nomor. 614/KPTS/BPP – PA/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi. Sumatera Selatan.

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Evaluasi LkjIP

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk memastikan penerapan prinsip **akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja berkelanjutan** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Sedangkan tujuan penyusunan Evaluasi LKjIP adalah sebagai berikut:

1. **Menilai capaian kinerja** instansi pemerintah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.
2. **Mengukur efektivitas dan efisiensi** pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. **Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja selama periode evaluasi.
4. **Memberikan umpan balik (feedback)** bagi pimpinan dan unit kerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
5. **Mendorong peningkatan kualitas penerapan SAKIP** secara berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah.
6. **Menjadi bahan pengambilan keputusan** bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja.
7. **Meningkatkan akuntabilitas publik** melalui penyampaian informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

1.6 Sistematika Penyusunan LkjIP

Berdasarkan pada PermenPAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Evaluasi LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I (*Pendahuluan*) menjelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, landasan hukum, aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang saat ini.

Bab II (*Perencanaan Kinerja*) menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*) menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan pengungkapan dan penyajian hasil dari pengukuran kinerja.

Bab IV (*Penutup*) berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran berisi dokumen Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. SAKIP diselenggarakan sebagai instrumen pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

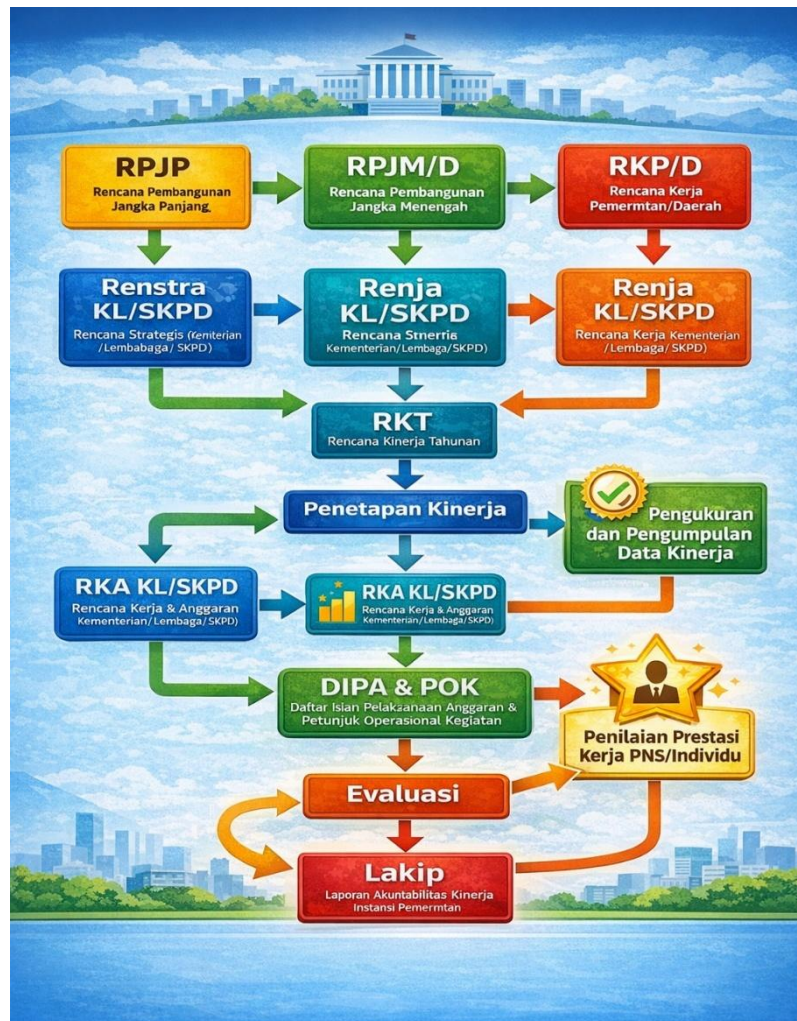
Penerapan SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Implementasi SAKIP diarahkan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Komponen utama penyelenggaraan SAKIP di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. **Perencanaan Kinerja**, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.
2. **Pengukuran Kinerja**, yaitu proses penilaian capaian kinerja melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. **Pelaporan Kinerja**, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

4. **Evaluasi Kinerja**, yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Berikut gambaran diagram alur perencanaan pemerintahan.



Perencanaan merupakan salah satu komponen yang menjadi langkah awal dalam sistem akuntabilitas kinerja. Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang salah satu misinya berbunyi *“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”* yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

Melalui penerapan SAKIP yang konsisten dan berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kesehatan serta mendorong tercapainya sasaran pembangunan kesehatan daerah.

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun rencana strategi (renstra) yang berisi visi, misi serta tahapan - tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) kinerja yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembangunan kesehatan

tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Visi dan Misi

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Pejabat Gubernur dalam Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 2025 -2029, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah: ***“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”*** dan utamanya pada Misi pertama : ***“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”***.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan strategi, sasaran, program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan nomor : 016/SK/DINKES/2025.

Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur

Visi: <i>“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”</i>				
Misi : <i>“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”</i>				
No	Misi Dan Program Gubernur Sumsel	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fokus Program : 1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Masih lambatnya penurunan AKI 2. Sistem pencatatan kematian ibu belum akurat dan lengkap (OVM dan OVP untuk dilakukan pengkajian dalam MPDN) 3. Akses pelayanan kesehatan ibu belum merata, khususnya di daerah terpencil (kesulitan capai mencapai K1 dan K5 USG oleh dokter umum) 4. Penanganan kasus komplikasi kehamilan belum optimal dikarenakan tenaga kesehatan terlatih gadar matneo belum	INTERNAL : 1. Kurangnya SDM kesehatan (kompetensi & jumlah) 2. Sarana & prasarana belum memadai 3. Pembiayaan & anggaran terbatas 4. Sistem informasi kematian ibu belum optimal 5. Mobilitas Petugas kesehatan di lapangan cukup tinggi khususnya yang telah terlatih 6. Mobilitas pengelola program di Dinkes Kab/Kota cukup tinggi Eksternal:	INTERNAL : - Jumlah SDM bidan dan perawat sudah cukup - Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok - Perda tentang Jamsoskes Sumsel Semesta - Pera tentang Sistem Kesehatan Daerah - Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Tugas Belajar SDM Kesehatan - Pergub tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - EKSTERNAL:

		sesuai standar FKTP, PONED belum maksimal	7. Koordinasi lintas sektor belum optimal	
--	--	---	---	--

Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah ***“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”*** yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029, dengan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan) Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 48 (empat puluh delapan) indikator yaitu :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
3. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)
4. Prevalensi Obesitas > 18 tahun

5. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%
6. Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis Masyarakat
7. Angka Kematian Balita
8. Angka Kematian Bayi
9. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)
10. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita
11. Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK
12. Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)
13. Angka Kematian (CFR) Dengue
14. Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%
15. Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta
16. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV
17. Persentase Hipertensi dalam pengendalian
18. Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun
19. Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun
20. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protocol
21. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%
22. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%
23. Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk
24. Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah
25. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi
26. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi
27. Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I

28. Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan
29. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat
30. Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas
31. Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN
32. Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik
33. Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar
34. Persentase Lanjut Usia Mandiri
35. Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan
36. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri
37. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin
38. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan
39. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar
40. Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan
41. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil
42. Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat
43. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%
44. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa

45. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia
46. Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional
47. Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat
48. Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 22 (dua puluh dua) indikator yaitu:

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna
2. Persentase Kab/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
3. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
5. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
6. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan
7. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
8. Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar
9. Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan
10. Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan
11. Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan
12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah

13. Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar
 14. Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)
 15. Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN
 16. Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar
 17. Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas
 18. Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 19. Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000
 20. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
 21. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar
 22. Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar
3. Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
- Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 6 (enam) indikator yaitu:
1. Indeks Keluarga Sehat
 2. Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif
 3. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.
 4. Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)
 5. Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader
 6. Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.48	74.71	74.94	75.17	75.4	75.63
2		Prevelensi Stunting	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6
3	Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	Angka Kematian Ibu (AKI)	122	109	97	86	77	76
4		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	98,3	98,5	98,7	98,8	98,9	99
5		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	90	90	90	90	90	90
6		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
7		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	95	95	95	95	95	100
8		Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	5,8	11,7	17,6	23,5	35,3	41,2
9		Angka Kematian Balita	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,3
10		Angka Kematian Bayi	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,5
11		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	80	82	85	88	90	85
12		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	50	55	60	65	70	75
13		Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	40	50	60	70	80	90
14		Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	90	90	90	90	90	90
15		Angka Kematian (CFR) Dengue	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
16		Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	17	17	17	17	17	17
17		Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta	1	2	3	4	5	6
18		ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	90	90	90	90	90	90
19		Persentase Hipertensi dalam pengendalian	20	25	30	35	40	45
20		Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21		Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
22		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protokol	30	50	65	80	90	100
23		Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	2	4	6	8	10	12
24		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	95	95	95	95	95	100
25		Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	86	87	88	89	90	90
26		Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	100	100	100	100	100	100
27		Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	100	100	100	100	100	100
28		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100
29		Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I	86	87	88	89	90	91
30		Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	90	93	95	97	100	100
31		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	80	84	88	92	96	100
32		Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	20	30	40	50	60	70
33		Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	94	94	94	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
34		Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	50	60	60	75	85	90
35		Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	42	44	48	50	52	52
36		Persentase Lanjut Usia Mandiri	75	77	79	81	83	86
37		Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59	76,47
38		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	45	52	60	70	75	80
39		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59	76,47
40		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	75	80	85	90	90	90
41		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	91	92	93	94	95	96
42		Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	10	15	20	25	30	35
43		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	60	65	70	75	80	85
44		Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	10	12	13	14	16	17
45		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	30	60	70	80	85	90
46		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	30	60	70	80	85	90
47		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	30	35	40	45	50	55

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
48		Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	60	65	70	80	90	100
49		Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	68	74	78	84	88	94
50		Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	80	85	90	95	100	100
51	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	30	50	51	75	77,5	80
52		Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	83	86	89	92	95	100
53		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,9	5	5,3	5,5	5,8	6,1
54		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	83	86	89	92	95	100
55		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	25	30	35	40	45	50
56		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	77	78	79	79.5	80	81
57		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	70	80	100	100	100	100
58		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	67	71	76	81	86	90
59		Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	27	27	27	27	27	27
60		Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	14	18	22	26	30	35
61		Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	75	80	85	90	95	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
62		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	70	75	80	85	90	95
63		Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	91	92	93	94	95	96
64		Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	65	70	76	83	90	95
65		Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	50	55	60	65	70	75
66		Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	45	50	55	60	65	70
67		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	75	80	85	90	95	100
68		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	75	80	85	90	95	100
69		Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	3	4	5	6	6	6
70		Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	70	75	80	85	90	95
71		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	17	22	30	40	50	60
72		Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	29	47	58	70	82	100
73	Sasaran 3 :Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0.342	0.345	0.347	0.350	0.352	0.355
74		Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	30	50	60	70	80	90
75		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	20	30	40	50	60	70
76		Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	30	40	50	60	70	80
77		Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah	10	20	30	40	50	60

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Target dan Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader						
78		Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	10	20	30	40	50	50

Strategi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2025 – 2029 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Meningkatkan Kemitraan di Bidang Kesehatan
3. Meningkatkan kebutuhan SDM pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
4. Meningkatkan kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
5. Menjamin terpenuhinya Kebutuhan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan Obat Program
6. Melanjutkan Program Berkas Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)
7. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
8. Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat
9. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan
10. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
11. Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah :

1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

2. Sosialisasi, Informasi dan Evaluasi Hidup Sehat
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
4. Kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk mendukung Kesehatan
5. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Kabupaten/ Kota
6. Pendistribusian Tenaga Kesehatan secara merata di setiap Fasyankes
7. Inventarisasi dan Pemetaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap Jenjang Fasilitas Kesehatan
8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap Jenjang Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Kewenangan
9. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
10. Penyediaan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan Obat Program setiap tahunnya sesuai dengan Kebutuhan Program Pelayanan Kesehatan
11. Penyusunan Perda Integrasi Program JKN-KIS
Penyediaan Sharing Anggaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Masyarakat tidak mampu yang belum memiliki Kartu JKN- KIS melalui PBI- APBD
13. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
14. Menjamin Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan AKI dan AKB
15. Semua Ibu Hamil harus mendapatkan Pelayanan ANC Terpadu
16. Semua Ibu harus melakukan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan di dan Fasilitas Kesehatan
17. Semua Neonatus, Bayi dan Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
18. Peningkatan Pelayanan KB sesuai Standar
19. Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Stunting
20. Konvergensi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Lokus Stunting (17 Kab/Kota)
21. Intervensi Pelayanan Gizi Fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan
22. Seluruh Bayi dan Balita harus ditimbang setiap bulan

23. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan
24. Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
25. Dukungan Anggaran untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
26. Penguatan Kapasitas Petugas Imunisasi
27. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Daerah melalui Seleksi sesuai dengan Kompetensi dan Standar Mutu.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan ukuran kinerja yang akan dicapai dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 dan sesuai atau mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
			Satuan	Target
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,48
2		Prevelensi Stunting	%	14,8
3	Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 kelahiran hidup	122
4		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,3
5		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	%	90
6		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	23,4
7		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	%	95
8		Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	%	5,8
9		Angka Kematian Balita	/ 1000 Kelahiran hidup	15
10		Angka Kematian Bayi	/ 1000 Kelahiran hidup	12,62
11		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	%	80
12		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	%	50
13		Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	%	40
14		Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	90
15		Angka Kematian (CFR) Dengue	%	0,5
16		Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	Kab / Kota	17
17		Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta	Kab / Kota	1
18		ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	%	90
19		Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	20
20		Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	1,4
21		Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	%	12,4
22		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protokol	%	30

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
			Satuan	Target
23		Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	Kab / Kota	2
24		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	%	95
25		Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	%	86
26		Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	%	100
27		Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100
28		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100
29		Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I	%	86
30		Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	%	90
31		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	%	80
32		Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	%	20
33		Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	%	94
34		Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	Kab / Kota	50
35		Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	%	42
36		Persentase Lanjut Usia Mandiri	%	75
37		Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	%	47.06
38		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	%	45
39		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	%	47.06
40		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	%	75
41		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	%	91
42		Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	%	10
43		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	%	60
44		Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	Kab / Kota	10
45		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	%	30

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
			Satuan	Target
46		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	%	30
47		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	%	30
48		Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	%	60
49		Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	%	68
50		Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	%	80
51	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	%	30
52		Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	83
53		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	4,9
54		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83
55		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	25
56		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	77
57		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70
58		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	67
59		Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	27
60		Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	%	14
61		Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	75
62		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	70
63		Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	%	91
64		Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	%	65
65		Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	unit	50
66		Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	%	45
67		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	%	75

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
			Satuan	Target
68		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	%	75
69		Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	%	3
70		Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	70
71		Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai Standar	%	17
72		Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	%	29
73	Sasaran 3 :Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.342
74		Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	30
75		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	%	20
76		Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	%	30
77		Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	%	10
78		Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	%	10

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp 493.358.555.875 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Tabel 2.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian	
				Satuan	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.48
		2	Prevelensi Stunting	%	14,8
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 kelahiran hidup	122

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian	
				Satuan	Target
	pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	2	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,3
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	%	30
		2	Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	83
		3	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	4,9
		4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83
	Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	1	Indeks Keluarga Sehat	%	0.342

Tabel 2.4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana	100%	242.903.488.277
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	764.300.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 laporan	764.300.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	100%	202.662.721.200
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	758 orang	201.851.886.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	722.040.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	88.795.200
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	100%	180.000.000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	180.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	100%	1.130.525.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	325 orang	1.026.525.000
7	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan	50 Orang	104.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Umum	100%	3.250.458.500
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	250.000.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	250.000.000
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	520.458.500
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	450.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.400.000.000
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	380.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.665.900.000
14	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang Disediakan	2 paket	519.000.000
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2.146.900.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	11.731.435.957
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	3.435.000.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	8.276.435.957
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah	100%	17.018.147.620

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.900.000.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	14.568.147.620
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	550.000.000
IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	100%	3.500.000.000
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3.500.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Kematian Ibu	130 kasus	247.565.948.598
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai kebutuhan	100%	15.956.818.200
23	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 paket	200.000.000
24	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen	900.000.000
25	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	100 paket	14.856.818.200

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi Stunting pada Balita	14	230.105.458.398
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100%	761.718.000
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	906.706.000
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10 dokumen	1.225.462.000
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	6 dokumen	194.334.000
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4 dokumen	101.830.000
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 dokumen	555.206.000
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 dokumen	1.238.425.000
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 dokumen	512.647.500
34	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	176.520.000
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	75.345.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 dokumen	1.329.388.800
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100%	100.000.000
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	177.950.000
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.730.206 Jiwa	217.537.817.598
40	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 dokumen	835.140.000
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 paket	415.000.000
42	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas	1 dokumen	125.765.000
43	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	100%	289.962.500
44	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	20 unit	360.255.000
45	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	20 dokumen	2.665.876.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
46	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Jumlah paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional yang didistribusikan	1 paket	70.110.000
47	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 dokumen	450.000.000
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terlaksananya kegiatan sistem informasi Kesehatan	100%	447.194.000
48	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	447.194.000
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100%	1.056.478.000
49	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	65 RS	22.230.000
50	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan Peningkatan Tata Kelola sesuai Standar	65 RS	525.280.000
51	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	90 Unit	508.968.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standard (9) jenis tenaga Kesehatan	83	772.885.000
I	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100%	88.100.000
52	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 paket	53.906.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
53	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	1 paket	34.194.000
II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	684.785.000
54	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	209.257.000
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	475.528.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai Kebutuhan	100%	141.246.000
I	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	40%	141.246.000
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	35 Unit	141.246.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	68	1.974.988.000
I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	92%	477.988.000
57	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta	8 dokumen	477.988.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
II	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	92%	1.497.000.000
58	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1.497.000.000
	JUMLAH (58 Kegiatan)			493.358.555.875

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan periode 2025 – 2029. Perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan ke IV Tahun 2025 periode Renstra 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Sumatera Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.48	74,76	100	Sangat Baik	Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat
2		Prevelensi Stunting	14.8	5251	1,04	Sangat Baik	Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat
3	Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	Angka Kematian Ibu (AKI)	122	95	65,07	Sangat Baik	Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat
4		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	98.3	100,38	102	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Rujukan
5		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	90	19,776	88.49	Tinggi	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
6		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,4		2,32	Sangat Baik	PTM dan Kesehatan Jiwa
7		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	95		94,43%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
8		Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	5,8	26,4	52,94	Rendah	Kesling dan Kesjaor
9		Angka Kematian Balita	15	29	0,19	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
10		Angka Kematian Bayi	12,62	801	5,48	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
11		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	60	14	82,35	Tinggi	Kesga dan Gizi Masyarakat
12		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	50	17	93,71%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
13		Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	40	17	100	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
14		Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	90	24.641	65.06	Rendah	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
15		Angka Kematian (CFR) Dengue	0,50%	0,47%	94%	Sangat Baik	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
16		Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	17	17	100%	Sangat Baik	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
17		Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta	1	0	0	Sangat Rendah	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
18		ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	90		85%	Tinggi	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
19		Persentase Hipertensi dalam pengendalian	20		2,35	Sangat Rendah	PTM dan Kesehatan Jiwa
20		Prevalensi depresi pada usia $\geq$ 15 tahun	<0,50	7172	0,11	Sangat Baik	PTM dan Kesehatan Jiwa

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
21		Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	<12,4		3,32	Sangat Baik	PTM dan Kesehatan Jiwa
22		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protokol	30	0	0	Sangat Rendah	PTM dan Kesehatan Jiwa
23		Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	2		0	Sangat Rendah	PTM dan Kesehatan Jiwa
24		Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	95		97,05%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
25		Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	86%	94%	109%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
26		Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	100%		100%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
27		Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	100%		100%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
28		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100%		100%	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
29		Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I	86%	94%	109	Sangat Baik	Surveilans dan Imunisasi
30		Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	90	76,47	85	Tinggi	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
31		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	80	35,29	44,11	Sangat Rendah	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
32		Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	20	8	47	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
33		Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	94	94	100%	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Rujukan
34		Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	15	11.76%	23,52	Sangat Rendah	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
35		Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	42	37.5	89	Tinggi	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
36		Persentase Lanjut Usia Mandiri	75	791.557	94,61	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
37		Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	47,06	17	100%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
38		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	45	12	70,6	Tinggi	Kesga dan Gizi Masyarakat
39		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	47,06	17	100%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
40		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	75	16	94,12%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
41		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	75	8	47,06%	Sangat Rendah	Kesga dan Gizi Masyarakat
42		Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	10	3	51,82%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
43		Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	60	17	100%	Sangat Baik	Kesga dan Gizi Masyarakat
44		Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	10	10	100	Sangat Baik	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
45		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	30	0	0	Sangat Rendah	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
46		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	30	0	0	Sangat Rendah	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
47		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	30	0	0	Sangat Rendah	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
48		Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	60	10	58,8	Rendah	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
49		Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	68	17,64	25,94	Sangat Rendah	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
50		Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	80	52.94 % (9kab/kota dari 17 Kab/kota memenuhi target)	66	Sedang	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
51	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	30	68,97	230	Sangat Baik	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
52		Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	83	56,89	69	Sedang	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
53		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4.9	3,88	79,18	Tinggi	SDM Kesehatan
54		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	83	88,70	107%	Sangat Baik	Kefarmasian
55		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	25	69.8	279%	Sangat Baik	Kefarmasian
56		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	77		79,84	Tinggi	Fasyankes dan Mutu Akreditasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
57		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	70	17	100	Sangat Baik	Sumber Daya Manusia Kesehatan
58		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	67	18	55,15	Rendah	Sumber Daya Manusia Kesehatan
59		Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	27	27	100%	Sangat Baik	Alat Kesehatan
60		Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	14	14	100	Sangat Baik	Kefarmasian
61		Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	75	100	133%	Sangat Baik	Kefarmasian
62		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	70	100	142.9	Sangat Baik	Kefarmasian
63		Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	91	75.33	83%	Tinggi	Kefarmasian
64		Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	65	91.2	140%	Sangat Baik	Kefarmasian
65		Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	50	17	100	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
66		Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	45	53	117%	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Rujukan
67		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	75		95	Sangat Baik	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
68		Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	75		95	Sangat Baik	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
69		Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	3	3	100%	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Rujukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
70		Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	70	91,18	130	Sangat Baik	Fasyankes dan Mutu Akreditasi
71		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	17	185	52,26	Rendah	Sumber Daya Manusia Kesehatan
72		Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	29	23,5	81,03	Tinggi	Sumber Daya Manusia Kesehatan
73	Sasaran 3 :Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0.342		0.342	Sangat Baik	Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
74		Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	30	82,35	274,51	Sangat Baik	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
75		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	20	82,35	412	Sangat Baik	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
76		Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	30	41,18	137,25	Sangat Baik	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
77		Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	10	41,18	412	Sangat Baik	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
78		Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	10	5,88	59	Rendah	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama sesuai dengan kewenangan wajib yang telah dilimpahkan dalam bidang kesehatan. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan. Namun tingkat keberhasilan yang dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai faktor internal maupun eksternal memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan target indikator kerjanya.

Rincian analisis capaian kinerja utama dari masing-masing sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga sasaran strategis. Selama triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 2 (dua) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	%	74.48	74.76	100	Sangat Baik

[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Menurut Provinsi, 2025

Terakhir Diperbarui : 5 November 2025

← Kembali Unduh </> JSON Bagikan

2025 Cari data statistik

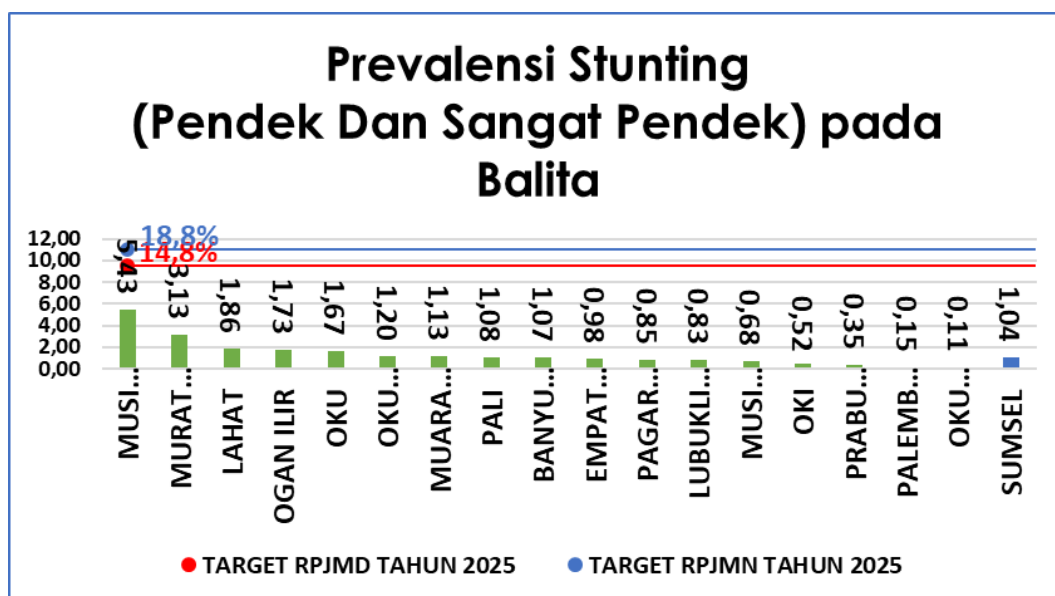
Freeze judul kolom

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Menurut Provinsi
2025	
Aceh	76,23
Sumatera Utara	76,47
Sumatera Barat	77,27
Riau	76,31
Jambi	75,13
Sumatera Selatan	74,76

Sumber Data : BPS Prov Sumsel

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2	Prevelensi Stunting	%	14,8	5251	1,04	Sangat Baik

Grafik 3.1
Persentase Stunting
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Persentase Prevelensi Stunting pada tahun 2025 ditargetkan maksimal 14,8% dan terealisasi 5251 atau sebesar 1,04%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian masih di bawah batas aman dari target yang ditetapkan.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa Persentase stunting pada anak balita Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah sesuai dengan Target Provinsi dan Target Nasional yang diharapkan dibawah 14% yaitu sebanyak 5251 balita dengan hasil pengukuran stunting 1,04%. Kabupaten Kota dengan data stunting tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas sebesar 5,43% atau sebanyak 1.324 balita dan Kabupaten Kota dengan data stunting terendah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 0,11% atau sebanyak 33 Balita. Upaya yang telah dilakukan yaitu memastikan data capaian persentase balita yang diukur pada SIGIZI KESGA di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan minimal sebesar 80%, melakukan feedback data capaian indikator gizi setiap bulannya, merekomendasikan setiap Puskesmas di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk melakukan intervensi kepada semua balita stunting, Kabupaten/Kota melakukan konfirmasi data pencatatan dan pelaporan yang dientry oleh Puskesmas dan memastikan data tersebut valid juga memastikan data dientry tepat waktu setiap bulannya.

Tabel. 3.2
Persentase Stunting
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Rerata jumlah balita diukur PB/TB	Rerata jumlah balita stunting	%
1	OKU	15968	266	1,67
2	OKI	39747	208	0,52
3	MUARA ENIM	44500	505	1,13
4	LAHAT	19700	367	1,86
5	MUSI RAWAS	24389	1324	5,43
6	MUSI BANYUASIN	49172	334	0,68
7	BANYU ASIN	38107	407	1,07
8	OKU SELATAN	14049	169	1,20
9	OKU TIMUR	30502	33	0,11
10	OGAN ILIR	28712	497	1,73
11	EMPAT LAWANG	11041	108	0,98

No	Kabupaten/Kota	Rerata jumlah balita diukur PB/TB	Rerata jumlah balita stunting	%
12	PALI	13747	149	1,08
13	MURATARA	14164	443	3,13
14	PALEMBANG	125839	193	0,15
15	PRABUMULIH	11813	41	0,35
16	PAGAR ALAM	8833	75	0,85
17	LUBUKLINGGAU	15929	132	0,83
	SUMSEL	506212	5251	1,04

Sumber: Sigizi Kesga, 02 Februari 2026

Berdasarkan Riskesdas 2018 angka stunting Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka Nasional yaitu sebesar 32%, sedangkan angka Nasional sebesar 30,8%. Demikian juga hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019 didapatkan hasil 24,8% dibanding angka nasional yang 24,4%. Namun SSGI 2022 memberikan hasil yang mengembirakan dimana angka stunting Provinsi Sumatera Selatan dapat ditekan menjadi 18,6% dibawah rata-rata nasional bahkan menjadi penurunan stunting tertinggi ketiga di Indonesia. Tetapi pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 20,3%.

Pencegahan *stunting* dilakukan melalui intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Melakukan feedback data capaian indikator gizi yang merupakan faktor pendukung percepatan penurunan stunting setiap bulan, merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk melakukan intervensi kepada semua

balita stunting dan berisiko stunting (wasting, underweight) diwilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan pengelola program Kabupaten/Kota untuk konfirmasi data pencatatan dan pelaporan yang dientry oleh Puskesmas dan memastikan data tersebut valid.

1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
----------	---

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.000 kelahiran hidup	122	95	65,07	Sangat Baik

Kematian ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera atau kejadian insidental.

Sepanjang Tahun 2025 kematian ibu sudah mampu diturunkan secara signifikan yaitu dari 110 kasus diTahun 2024 menjadi 95 kasus kematian ibu diTahun 2025, yang artinya untuk kasus kematian ibu ini sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 122 Kasus kematian ibu. Tinginya kasus kematian ibu ini secara tidak langsung dikarenakan kurangnya kesadaran ibu untuk ANC rutin di karenakan kesibukan ibu serta keterlambatan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan.

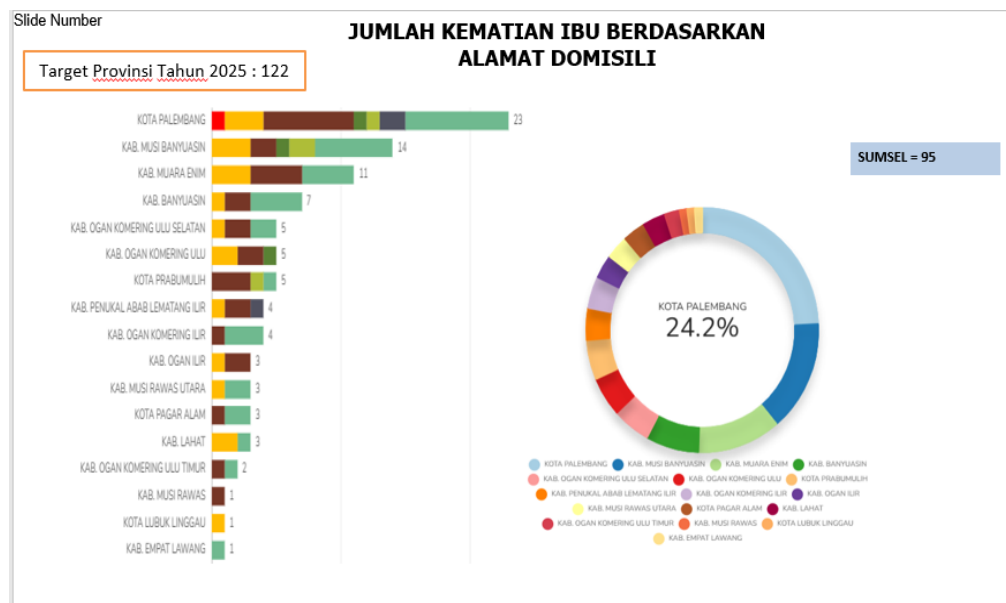
Sebagian sarana dan prasarana di PKM tidak sesuai standar Permenkes No. 43 tahun 2019, kompetensi dan kepatuhan petugas (bidan) dalam memberikan asuhan kesehaan terutama pada masa hamil (ANC) yang

belum sesuai standar, cakupan ANC sampai 6 Kali masih belum dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan, dan keterbatasan jumlah USG di

FKTP sehingga skrining masalah pada kehamilan masih belum optimal serta hasil rekomendasi AMP masih belum dilaksanakan secara optimal.

Berikut dapat kita lihat diagram distribusi kematian ibu di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik 3.2
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2026)

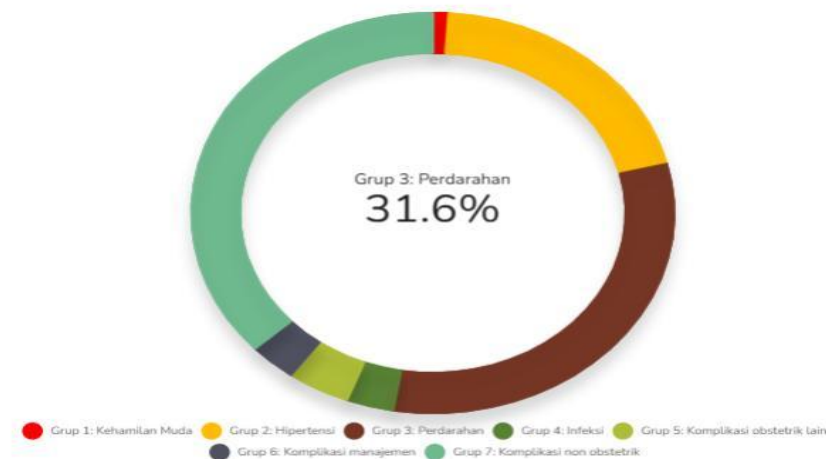
Kematian ibu di provinsi sumatera selatan masih cukup tinggi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 95 kasus kematian ibu. Perlu upaya besar lagi untuk terus menurunkan kematian ibu tersebut ditahun yang akan datang. Diagram diatas terlihat sebaran kasus kematian ibu di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi, namun 3 besar Kabupaten/Kota penyumbang kasus kematian ibu berdasarkan data MPDN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

Dari diagram tersebut disumbangkan oleh Kota Palembang sebanyak 23 kasus Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 14 kasus kematian dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 11 kasus kematian ibu. Dapat dilihat juga dari diagram dibawah ini macam-macam kasus yang menyebabkan kematian ibu itu terjadi.

Grafik 3.3
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025

KASUS DUGAAN	SEMUA
Group 1: Kehamilan dengan komplikasi abortus (O00-O08)	1
Group 2: Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas (O11-O16)	19
Group 3: Perdarahan obstetrik (O20, O43-O46, O67, O71, O72)	30
Group 4: Infeksi terkait kehamilan (O23, O41, O75, O85, O86, O91)	3
Group 5: Komplikasi obstetrik lain (O21, O22, O24, O26, O71, O73, O87, O88, O90)	4
Group 6: Komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi (O29, O74, O89)	3
Group 7: Komplikasi non obstetrik (O10, O24, O98, O99)	35
Group 8: Penyebab dasar tidak diketahui (O95)	0
Lainnya	0
Total	95
Tanpa NIK	1

Penyebab Kematian Ibu Tahun 2025



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2025)

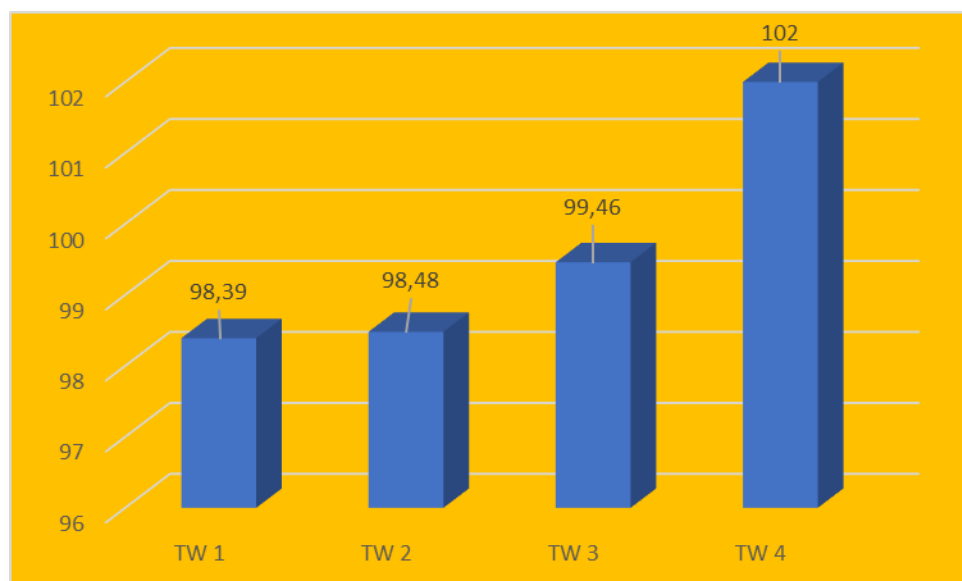
Penyebab kematian pada ibu terbesar dapat kita lihat bersama dari diagram diatas masih didominasi oleh komplikasi non obstetrik sebanyak 35 kasus, pendarahan obstetrik sebanyak 30 kasus, hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas sebanyak 19 kasus, komplikasi obstetrik lain sebanyak 4 kasus, disebabkan infeksi terkait kehamilan dan manajemen yang tidak terantisipasi

sebanyak 3 kasus serta penyebab kehamilan dengan komplikasi abortus sebanyak 1 kasus

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
4.	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,3	100,38	102	Sangat Baik

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai Desember 2025 sebesar 100,38%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 98,3% maka capaian triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 102%, dengan kata lain indikator kinerja ini sudah melebihi dari target renstra 2025 - 2029.

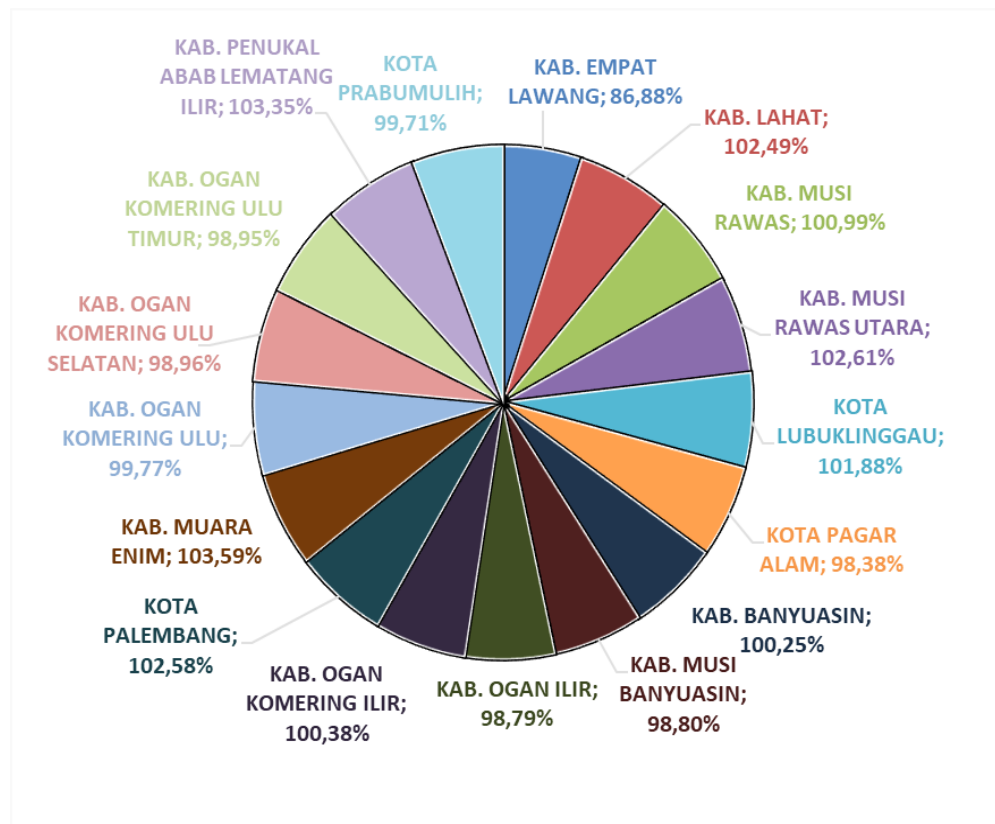
Grafik 3.4 Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Triwulan IV (empat) Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Seksi Rujukan Dinkes Desember 2025

Jika dilihat dalam pertriwulan Tahun 2025, Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan dari 98,39% Triwulan ke I tahun 2025 naik menjadi 98,48% pada Triwulan ke II tahun 2025 naik lagi pada Triwulan ke III sebesar 99,46% dan ada kenaikan lagi menjadi 102% pada Triwulan ke IV.

Grafik 3.5 Kepesertaan BPJS Kesehatan Per Kab/Kota di Sumatera Selatan s.d Desember 2025



Sumber : Seksi Rujukan Dinkes Desember 2025

Dari grafik diatas, pencapaian tertinggi kepesertaan BPJS yaitu Kab. Muara Enim sebesar 103,59%, dan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 103,35% sedangkan pencapaian yang terendah pada Kab. Empat Lawang sebesar 86,88%.

Permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Komitmen penganggaran Pemkab/Pemkot untuk JKN belum optimal.
2. Penonaktifan mendadak peserta PBI-JK oleh Kemensos menghambat pelayanan.
3. Data BNBA PBI-JK tidak dapat diverifikasi karena *masking* data BPJS.
4. Masih terdapat hutang Program Jamsoskes Sumsel Semesta 2018 sebesar ± Rp70 miliar.
5. Permasalahan validasi data kependudukan (NIK tidak online).

Analisis:

Masalah utama terletak pada tata kelola data dan keberlanjutan pembiayaan, yang berdampak langsung pada akses pelayanan rujukan.

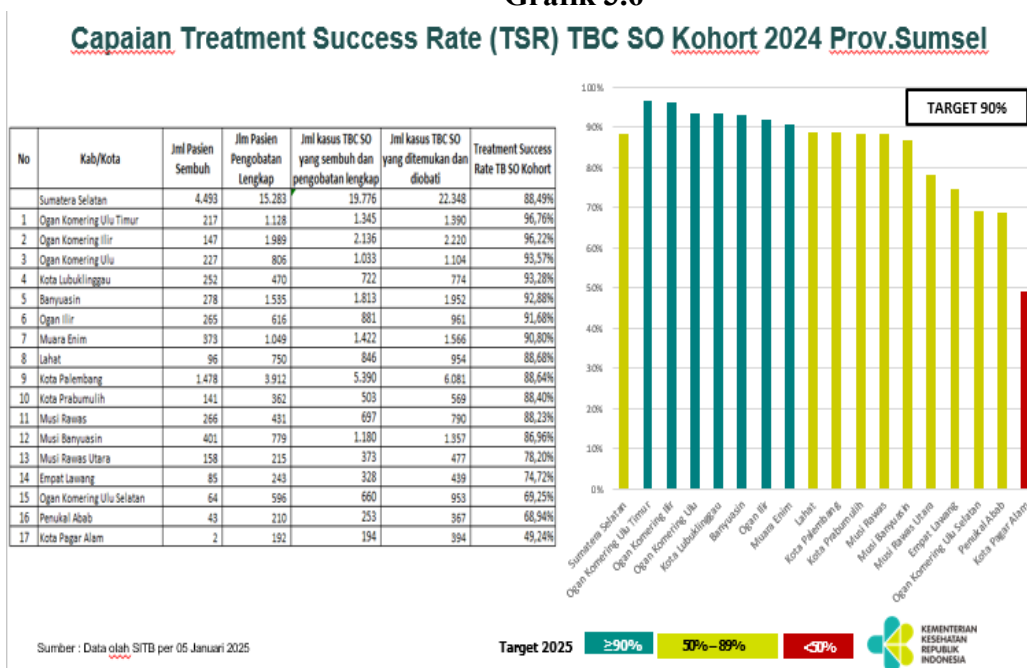
Upaya yang dilakukan antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota
- Advokasi Program JKN
- Konsultasi dan Koordinasi dengan Pusdatin Kemensos RI

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
5.	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	%	90	19.776	88.49	Tinggi

Grafik 3.6

Capaian Treatment Success Rate (TSR) TBC SO Kohort 2024 Prov.Sumsel



Capaian Treatment Success Rate (TSR) di Provinsi Sumatera Selatan untuk Kohort 2023 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengobatan secara keseluruhan mencapai 88,49 %, yang masuk dalam kategori kuning karena belum mencapai target nasional sebesar 90%.

Beberapa kabupaten/kota berhasil memenuhi target TSR $\geq 90\%$ (kategori hijau), di antaranya Ogan Komering Ulu Timur (96,76%), Ogan Komering Ilir

(96,22%), Ogan Komering Ulu (93,57%), Kota Lubuklinggau (93,28%), Banyuasin (92,88%), Ogan Ilir (91,68), dan Muara Enim (90,80%). Daerah-daerah ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pengobatan TBC dan telah memenuhi target nasional. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota masih berada dalam kategori kuning dengan capaian TSR 50–89% seperti, Lahat (88,68%), Kota Palembang (88,64%), Kota Prabumulih (88,40%), Musi Rawas (88,23%), Musi Banyuasin (86,96%), Musi Rawas Utara (78,20%), Empat Lawang (74,72%), dan beberapa daerah lainnya. Masih diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan, seperti pengawasan yang lebih ketat, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi masyarakat, sehingga target TSR $\geq 90\%$ dapat tercapai di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Program TBC memiliki berbagai kegiatan dalam rangka tercapainya keberhasilan program yaitu:

- Deteksi Dini Terduga TBC
- Investigasi Kontak
- Pemeriksaan Dahak dengan Mikroskopis dan Tes Cepat Molekuler (78 alat TCM)
- Pengobatan TBC sensitive di Seluruh Puskesmas Wilayah Sumsel
- Pengobatan TBC Resisten Obat di 24 RS Rujukan TBC RO di Provinsi Sumsel
- Pengawasan Menelan Obat
- Pencatatan dan Pelaporan (Sistem Informasi Tuberkulosis/ SITBC)

Tabel 3.4 Target Sesuai IKU dan IKK beserta Capaian 5 Tahun Sebelumnya

No	Indikator	Tahun	Capaian	Target	Sasaran (Estimasi)	Jumlah Kasus
1	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment)	2021	8.936 (89%)	90%	-	10.009
		2022	12.578 (92%)	90%	-	13.681
		2023	18.144 (92%)	90%	-	19.769

No	Indikator	Tahun	Capaian	Target	Sasaran (Estimasi)	Jumlah Kasus
	Succes Rate)	2024	19.483 (92%)	90%	-	21.174
		2025	19.776 (88%)	90%	-	22.348

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
6.	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	23,4		2,32	Sangat Baik

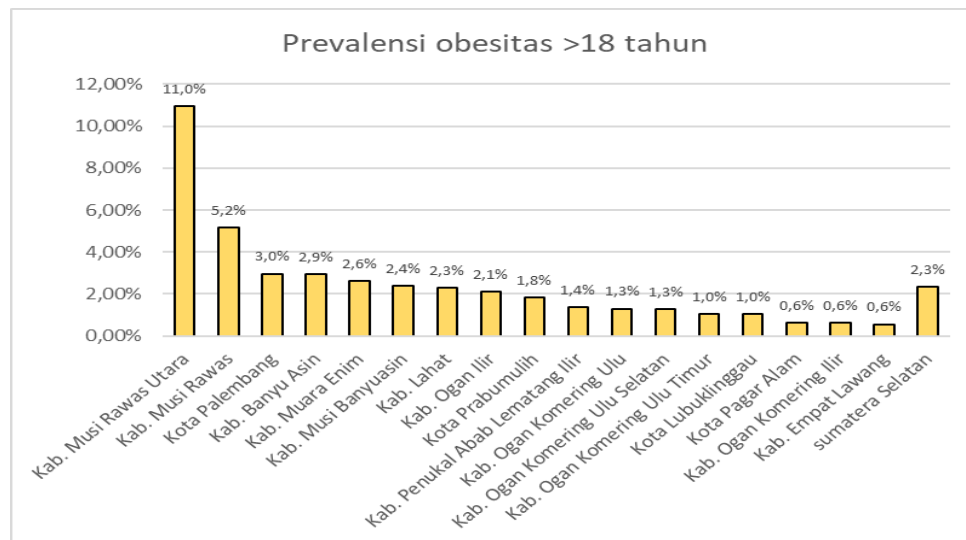
Tabel 3.5 Capaian Prevalensi Obesitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kode Kab/ Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Penduduk Obesitas	Jumlah Penduduk umur >18 tahun	Prevalensi Obesitas	Tercapai/ Tidak tercapai
1601	Kab. Ogan Komering Ulu	3.460	265.539	1,30%	Tercapai
1602	Kab. Ogan Komering Ilir	3.553	573.381	0,62%	Tercapai
1603	Kab. Muara Enim	11.654	446.999	2,61%	Tercapai
1604	Kab. Lahat	7.282	319.650	2,28%	Tercapai
1605	Kab. Musi Rawas	14.998	290.933	5,16%	Tercapai
1606	Kab. Musi Banyuasin	10.567	445.910	2,37%	Tercapai
1607	Kab. Banyu Asin	18.388	628.882	2,92%	Tercapai
1608	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.974	483.141	1,03%	Tercapai
1609	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.035	311.435	1,30%	Tercapai
1610	Kab. Ogan Ilir	6.431	304.871	2,11%	Tercapai
1611	Kab. Empat Lawang	1.433	256.873	0,56%	Tercapai
1612	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.876	138.557	1,35%	Tercapai
1613	Kab. Musi Rawas Utara	15.131	138.068	10,96%	Tercapai
1671	Kota Palembang	36.023	1.213.247	2,97%	Tercapai
1672	Kota Pagar Alam	673	105.553	0,64%	Tercapai
1673	Kota Lubuklinggau	1.756	170.666	1,03%	Tercapai
1674	Kota Prabumulih	2.526	138.895	1,82%	Tercapai
16	sumatera Selatan	144.760	6.232.600	2,32%	Tercapai

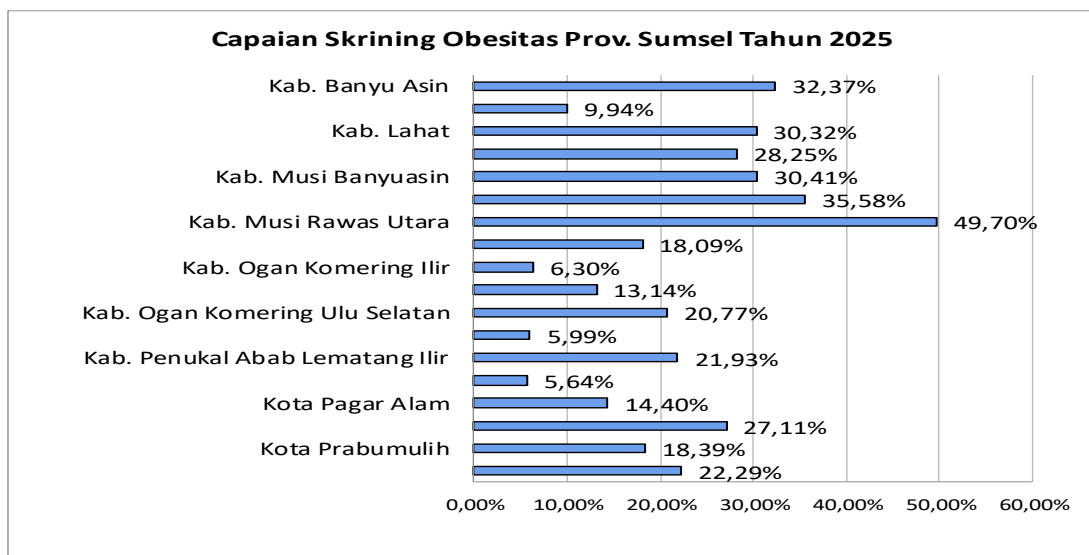
Sumber Data : Aplikasi Sehat Indonesia ku (ASIK)

Dari tabel diatas diketahui bahwa prevalensi obesitas tertinggi di Sumsel yaitu pada Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11 % dan prevalensi obesitas terendah di Kabupaten Empat Lawang, hal ini disebabkan karena jumlah peserta yang diskriming di Kab.Musi Rawas Utara tinggi (kurang lebih 50 % yang diskriming dari jumlah penduduk).

Grafik 3.7 Prevalensi Obesitas >18 Tahun

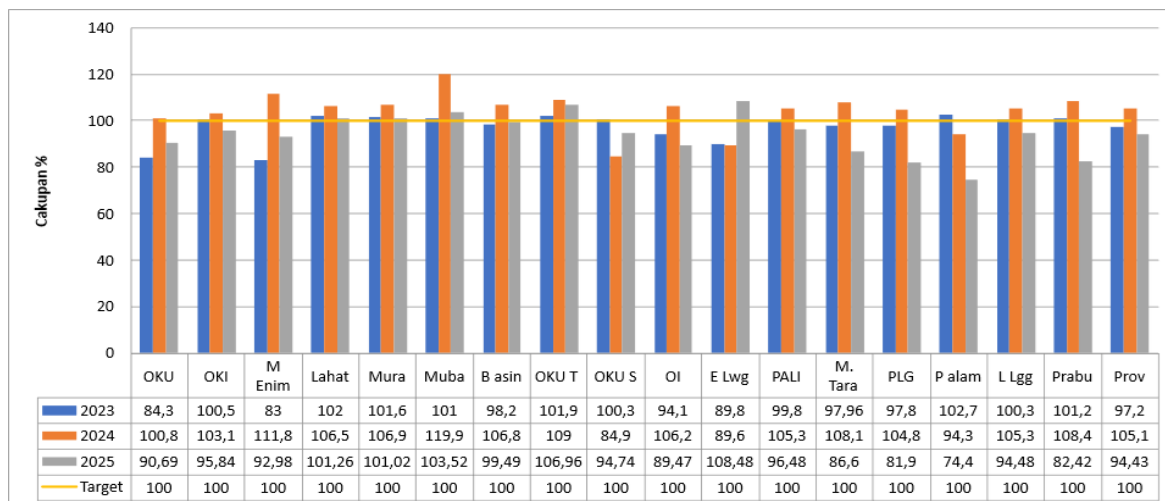


Untuk Provinsi Sumatera Selatan capaian prevalensi obesitas sebesar 2,32%, capaian ini sudah mencapai target nasional obesitas <23,4 %.



Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
7.	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	%	95		94,43	Sangat Baik

Grafik 3.8
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Sumsel Tahun 2023 – 2025



Grafik menunjukkan perbandingan cakupan imunisasi per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun (2023, 2024, 2025) dengan target 100%. Tren Provinsi tahun 2024 mengalami lonjakan signifikan di atas target, tahun 2025 turun menjadi 94,43% belum mencapai target 100%. Terjadi fluktuasi capaian yang cukup tajam dalam 3 tahun. Tahun 2024 kemungkinan terjadi *catch-up immunization* atau perbaikan entry data, tahun 2025 menunjukkan tantangan keberlanjutan program dan perlu evaluasi stabilitas cakupan. Dilihat per kabupaten/kota yang sudah mencapai target $\geq 100\%$, tahun 2025 yaitu kabupaten Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Timur dan Empat Lawang, artinya hanya 5 dari 17 kabupaten/kota (29%) yang memenuhi target. Kota Palembang dengan sasaran banyak justru mengalami penurunan signifikan artinya indikasi masalah urban (mobilitas tinggi, sasaran tidak terdata, drop out). Berdasarkan pola grafik, kemungkinan penyebab drop out rate tinggi, sasaran tidak kembali untuk imunisasi lanjutan, keterlambatan entry ASIK, ketidaksesuaian estimasi

sasaran, distribusi vaksin tidak merata, pergantian petugas imunisasi, serta dukungan lintas sektor belum optimal.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
8.	Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	%	5,8	26,4	52.94	Rendah

Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,8% dan terealisasi 26,4% atau sebesar 52,94%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka hasil capaian masih di bawah dari target yang ditetapkan.

Pada indikator Persentase Kab/Kota STBM, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan bahkan melebihi target kinerja, karena memang pada indikator ini menjelaskan bahwa kabupaten kota STBM Pilar ke-1 harus 100% ditambah Pilar ke-3 harus 75%. Akan lebih baik sampai 5 Pilar, Pilar ke-2 75% dan Pilar ke-4 75% serta Pilar ke-5 30%.

Tabel 3.6 Data Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs) Dan Kabupaten Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Tahun 2025

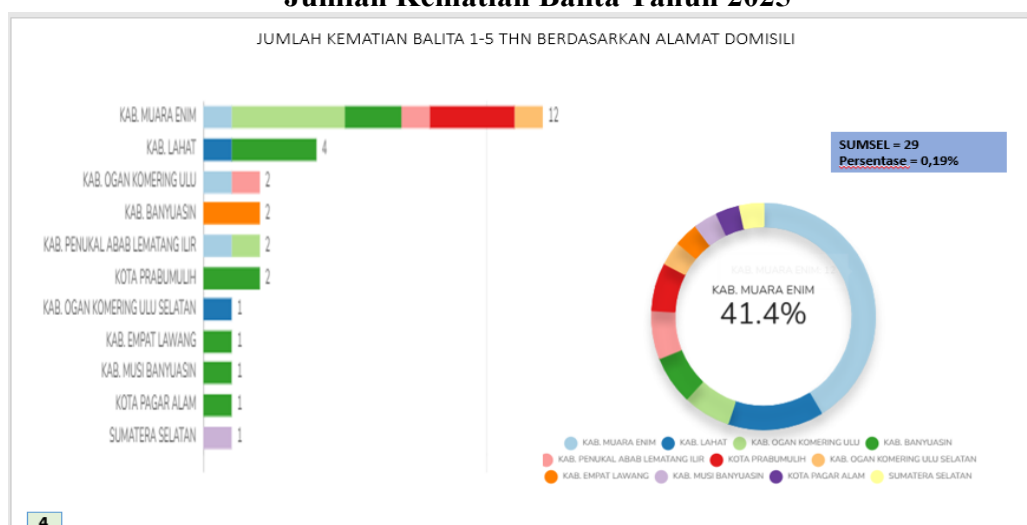
NO	LOKASI/ KAB/ KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN (KEMENDAGRI)	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH KK (INPUTAN PUSKES)	PILAR 1					JUMLAH KK SRS	% KK SRS	PILAR 2		JUMLAH KK CTPS	% KK CTPS	PILAR 3		JUMLAH KK PAMMRT	% KK PAMMRT	PILAR 4		JUMLAH KK PSRT	% KK PSRT	PILAR 5		JUMLAH KK PALDRT	% KK PALDRT	KK AKSES 5 PILAR STBM	% KK AKSES 5 PILAR STBM	DESA/ KELURAHAN STBM (PILAR 1 +3 PILAR)	% DESA/ KELURAHAN STBM		
					KK AMAN	KK LAYAK SENDIRI	KK LAYAK BERSAMA (SHARING)	KK BELUM LAYAK/BABS TERTUTUP	KK BABS TERBUKA			KK CTPS	KK TCTPS			KK PAMMRT	KK TPAMMRT			KK PSRT	KK TPSRT			KK PALDRT	KK TPALDRT								
6	SUMATERA SELATAN	3258	1682322	1957289	259256	1315468	101705	152023	61484	33707	1,72%	1828452	93,42%	1278677	97780	1278677	65,33%	1197497	101935	1.197.497	61,18%	900577	353085	900.577	46,01%	832.809	403.341	832.809	42,55%	548415	28,02%	813	24,95%
1	KAB. OGAN KOMERING ULU	157	49486	76607	8000	46474	3023	1628	856	3393	4,43%	59981	78,30%	46146	14779	46146	60,24%	45546	10050	45.546	59,45%	31770	18138	31.770	41,47%	27.860	23.209	27.860	36,37%	11581	15,12%	4	2,55%
2	KAB. OGAN KOMERING ILIR	327	241483	241483	0	195743	2664	38544	37	0	0,00%	236988	98,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	KAB. MUARA ENIM	255	144495	178509	198	159164	11541	2327	1563	233	0,13%	174793	97,92%	177766	0	177766	99,58%	177766	0	177.766	99,58%	95136	83373	95.136	53,29%	0	178.509	0	0,00%	0	0,00%	67	26,27%
4	KAB. LAHAT	378	148611	158601	22371	97941	3392	5579	16140	4272	2,69%	145423	91,69%	98756	14926	98756	62,27%	108059	5802	108.059	68,13%	64299	37545	64.299	40,54%	80.843	17.537	80.843	50,97%	46997	29,59%	115	30,42%
5	KAB. MUSI RAWAS	199	99974	116363	60666	68206	2297	1482	1	260	0,22%	133652	114,86%	118497	0	118497	101,83%	112405	428	112.405	96,67%	104650	12977	104.650	89,93%	102.231	2.429	102.231	87,86%	77673	66,75%	52	26,13%
6	KAB. MUSI BANYUASIN	242	175193	196388	1357	180061	3890	6116	6950	0	0,00%	198374	101,01%	170302	30194	170302	86,72%	169758	25152	169.758	86,44%	149787	56920	149.787	76,27%	133.890	60.785	133.890	68,18%	120912	61,57%	111	45,87%
7	KAB. BANYUASIN	313	27584	248104	0	168534	11361	46586	9913	10097	4,07%	236394	95,28%	232551	4106	232551	93,73%	211351	24123	211.351	85,19%	173037	56798	173.037	69,74%	173.326	65.647	173.326	69,86%	8507	3,43%	126	40,26%
8	KAB. OKU SELATAN	259	102869	102866	53305	25443	19307	1866	1961	802	0,78%	101882	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	KAB. OKU TIMUR	312	11884	194882	0	175729	9930	8490	1633	0	0,00%	194882	100,00%	179730	9672	179730	92,23%	174251	2728	174.251	89,41%	154589	2680	154.589	79,32%	145.642	3.116	145.642	74,73%	182717	93,76%	172	55,13%
10	KAB. OGAN ILIR	241	425600	122256	1096	95570	15501	3813	5022	1254	1,03%	121002	98,97%	117480	4779	117480	96,09%	91069	31265	91.069	74,49%	76183	46148	76.183	62,31%	83.019	39.303	83.019	67,91%	0	0,00%	116	48,13%
11	KAB. EMPAT LAWANG	156	74448	74858	12514	40888	8161	15559	4716	4896	6,54%	82838	110,66%	17050	16019	17050	22,78%	18240	0	18.240	24,37%	1075	5392	1.075	1,44%	8.892	6.751	8.892	11,88%	4678	6,25%	0	0,00%
12	KAB. PENJUKALABAB LEMATANG ILIR	71	57727	58300	20580	14797	1852	57	9915	0	0,00%	47201	80,96%	38085	0	38085	65,33%	0	0	0	0,00%	306	0	306	0,52%	306	0	306	0,52%	38085	65,33%	0	0,00%
13	KAB. MUSI RAWAS UTARA	89	0	56957	34478	8191	1695	1695	2760	8500	14,92%	48819	85,71%	0	2760	0	0,00%	8500	0	8.500	14,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	KOTA PALEMBANG	107	45803	63547	25851	11793	881	1273	0	0	0,00%	39798	62,63%	15121	0	15121	23,75%	15121	0	15.121	23,75%	6352	8769	6.352	10,00%	14.563	558	14.563	22,92%	7682	12,09%	5	4,67%
15	KOTA PRABUMULIH	45	24851	14887	5	14643	432	78	0	0	0,00%	15150	101,14%	14788	199	14788	98,67%	14406	581	14.406	96,12%	13109	1878	13.109	87,47%	12.527	2.456	12.527	83,59%	0	0,00%	10	22,22%
16	KOTA PAGAR ALAM	35	46857	46857	17835	6234	6088	16700	0	0	0,00%	46857	100,00%	46857	0	46857	100,00%	46857	0	46.857	100,00%	27486	19371	27.486	58,66%	46.857	0	46.857	100,00%	46857	100,00%	35	100,00%
17	KOTA LUBUK LINGGAU	72	5447	5894	0	5057	590	230	17	0	0,00%	5894	100,00%	5548	346	5548	94,13%	4088	1806	4.088	69,36%	2798	3096	2.798	47,47%	2.853	3.041	2.853	48,41%	2786	47,27%	0	0,00%

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
9.	Angka Kematian Balita	/ 1000 Kelahiran hidup	15	29	0,19	Sangat Baik

Kematian Balita adalah kematian anak usia 1-5 Tahun yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kasus kematian Balita yang terjadi sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yaitu dari 22 kasus kematian Balita di Tahun 2024 menjadi 29 kasus kematian Balita di Tahun 2025.

Tinginya kasus kematian Balita ini secara tidak langsung dikarenakan Masih banyak kasus kematian yang disebabkan oleh keterlambatan orang tua dalam mengenali gejala bahaya atau keterlambatan merujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai. Upaya yang dilakukan yaitu mendapatkan dukungan lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi serta memperkuat layanan kesehatan dasar dan integrasi sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan balita, termasuk Merapikan jalur rujukan dari bidan ke Puskesmas hingga ke Rumah Sakit Spesialis agar penanganan darurat tidak terlambat. Berikut dapat kita lihat diagram distribusi kematian bayi di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik 3.9
Jumlah Kematian Balita Tahun 2025



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2026)

Kematian Balita di provinsi masih cukup tinggi sebesar 29 kasus kematian balita. Perlu upaya besar lagi untuk terus menurunkan kematian balita tersebut ditahun yang akan datang. Sebaran kasus kematian balitai di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi, namun 3 kabupaten/kota penyumbang kematian balita tertinggi dari diagram tersebut dari Kabupaten Muara Enim sebanyak 12 kasus kematian balitai, Kabupaten Lahat sebanyak 4 kasus kematian balita, dan Kabupaten OKU, Banyuasin, PALI dan Prabumulih sebanyak 2 kasus kematian balita.

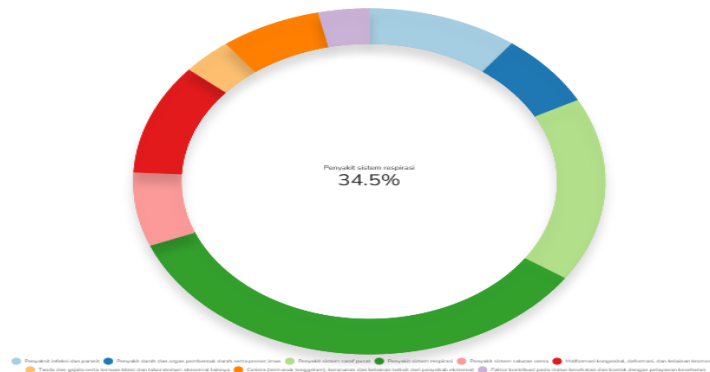
Dapat dilihat juga dari diagram dibawah ini macam-macam kasus yang menyebabkan kematian bayi itu terjadi.

Tabel 3.7
Penyebab Kematian Balita Tahun 2025

KASUS DUGAAN	SEMUA
Penyakit infeksi dan parasit	3
Neoplasma	0
Penyakit darah dan organ pembentuk darah serta proses imun	2
Penyakit terkait endokrin, nutrisi dan metabolik	0
Penyakit sistem saraf pusat	5
Penyakit pada telinga dan prosesus mastoid	0
Penyakit pada sistem peredaran darah	0
Penyakit sistem respirasi	10
Penyakit sistem saluran cerna	2
Penyakit kulit dan jaringan subkutan	0
Penyakit muskuloskeletal dan jaringan ikat	0
Penyakit ginjal dan reproduksi	0
Kehamilan, persalinan dan nifas	0
Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal	0
Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom	3
Tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium abnormal lainnya	1
Cedera (termasuk tenggelam), keracunan dan kelainan terkait dari penyebab eksternal	2
Penyakit khusus	0
Penyebab eksternal morbiditas	0
Faktor kontribusi pada status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan	1
Total	29
Tanpa NIK	0

(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 03 Februari 2026)

Grafik 3.10
Jumlah Kematian Balita Tahun 2025



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2025)

Dapat kita lihat bersama dari diagram diatas bahwa kasus kematian balita yang terjadi akibat Penyakit sistem pernapasan sebanyak 10 kasus, kematian yang terjadi akibat Penyakit sistem saraf pusat sebanyak 5 kasus, kematian yang terjadi Penyakit infeksi dan parasit , Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom, sebanyak 3 kasus, kematian yang terjadi akibat Penyakit darah dan organ pembentuk darah serta proses imun dan Cedera (termasuk tenggelam), keracunan dan kelainan terkait dari penyebab eksternal sebanyak 2 kasus, kematian yang terjadi akibat Tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium abnormal dan Faktor kontribusi pada status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan sebanyak 1 kasus.

Rencana strategi menurunkan kasus kematian balita yaitu Penguatan Puskesmas melalui penerapan tata laksana **MTBS** (Manajemen Terpadu Balita Sakit) untuk penyakit umum seperti pneumonia, diare, dan infeksi neonatal, Penguatan sistem rujukan terpadu (SISRUTE) untuk penanganan cepat kasus darurat serta Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan gawat darurat neonatal dan balita.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
10.	Angka Kematian Bayi	/ 1000 Kelahiran hidup	12,62	801	5,48	Sangat Baik

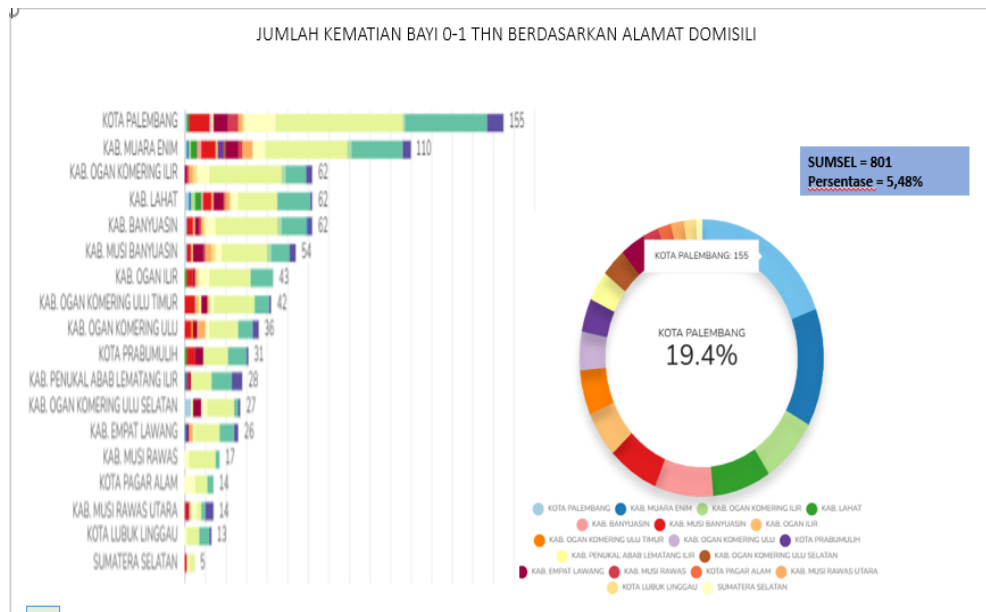
Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kasus kematian bayi yang terjadi sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yaitu dari 708 kasus kematian bayi di Tahun 2024 menjadi 801 kasus kematian bayi di Tahun 2025. Akan tetapi kasus kematian bayi di tahun 2025 sudah dibawah target yang diharapkan yaitu 12.48 persen sedangkan capaian angka kematian bayi di provinsi sumatera selatan sebesar 5,48 persen.

Tinginya kasus kematian bayi ini secara tidak langsung dikarenakan masih ada persalinan yang dilakukan tidak di fasyankes masih ada pertolongan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan, masih ada Fasyankes belum memiliki kelengkapan SDM, ruangan, alat kesehatan untuk siap menerima persalinan 24 jam, Masih ada penolakan rujukan dari ibu bersalin dan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit.

Upaya yang dilakukan yaitu mendapatkan dukungan lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk terkait persalinan di fasilitas kesehatan, adanya RTK diharapkan mendekatkan pelayanan persalinan di fasyankes, memenuhi Fasyankes yang belum memiliki kelengkapan SDM, ruangan, alat kesehatan sehingga siap menerima persalinan 24 jam, meningkatkan sosialisasi kehamilan risiko tinggi, peningkatan pelaksanaan P4K dan kelas ibu.

Berikut dapat kita lihat diagram distribusi kematian bayi di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik 3.11
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2025



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2026)

Kematian bayi di provinsi masih cukup tinggi sebesar 801 kasus kematian bayi. Jumlah ini belum dapat diturunkan dari target provinsi yang telah ditetapkan sebesar 500 kasus kematian bayi. Perlu upaya besar lagi untuk terus menurunkan kematian bayi tersebut ditahun yang akan datang. Sebaran kasus kematian bayi di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi, namun 3 kabupaten/kota penyumbang kematian bayi tertinggi dari diagram tersebut dari Kota Palembang sebanyak 120 kasus kematian bayi, Kabupaten Muara Enim sebanyak 72 kasus kematian bayi, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 66 kasus kematian bayi

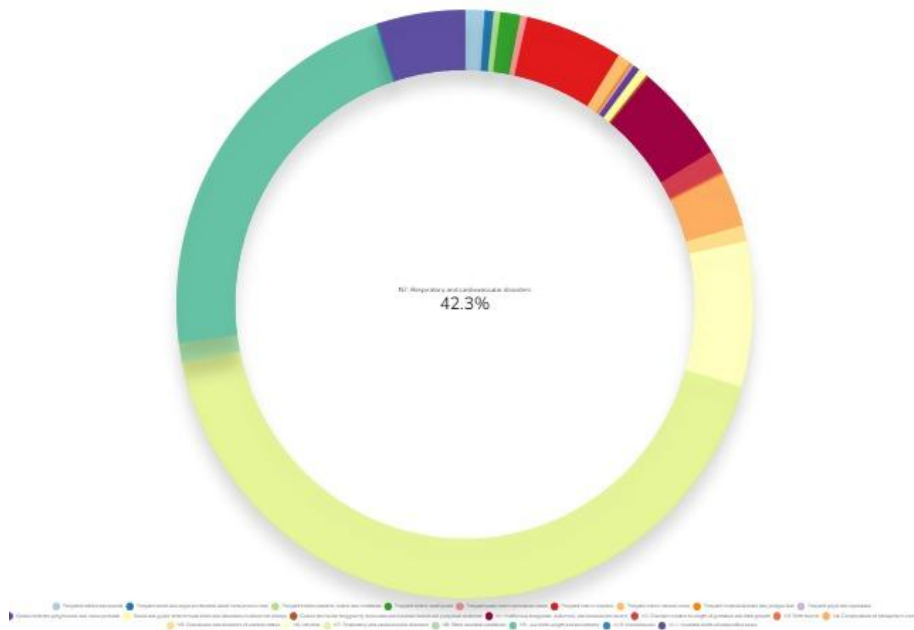
Dapat dilihat juga dari diagram dibawah ini macam-macam kasus yang menyebabkan kematian bayi itu terjadi.

Tabel 3.8
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024

KASUS DUGAAN	DIVERIFIKASI
N1: Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom	39
N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	13
N3: Birth trauma	4
N4: Complications of intrapartum events	17
N5: Convulsions and disorders of cerebral status	6
N6: Infection	59
N7: Respiratory and cardiovascular disorders	274
N8: Other neonatal conditions	9
N9: Low birth weight and prematurity	159
N10: Miscellaneous	1
N11: Neonatal death of unspecified cause	10
Penyakit infeksi dan parasit	12
Neoplasma	0
Penyakit sistem saluran cerna	6
Penyakit kulit dan jaringan subkutan	0
Penyakit muskuloskeletal dan jaringan ikat	1
Penyakit ginjal dan reproduksi	1
Kehamilan, persalinan dan nifas	0
Kondisi tertentu yang berhubungan dengan kelahiran	3
Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom	0
Tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium abnormal lainnya	4
Cedera (termasuk tenggelam), keracunan dan kelainan terkait dari penyebab eksternal	1
Penyakit khusus	0
Penyebab eksternal morbiditas	0
Faktor kontribusi pada status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan	0
Total	802
Tanpa NIK	0

(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 03 Januari 2025)

Grafik 3.12 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2025 Gangguan pernafasan dan kardiovaskular



(Berdasarkan Data MPDN, Tanggal 02 Februari 2025)

Dapat kita lihat bersama dari diagram diatas bahwa kasus kematian yang terjadi akibat Gangguan pernafasan dan kardiovaskular sebanyak 339 kasus, kematian yang terjadi akibat Berat badan lahir rendah dan prematuritas sebanyak 177 kasus, kematian yang terjadi akibat infeksi sebanyak 64 kasus, kematian yang terjadi akibat Penyakit sistem respirasi sebanyak 44 kasus, kematian yang terjadi akibat Malformasi kongenital, kromosom, dan kelainan sebanyak 43 kasus dan kematian yang terjadi akibat Kematian neonatal yang penyebabnya tidak diketahui sebanyak 39 kasus, disebabkan oleh Komplikasi kejadian intrapartum sebanyak 24 kasus, disebabkan Gangguan berhubungan dengan lama kehamilan dan pertumbuhan janin sebanyak 10 kasus, disebabkan Kondisi neonatal lainnya, Penyakit infeksi dan parasit, Penyakit sistem saraf pusat sebanyak 9 kasus, dan disebabkan oleh Kejang dan gangguan status serebral sebanyak 7 kasus. disebabkan oleh Penyakit sistem saluran cerna sebanyak 6 kasus, disebabkan oleh Penyakit darah dan organ pembentuk darah serta proses imun, Tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium sebanyak 4 kasus, disebabkan oleh Penyakit terkait endokrin, nutrisi dan metabolik, Penyakit pada sistem peredaran darah,

Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal sebanyak 3 kasus dan Trauma lahir, Lain-lain, Penyakit muskuloskeletal dan jaringan ikat, Penyakit ginjal dan reproduksi, Cedera (termasuk tenggelam), keracunan dan kelainan terkait dari penyebab eksternal sebanyak 1 kasus.

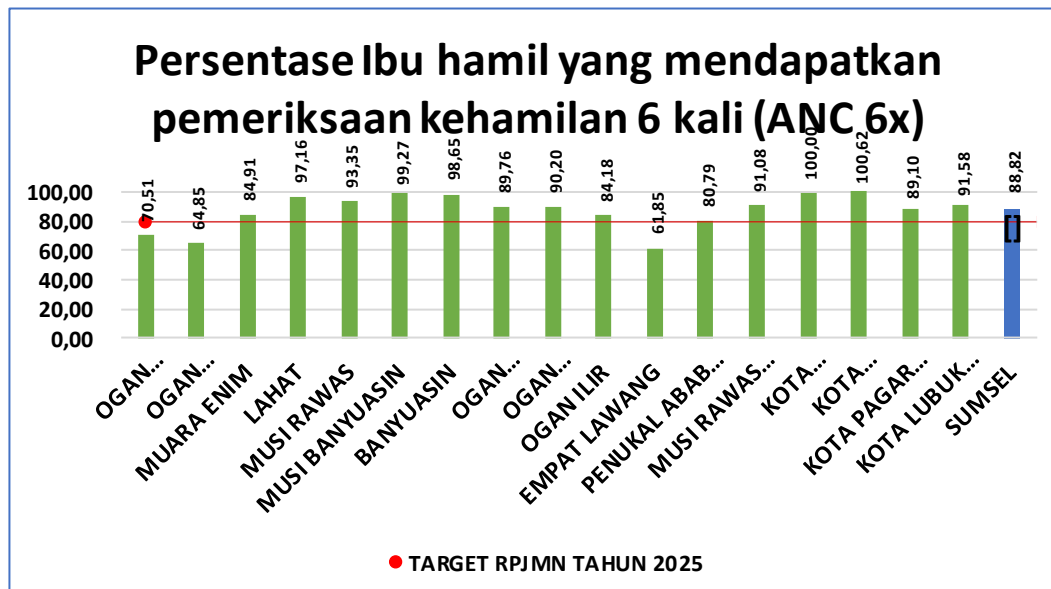
Rencana strategi menurunkan kasus kematian bayi yaitu Meningkatkan advokasi kepada pemangku kebijakan dalam peningkatan cakupan persalinan di fasyankes terutama pembinaan terhadap dukun bayi yang masih melakukan pertolongan persalinan, Meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual, melaksanakan pendampingan tim ahli ke Puskesmas, meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam upaya pertolongan persalinan di fasyankes serta meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Stiker P4K dan Kelas Ibu.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
11.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	%	60	14	82,35%	Tinggi

Merupakan Persentase Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester ke-3.

Berikut dapat kita lihat diagram Kab/Kota yang melaksanakan ANC 6 Kali Ibu Hamil Antenatal Care (K6) dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.13
Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan ANC 6 Kali Ibu Hamil
Antenatal Care (K6) Tahun 2025



Dari grafik diatas memperlihatkan capaian persentase kabupaten/kota yang melaksanakan ANC 6 kali (K6) SEBESAR 88,82 % dengan absolut 134.295.

Dari 17 kabupaten kota terdapat 14 kabupaten/kota yang telah mencapai target minimal capaian 80 %. Masih ada 3 kabupaten/kota yang belum mencapai target . Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan ANC 6 kali (K6) Tahun 2025 sebesar 82,35 % telah melampaui target RPJMD 60 %.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
12.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	%	50	17	93,71%	Sangat Baik

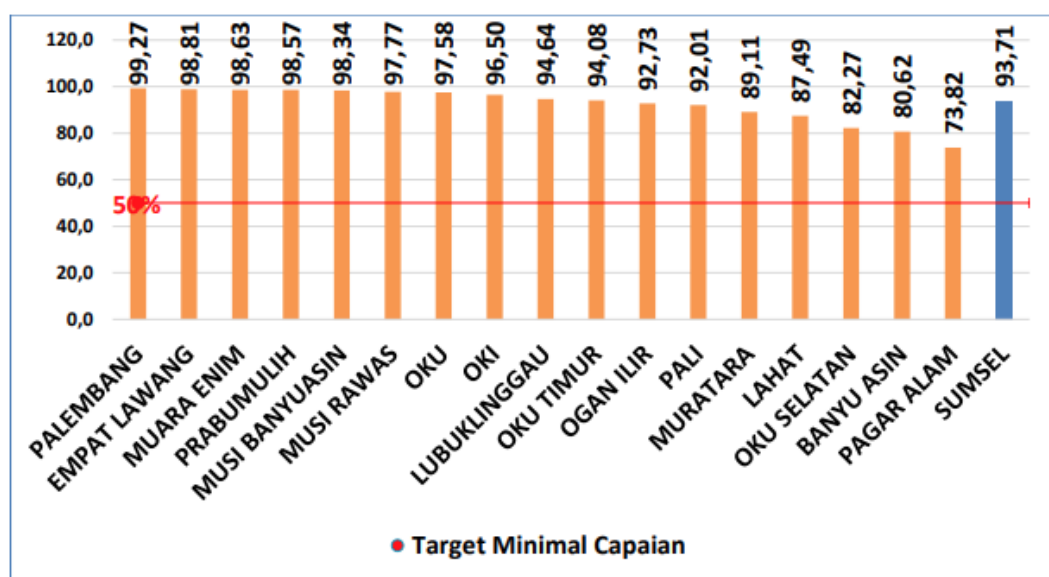
Merupakan Persentase balita yang yang dipantau tumbuh kembang dengan kriteria:

- a. Penimbangan berat badan sedikitnya 8 kali dalam satu tahun,
- b. Pengukuran panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun

- c. Pemantauan perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun (dengan cek list buku KIA atau KPSP atau instrumen lainnya)

Berikut dapat kita lihat diagram Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di masing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut :

Grafik 3.14
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita Tahun 2025



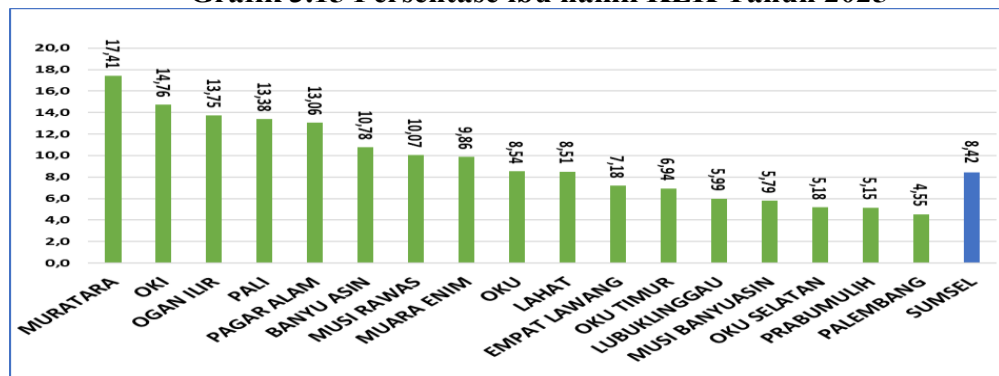
Grafik di atas memperlihatkan dari 17 Kabupaten/Kota terdapat 17 Kabupaten Kota yang mencapai target 50%, persentase kabupaten kota yang melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita telah mencapai 93,71%

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
13.	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	%	40	17	100	Sangat Baik

Persentase Ibu hamil yang mempunyai Indeks Massa Tubuh Pra hamil atau pada Trimester 1 (< 12 minggu) sebesar < 18,5 kg/m² dan atau Ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.

Berikut dapat kita lihat diagram Persentase ibu hamil kurang energi kronik dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.15 Persentase ibu hamil KEK Tahun 2025



Grafik diatas memperlihatkan persentase ibu hamil KEK sebesar 8,42 %, pada tahun 2025 di dapatkan dari 17 kabupaten/kota semuanya telah melaksanakan pemantauan ibu hamil KEK dengan capaian 10

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
14.	Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	90	24.641	65.06	Rendah

Grafik 3.16

Capaian Treatment Coverage (TC) Prov.Sumsel Tahun 2025



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diketahui bahwa Capaian *Treatment Coverage* di Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 65,06%, angka ini belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan yaitu 90%. Capaian TC tertinggi adalah di Kota Lubuklinggau yaitu 96,89% dan paling rendah adalah Kabupaten Empat Lawang 40,15%.

Tabel 3.9 Target sesuai IKU dan IKK beserta Capaian 5 Tahun Sebelumnya

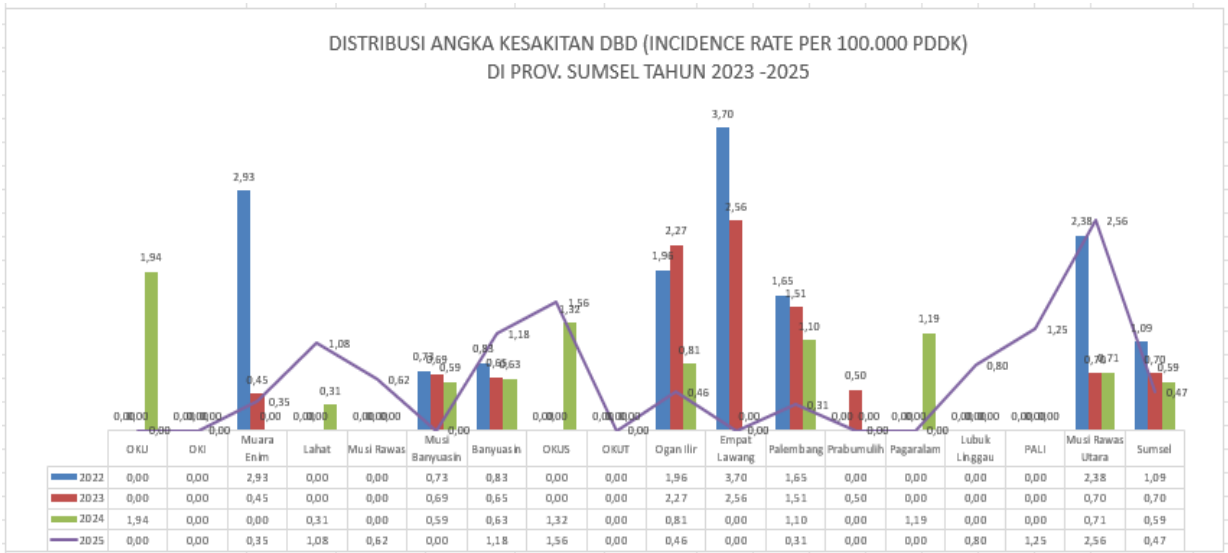
No	Indikator	Tahun	Capaian	Target	Sasaran (Estimasi)	Jumlah Kasus
2	Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	2021	13.830 (41%)	90%	33.773	-
		2022	21.610 (55%)	90%	38.940	-
		2023	23.610 (64%)	90%	36.710	-
		2024	23.420 (62%)	90%	37.946	-
		2025	24.641 (65%)	90%	37.876	-

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
15.	Angka Kematian (CFR) Dengue	%	0,50%	0,47	94%	Sangat Baik

Tabel 3.10

JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)																															
PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025																															
No	KABUPATEN /KOTA	JAN		PEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT		OKT		NOV		DES		TOTAL		I.R.	CFR	PODK (BPS 2023)	SUMBER LAPORAN
		P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	Penderita	Meninggal				
7	BANYU ASIN	82	2	42	0	17	0	19	0	26	1	10	0	21	1	15	0	17	0	38	0	37	0	14	0	338	4	38.7	1.18	874,210	GSHEET
8	OGAN KOMERING ULU SEL	21	1	6	0	4	0	1	0	3	0	3	0	3	0	4	0	6	0	8	0	2	0	3	0	64	1	15.1	1.56	424,190	ALL SIARVI
9	OGAN KOMERING ULU TIM	78	0	37	0	14	0	26	0	43	0	41	0	38	0	43	0	25	0	38	0	26	0	33	0	442	-	66.2	0.00	668,035	ALL SIARVI
10	OGAN ILIR	18	1	11	0	13	0	11	0	22	0	15	0	18	0	10	0	33	0	24	0	21	0	20	0	216	1	50.1	0.46	431,043	GSHEET
11	EMPAT LAWANG	6	0	4	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	10	0	32	-	9.4	0.00	342,178	GSHEET
12	KOTA PALEMBANG	87	1	74	0	81	1	95	0	68	0	80	0	85	0	72	0	62	0	75	1	90	0	99	0	968	3	55.4	0.31	1,748,495	SIARVI
13	KOTA PRABUMULIH	27	0	25	0	16	0	18	0	16	0	10	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	7	0	143	-	71.3	0.00	200,673	SIARVI
14	KOTA PAGAR ALAM	7	0	6	0	4	0	3	0	4	0	2	0	4	0	1	0	4	0	6	0	3	0	2	0	46	-	31.1	0.00	147,836	SIARVI
15	KOTA LUBUKLINGGAU	45	0	35	0	29	0	32	1	36	1	33	0	29	0	39	0	28	0	28	1	19	0	24	0	377	3	155.2	0.80	242,976	GSHEET
16	PENUKAL ABAB LEMATAI	14	1	5	0	6	0	8	0	3	0	9	0	5	0	2	0	7	0	7	0	9	0	5	0	80	1	39.5	1.25	202,681	SIARVI
17	MUSI RAWAS UTARA	5	0	3	0	1	0	3	0	4	0	4	0	7	0	10	0	4	0	21	0	29	2	26	1	117	3	59.7	2.56	195,362	GSHEET
TOTAL		646	6	443	1	333	2	331	2	322	3	275	0	283	2	##	0	292	0	400	2	436	2	367	1	4,437	21	50.23	0.47	8,834,072	

Grafik 3.17 Distribusi Angka Kesakitan DBD



Capaian CFR Sumsel pada tahun 2025 sebesar 0,47% dari total kasus Dengue, jumlah ini memenuhi target <1% yang ditetapkan Kemenkes RI. Diharapkan hingga tahun 2030 tidak ada lagi kematian akibat Dengue (*Zero Dengue Death 2030*).

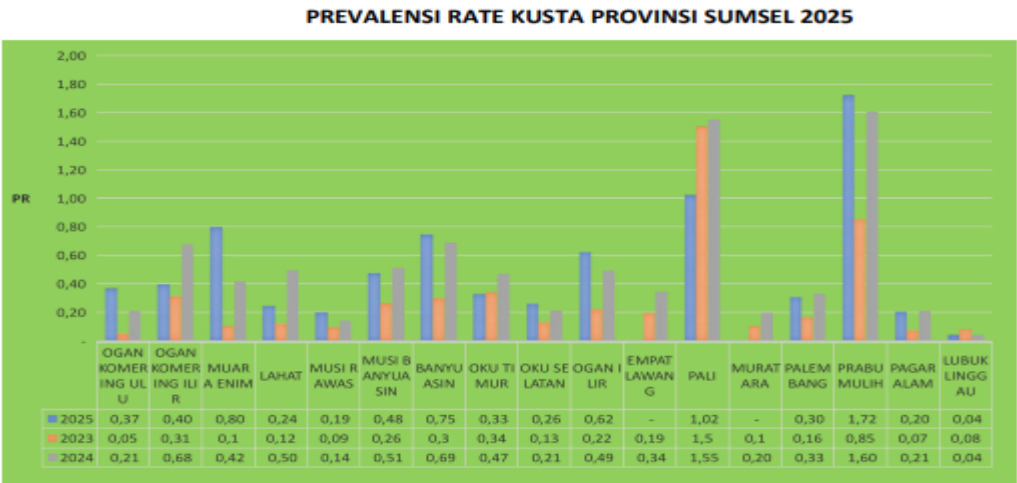
Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
16.	Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	Kab/Kota	17	17	100%	Sangat Baik

Gold standar pemeriksaan malaria melalui mikroskop. Penggunaan RDT diperkenankan untuk daerah perifer yang tidak mempunyai petugas mikroskopis. RDT tidak bisa digunakan untuk follow up pengobatan karena dapat memunculkan hasil positif palsu. Diharapkan seluruh faskes dapat meningkatkan kapasitas SDM mikroskopis untuk meningkatkan proporsi penggunaan mikroskop dalam diagnosa malaria.

Capaian indikator *Positivity Rate* (PR) pemeriksaan malaria Sumsel yaitu sebesar 0,23% sesuai target nasional <5%.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
17.	Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta	Kab/Kota	1	0	0	Sangat Rendah

Grafik 3.18

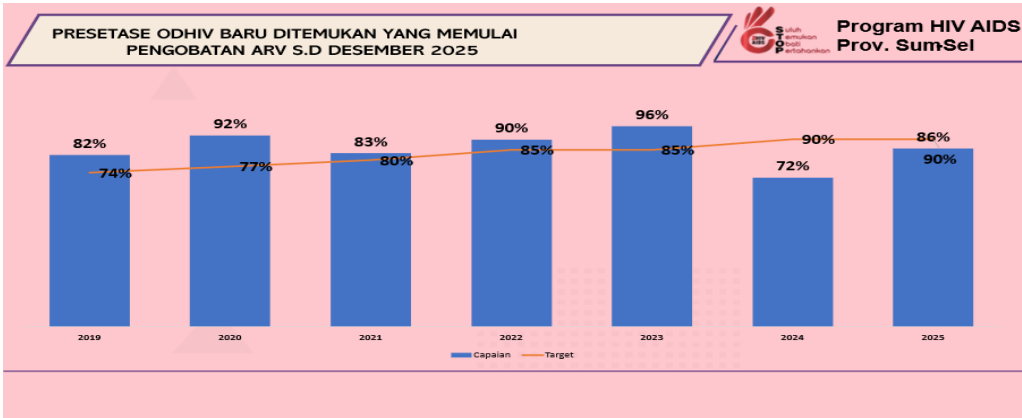


Grafik diatas menunjukkan prevalensi rate kusta di tahun2025kabupaten kota di sumatera selatan, kabupaten dan kota di sumatera selatankarena ada peubaan arahan keijakan WHO an kementean makadefinii operasional eliminai kuta mengalami perubahan, perubahan yangadamenyebabkan hampir seluruh provinsi di Indonesia yang sudah mencapai eliminasi kusta mengalami peruahan drastis,temauk di sumatera selatanyangpada tahun 2024 seluruh ka kota adalah kabupaten dengan eliminasi kustanamun pada tahun ini mengalami perubahan, belum ada satupun kabupatenkota mendapat julukan kab kotadengan eliminasi kusta .

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
18.	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	%	90		86%	Tinggi

ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan tercapai sebesar 86%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka hasil capaian masih di bawah dari target yang ditetapkan.

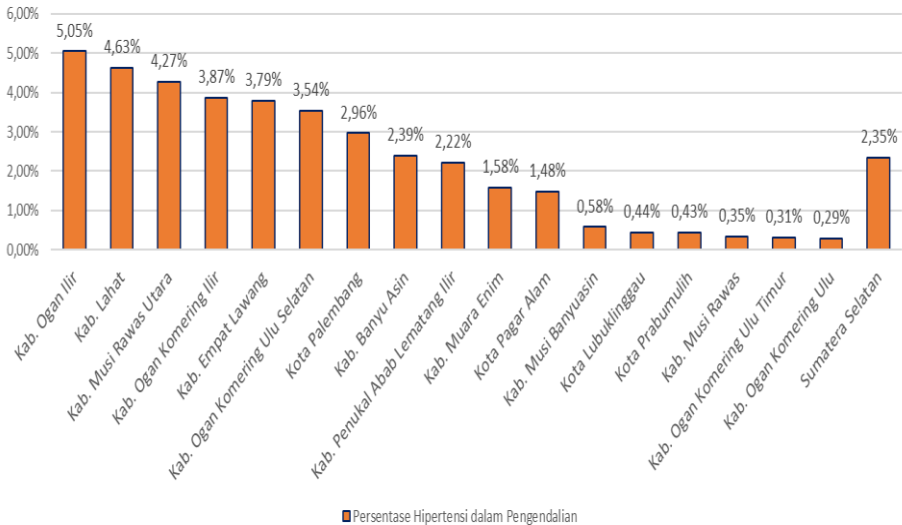
Grafik 3.19 Persentase ODHIV baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV



Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
19.	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	20		2,35	Sangat Rendah

Persentase Hipertensi dalam pengendalian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 20% dan tercapai sebesar 2,35%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka hasil capaian masih di bawah dari target yang ditetapkan.

Grafik 3.20 Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian



Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
20.	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	<0,50	7172	0,11	Sangat Baik

Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun pada tahun 2025 ditargetkan <0,50% dan terealisasi 7172 atau sebesar 0,11%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian masih di bawah batas aman dari target yang ditetapkan.

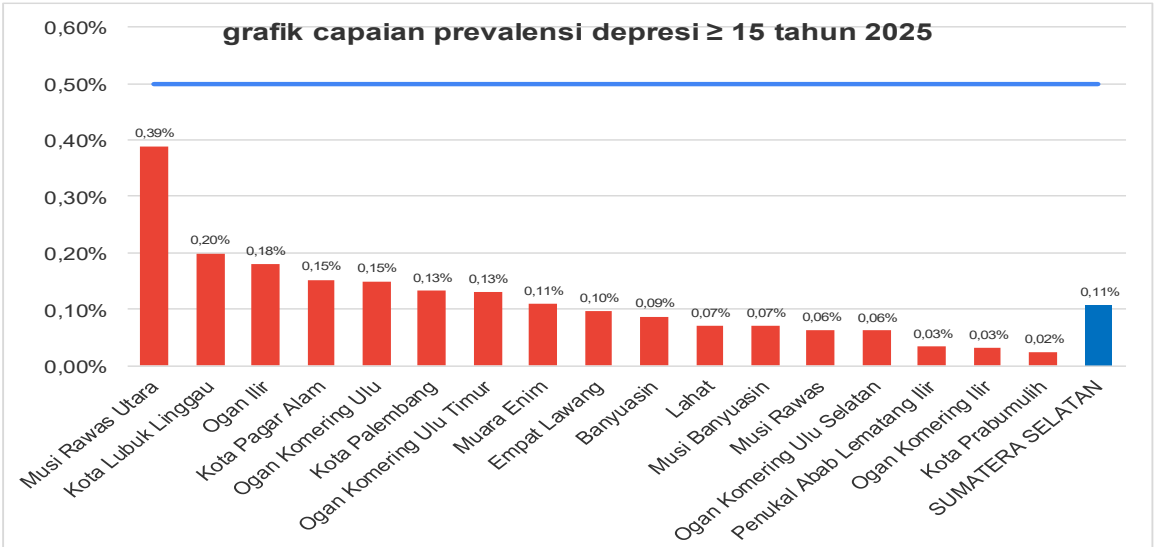
Tabel 3.11 capaian prevalensi depresi > 15 tahun prov. Sumsel tahun 2025

NO	KAB/KOTA	Jumlah pddk usia ≥ 15 tahun	Prevalensi (0,5%)	Sasaran Depresi	Pddk Mengalami Depresi	Capaian
1.	Musi Rawas Utara	150.424	0,50%	752	585	0,39%
2.	Kota Lubuk Linggau	182.716	0,50%	914	363	0,20%
3.	Ogan Ilir	283.825	0,50%	1419	513	0,18%

NO	KAB/KOTA	Jumlah pddk usia ≥ 15 tahun	Prevalensi (0,5%)	Sasaran Depresi	Pddk Mengalami Depresi	Capaian
4.	Kota Pagar Alam	102.777	0,50%	514	157	0,15%
5.	Ogan Komering Ulu	291.805	0,50%	1.459	436	0,15%
6.	Kota Palembang	1.339.705	0,50%	6.699	1781	0,13%
7.	Ogan Komering Ulu Timur	514.712	0,50%	2.574	675	0,13%
8.	Muara Enim	483.461	0,50%	2.417	525	0,11%
9.	Empat Lawang	267.877	0,50%	1.339	260	0,10%
10.	Banyuasin	673.034	0,50%	3.365	587	0,09%
11.	Lahat	377.978	0,50%	1.890	266	0,07%
12.	Musi Banyuasin	496.099	0,50%	2.480	347	0,07%
13.	Musi Rawas	323.914	0,50%	1.620	203	0,06%
14.	Ogan Komering Ulu Selatan	313.370	0,50%	1.567	193	0,06%
15.	Penukal Abab Lematang Ilir	154.646	0,50%	773	51	0,03%
16.	Ogan Komering Ilir	617.150	0,50%	3.086	193	0,03%
17.	Kota Prabumulih	149.618	0,50%	748	37	0,02%
	SUMATERA SELATAN	6.723.111	0,50%	33.616	7172	0,11%

Sumber Data : Aplikasi Sehat Indonesia ku (ASIK) dan Simkeswa

Grafik 3.21 Capaian Prevalensi Depresi



Dari tabel diatas diketahui bahwa prevalensi depresi tertinggi di Sumsel yaitu pada Kota Lubuk Linggau sebesar 0,20 % dan prevalensi depresi terendah di Kota Prabumulih 0,02%, hal ini disebabkan karena jumlah peserta yang diskruining di Kota Lubuk linggau banyak ditemukan depresi.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan capaian prevalensi depresi sebesar 0,11%, capaian ini sudah mencapai target nasional depresi < 0,50 %.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
21.	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	%	<12,4		3,32	Sangat Baik

Grafik 3.22



Hasil Capaian Skrining Merokok Usia 10-21 Tahun masih rendah di Tahun 2025, hanya Kabupaten Musi Rawas yang mencapai target 12,73 % dari target 12,4 %.

Berdasarkan hasil skrining merokok usia 10-21 Tahun didapatkan data jumlah perokok pada usia 10-21 Tahun. Data inilah yang menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke klinik Layanan Upaya Berhenti Merokok untuk mengikuti Program Konseling Upaya Berhenti Merokok. Untuk Percepatan layanan klinik Upaya Berhenti Merokok yang sesuai dengan prosedur layanan yang baik dilakukan pembinaan ke klinik Upaya Berhenti Merokok di 10 Kabupaten/Kota.

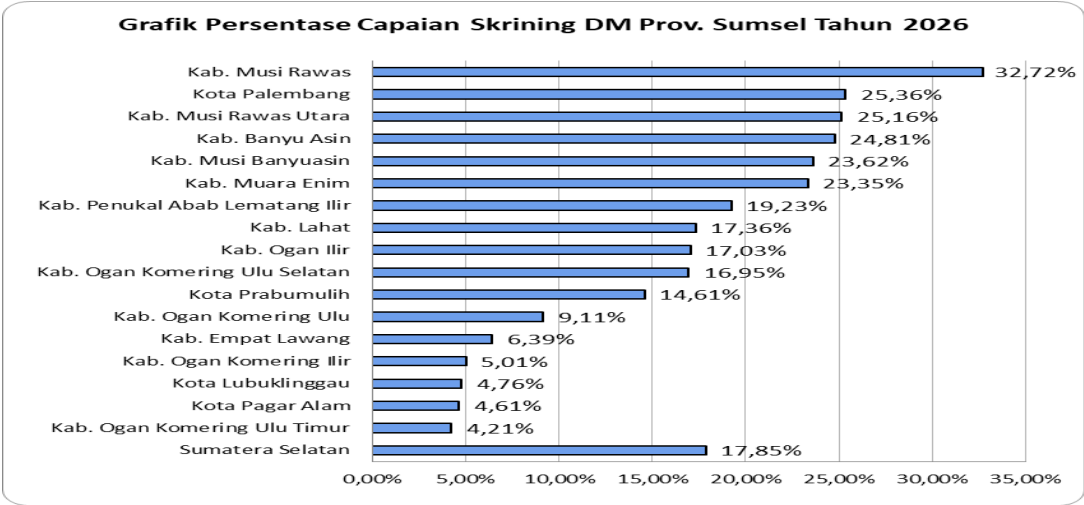
Pelaksanaan kegiatan pembinaan Layanan Upaya Berhenti Merokok di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan klinik Upaya Berhenti Merokok sudah aktif di 10 Kabupaten Kota. Pembinaan layanan Klinik Upaya Berhenti Merokok meliputi pembinaan ketrampilan dan keahlian Pengelola Program dalam melakukan layanan konseling, pemenuhan alat dan fasilitas yang ada di klinik Upaya Berhenti Merokok dan Pembinaan Pengelola Program dalam hal penjangkaran pasien yang berkunjung ke klinik Upaya Berhenti Merokok.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
22.	Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protokol	%	30	0	0	Sangat Rendah

Sesuai dengan indikator renstra Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Pada Permenkes ini disebutkan bahwa indikator untuk deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA adaalah: **“Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol”**. Pada pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA tahun 2025 ini, pemeriksaan IVA belum dilakukan sebagai tindak lanjut, karena setiap pasien yang dilakukan deteksi dini HPV DNA juga dilakukan pemeriksaan IVA karena itu deteksi dini yang dilakukan di tahun 2025 disebut Deteksi Dini HPV DNA Co testing IVA. Sehingga walaupun seluruh pasien juga dilakukan pemeriksaan IVA hal ini belum dapat dikatakan sebagai tindak lanjut terhadap pasien positif HPV DNA sehingga tindak lanjut masih 0 untuk setiap Kab/ Kota.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
23.	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	%	2	0	0	Sangat Rendah

Grafik 3.23



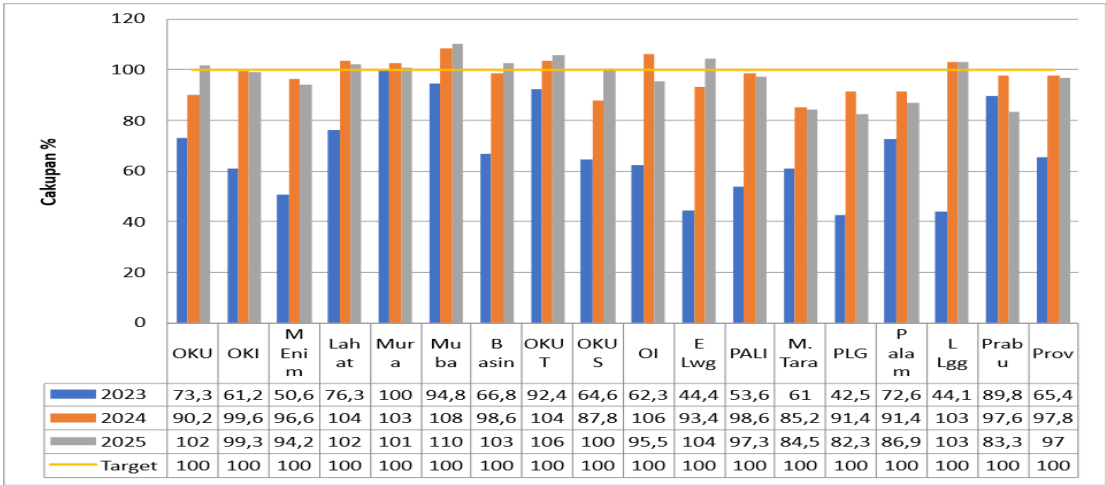
Grafik capaian skrining diabetes melitus diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kabupaten/kota yang mencapai cakupan skrining DM di atas 60%, sehingga target tahun 2025 sebanyak 2 kab/kota belum tercapai. Secara agregat, cakupan skrining DM Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 17,85%. Capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Rawas (32,72%), disusul Kota Palembang (25,36%) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (25,16%). Sementara itu, capaian terendah tercatat di Kabupaten OKU Timur (4,21%) dan Kota Pagar Alam (4,61%). Data ini menunjukkan bahwa cakupan skrining DM masih jauh dari target nasional dan memerlukan percepatan pelaksanaan skrining secara masif di seluruh kabupaten/kota.

Grafik 3.24



Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
24.	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	%	95		97,05%	Sangat Baik

Grafik 3.25
Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2025

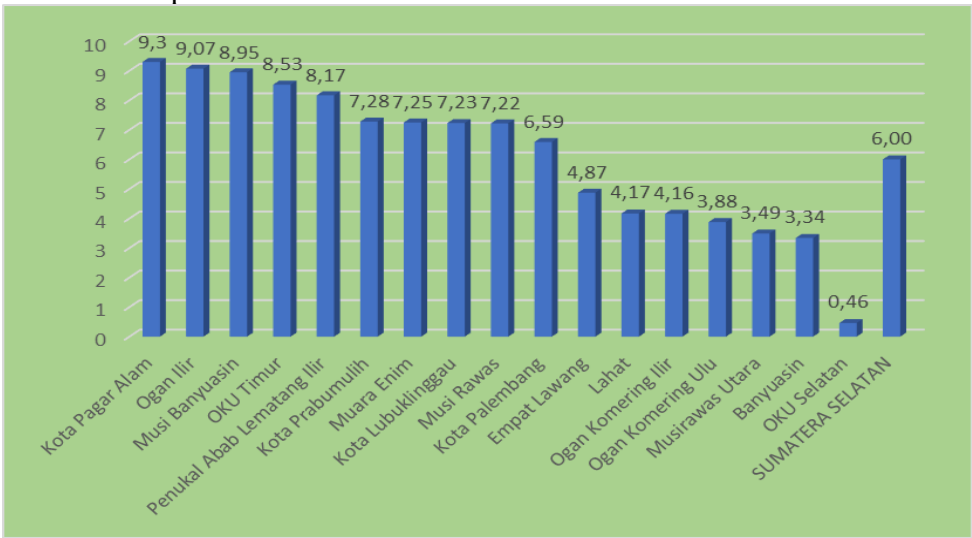


Sumber: Laporan Imunisasi Rutin, Tahun 2023-2025

Capaian provinsi tahun 2023 sangat rendah (hanya 65,4%), 2024 terjadi lonjakan besar mendekati target (97,8%), 2025 relatif stabil (97%) namun belum mencapai 100%. Tahun 2023 mayoritas kabupaten di bawah 80%, bahkan beberapa di bawah 50% seperti kabupaten Empat Lawang (44,4%), kota Lubuk Linggau (44,1%), kota Palembang (42,5%), Muratara (61%), OKU Selatan (64,6%). Tahun 2024 Terjadi peningkatan drastis hampir seluruh kabupaten >100%. Cakupan provinsi naik dari 65,4% menjadi 97,8%. Kabupaten yang mencapai >100% yaitu kabupaten Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Timur, Ogan Ilir, kota Lubuk Linggau. Tahun 2025 Capaian relatif stabil (97%), kabupaten dengan cakupan ≥100% yaitu kabupaten OKU (102%), Lahat (102%), Musi Rawas (101%), Musi Banyuasin (110%), Banyuasin (103%), OKU Timur (106%), OKU Selatan (100%), Empat Lawang (104%), kota Lubuk Linggau (103%) sedangkan cakupan yang masih <90% yaitu kabupaten Muratara (84,5%), kota Palembang (82,3%), kota Pagar Alam (86,9%), kota Prabumulih (83,3%). Kabupaten/kota yang 3 tahun terakhir dengan cakupan rendah yaitu kabupaten Muratara, kota Palembang, Pagaralam, dan Prabumulih. Kota dengan sasaran banyak seperti Palembang justru rendah kemungkinan mobilitas tinggi, drop out, dan sasaran sulit dilacak.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
25.	Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	%	86%	94%	109%	Sangat Baik

Grafik 3.26 Pencapaian Indikator Bukan Campak-Bukan Rubela (*Discarded Rate*) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Sumber: Laporan Surveilans Campak-Rubela, 2025

Dari grafik diatas didapat hasil bahwa 94% kabupaten/kota mencapai target yang ditetapkan (16 kabupaten/kota) dan terdapat 6% kabupaten/kota yang tidak mencapai target *discarded rate* yaitu Kabupaten OKU Selatan.

Permasalahan yang terjadi pada Discarded Rate Campak Rubella, antara lain :

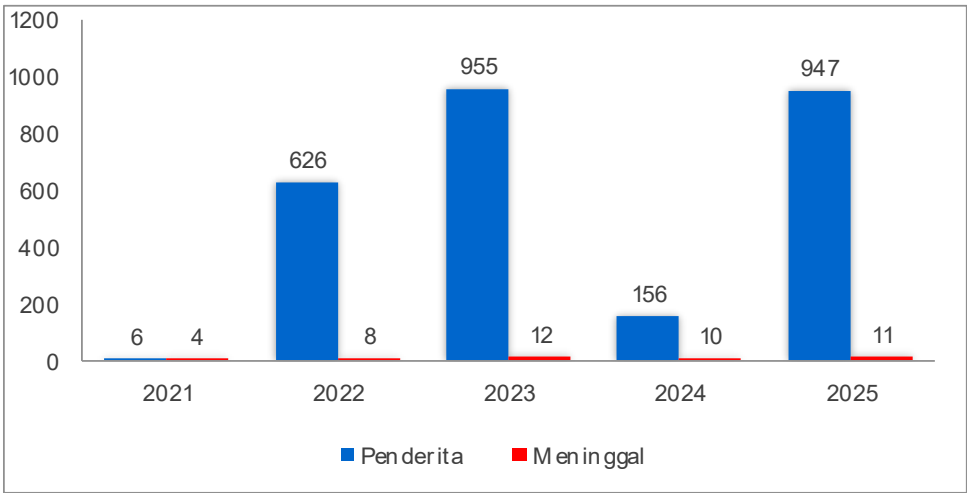
- Masih banyaknya (7 kab/kota) yang belum berhasil melakukan pengambilan specimen kasus suspek campak-rubela
- Masih terdapat 5,9% kab/kota yang belum mencapai indicator Discarded Rate (Kab. OKU Selatan)

Upaya yang harus dilakukan, antara lain :

- Melakukan edukasi dan penjelasan secara persuasive serta menyampaikan tujuan dilakukan pengambilan specimen kepada anggota keluarga agar bersedia dilakukan pengambilan specimen.
- Kabupaten/Kota diharapkan terus mengingatkan Fasyankes melakukan review register catatan pasien secara rutin minimal mingguan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
26.	Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Grafik 3.27 Jumlah Penderita Pada KLB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025



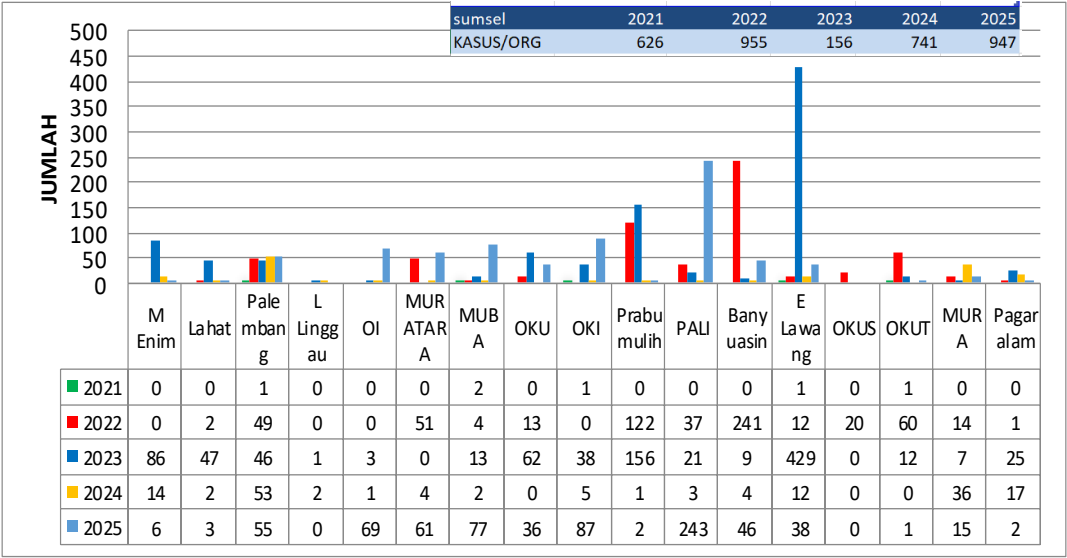
Grafik diatas menunjukkan bahwa penderita KLB di kabupaten/kota pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 156 penderita menjadi 947 penderita. Sedangkan penderita KLB yang mengalami

kematian sebanyak 10 kasus ditahun 2024 menjadi 11 kasus kematian di tahun 2025, mengalami peningkatan dari tahun 2024.

Semua penderita pada KLB tahun 2025 yaitu sebanyak 947 orang (100%) telah mendapat respon dan pelayanan kesehatan < 24 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik itu puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah distribusi jumlah penderita pada KLB di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.28 Jumlah Penderita KLB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025



Grafik diatas menunjukkan bahwa penderita KLB di kabupaten/kota pada tahun 2025 yang tertinggi adalah di kota Palembang sebanyak 267 orang, Pali sebanyak 243 orang, OKI sebanyak 87 orang, Muba sebanyak 77 orang, Ogan Ilir sebanyak 69 orang, Muratara sebanyak 61 orang, Banyuasin sebanyak 46 orang, Empat lawang sebanyak 38 orang, OKU sebanyak 36 orang, Musirawas sebanyak 15 orang, Muara Enim sebanyak 6 orang, Lahat sebanyak 3 orang, Prabumulih sebanyak 2 orang, Pagar Alam sebanyak 2 orang dan OKUT sebanyak 1 orang . Semua penderita pada KLB di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yaitu sebanyak 947 orang (100%) telah mendapat respon dan pelayanan kesehatan < 24 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik itu puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
27.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Dari laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan saat terjadi dan paska bencana dari kabupaten/kota maupun dari hasil kegiatan dilapangan yang diikuti oleh petugas tim kesehatan provinsi sumatera selatan, semua korban bencana dilakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan dengan pencapaian target 100%

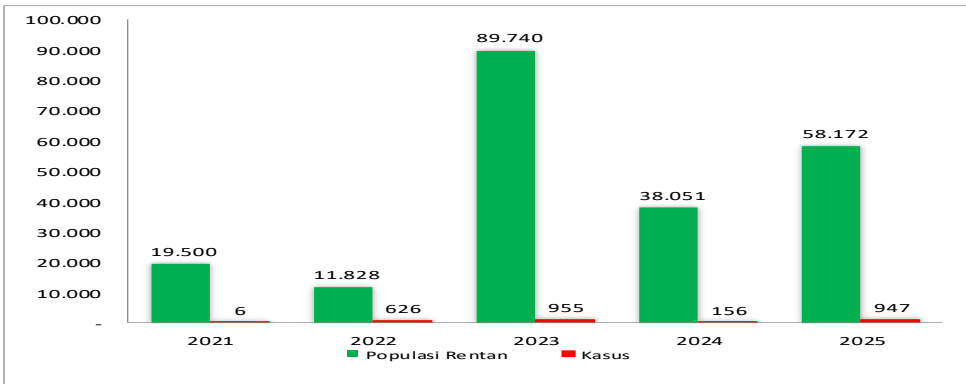
Tabel 3.12 Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi

No	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			PERSENTASE CAPAIAN (%)	SAT	KET
		Total Target yg harus dilayani th. 2024 dan 2025	CAPAIAN JAN S/D DES 2024 dan 2025				
			Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani			
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan /atau Berpotensi Bencana Provinsi	6.917	6.917	-	100,00	%	Capaian Tahun 2024
2		497	497	-	100,00	%	Capaian Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2025				Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Penduduk yang Beresiko/ Terdampak Bencana	Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan Kesehatan	Jumlah warga negara yang terlayani/ masyarakat (Pengobatan)	Capaian = (5):(4)x 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	171.124	497	497	100	Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai protaf

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
28.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situai KLB Provinsi	%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Grafik 3.29 Distribusi Populasi Rentan Yang Berisiko Terdampak KLB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

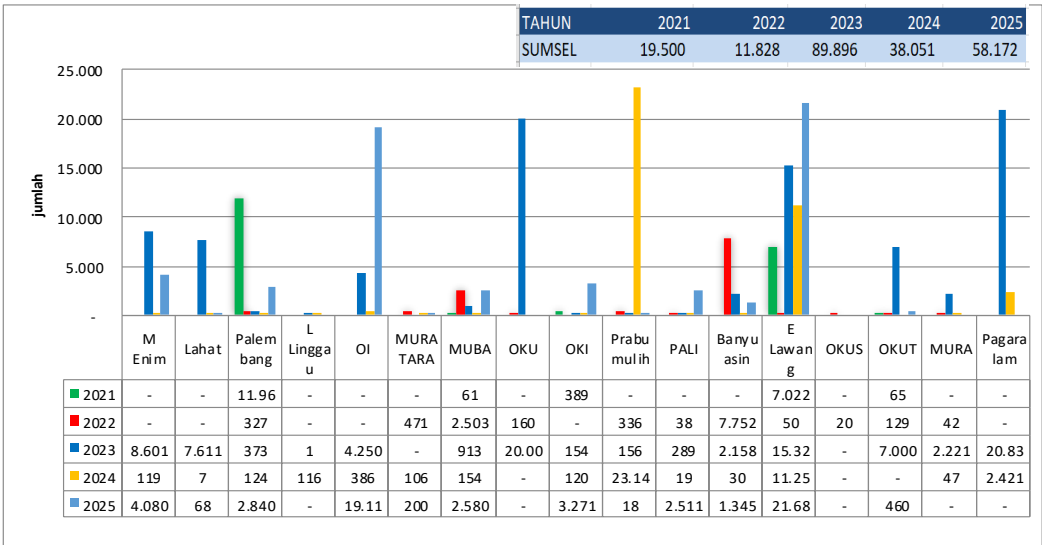


jukkan bahwa jumlah populasi rentan yang berisiko terdampak KLB di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebanyak 58.172 orang. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebanyak 38.051. Sedangkan jumlah penderita KLB sebanyak 156 orang pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebanyak 947 penderita .

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit telah melakukan Upaya untuk mencegah penularan pada populasi rentan tersebut yaitu melalui upaya pengobatan, pencarian kasus tambahan dan penanganan kontak erat, pembatasan penularan , pengambilan sampel bila dibutuhkan dan penyuluhan pada populasi rentan tersebut.

Distribusi jumlah populasi rentan yang berisiko terdampak KLB di Kabupaten / Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.30 Distribusi Populasi Rentan Yang Berisiko Terdampak KLB Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

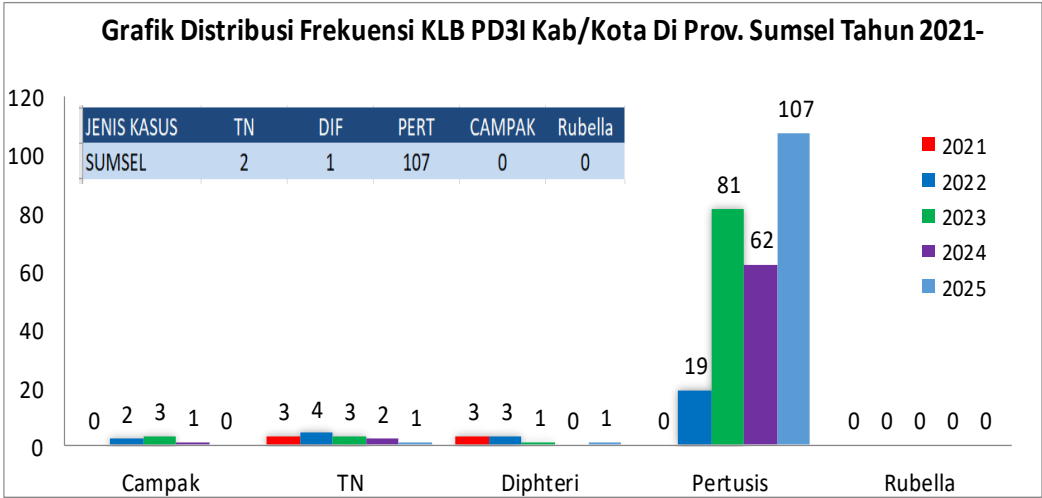


Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi rentan yang berisiko terdampak KLB di kabupaten/kota pada tahun 2025 yang tertinggi adalah di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 21.684 orang, Ogan Ilir sebanyak 19.115 orang, Muara Enim sebanyak 4.080 orang, OKI sebanyak 3.271 orang , Palembang sebanyak 2.840 orang, Muba sebanyak 2.580 orang, Pali sebanyak 2.511 orang , Banyuasin sebanyak 1.345 orang, OKUT sebanyak 460 orang, Muratara sebanyak 200 orang, Lahat sebanyak 68 orang, Prabumulih sebanyak 18 orang. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit telah dilakukan guna mencegah penularan pada populasi rentan tersebut yaitu melalui upaya pengobatan, pembatasan penularan dan penyuluhan pada populasi rentan tersebut.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
29.	Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I	%	86%	94	109%	Sangat Baik

Distribusi KLB yang disebabkan oleh kasus Peyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.31 Distribusi Frekuensi KLB PD3I Kab/Kota di Prov Sumsel Tahun 2021 - 2025



Grafik diatas menunjukkan bahwa jenis KLB PD3I yang terjadi pada tahun 2025 adalah Difteri 1 kali, Pertusis 107 kali dan Tetanus Neonatorum 1 kali. Jumlah kasus KLB PD3I yang terjadi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan

dengan kejadian di tahun 2024 yaitu 65 kali menjadi 109 kali di tahun 2025 dan yang masih tinggi kejadian KLB pada kasus pertusis sebanyak 107 kali.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
30.	Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	%	90	76.47	85	Tinggi

Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan pada tahun 2025 ditargetkan 90% dan terealisasi 76,47 atau sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai dari target yang ditetapkan.

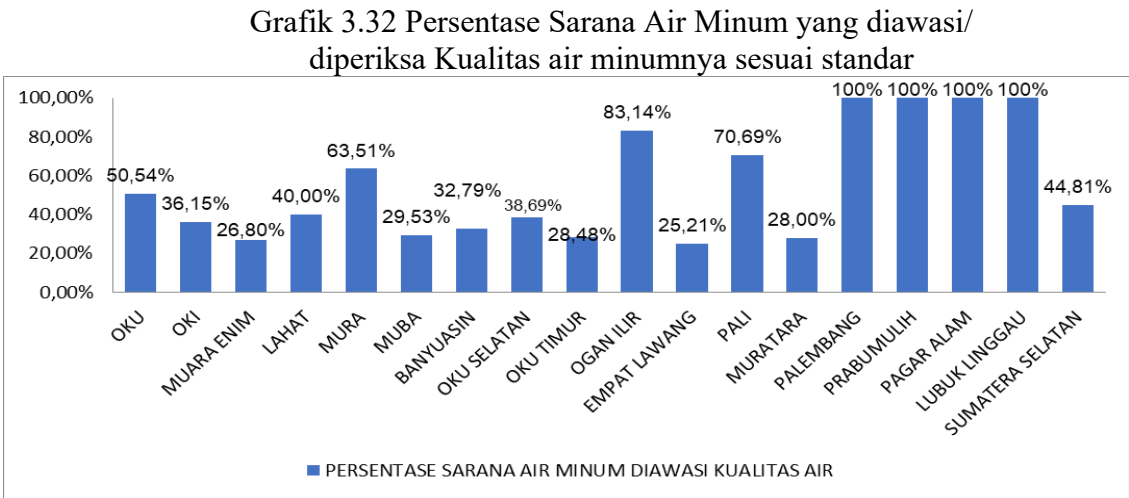
Pada indikator Persentase Kab/Kota yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Setiap tahunnya mengalami kenaikan cakupan data, kenaikannya tidak terlalu drastis namun sangat signifikan, lebih memang potensi yang ada di wilayah kerja menunjang dalam kegiatan program.

Tabel 3.13 Data Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs) Dan Kabupaten Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Tahun 2025

NO	LOKASI/ KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA/KEKURAHAN (KEMENDAGRI)	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH KK (INPUTAN PUSKES)	PILAR 1					% KK BABS TERBUKA	JUMLAH KK SBS	% KK SBS	PILAR 2		% KK CTPS	JUMLAH KK CTPS	PILAR 3		% KK PAMMRT	JUMLAH KK PAMMRT	PILAR 4		% KK PSRT	JUMLAH KK PSRT	PILAR 5		% KK PALDRT	JUMLAH KK PALDRT	% KK AKSES 5 PILAR STBM	% DESA/KEKURAHAN STBM (PILAR 1 +3 PILAR)	% DESA/KEKURAHAN STBM (PILAR 1 +3 PILAR)		
					KK AMAN	KK LAYAK SENDIRI	BERSAMA SAMA (SHARING)	KK BELUM LAYAK/BABS TERTUTUP	KK BABS TERBUKA				KK CTPS	KK TCTPS			KK PAMMRT	KK TPAMMRT			KK PAMMRT	KK PSRT			KK TPSRT	KK PALDRT						KK TPALDRT	
6	SUMATERA SELATAN	3258	1682322	1957289	259256	1315468	101705	152023	61484	33707	1,72%	1828452	93,42%	1278677	97780	1278677	65,33%	1197497	101935	1.197.497	61,18%	900577	353085	900.577	46,01%	832.809	403.341	832.809	42,55%	548415	28,02%	813	24,95%
1	KAB. OGAN KOMERING ULU	157	49496	76607	8000	46474	3023	1628	856	3393	4,43%	59981	78,30%	46146	14779	46146	60,24%	45546	10050	45.546	59,45%	31770	18138	31.770	41,47%	27.860	23.209	27.860	36,37%	11581	15,12%	4	2,55%
2	KAB. OGAN KOMERING ILIR	327	241483	241483	0	195743	2664	38544	37	0	0,00%	236988	98,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	KAB. MUARA ENIM	255	144485	178509	198	159164	11541	2327	1563	233	0,13%	174793	97,92%	177766	0	177766	99,58%	177766	0	177.766	99,58%	95136	83373	95.136	53,29%	0	178.509	0	0,00%	0	0,00%	67	26,27%
4	KAB. LAHAT	378	148611	158601	22371	97941	3392	5579	16140	4272	2,69%	145423	91,69%	98756	14926	98756	62,27%	108039	5802	108.039	68,13%	64299	37545	64.299	40,54%	80.843	17.537	80.843	50,97%	46937	29,59%	115	30,42%
5	KAB. MUSI RAWAS	199	99974	116363	60666	68206	2297	1482	1	260	0,22%	133652	114,86%	118497	0	118497	101,83%	112485	428	112.485	96,67%	104650	12977	104.650	89,93%	102.231	2.429	102.231	87,86%	77673	66,75%	52	26,13%
6	KAB. MUSI BANYUASIN	242	175193	196388	1357	180061	3890	6116	6950	0	0,00%	198374	101,01%	178002	30194	178002	86,72%	169758	25152	169.758	86,44%	149787	56900	149.787	76,27%	133.890	60.785	133.890	68,18%	120912	61,57%	111	45,87%
7	KAB. BANYUASIN	313	27584	248104	0	168534	11361	46586	9913	10397	4,07%	266394	95,28%	232551	4106	232551	93,73%	211351	24123	211.351	85,19%	173037	56798	173.037	69,74%	173.326	65.647	173.326	69,86%	8507	3,49%	126	40,26%
8	KAB. OKU SELATAN	259	102869	102696	53305	25443	19307	1866	1961	802	0,78%	101882	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	KAB. OKU TIMUR	312	11884	194882	0	175729	9030	8490	1633	0	0,00%	194882	100,00%	179730	9672	179730	92,23%	174251	2728	174.251	89,41%	154589	2680	154.589	79,32%	145.642	3.116	145.642	74,73%	182717	93,76%	172	55,13%
10	KAB. OGAN ILIR	241	425600	122256	1096	95570	15501	3813	5022	1254	1,03%	121002	98,97%	117480	4779	117480	96,09%	91069	31265	91.069	74,49%	76183	46148	76.183	62,31%	83.019	39.303	83.019	67,91%	0	0,00%	116	48,13%
11	KAB. EMPAT LAWANG	156	74448	74858	13514	40888	8161	15539	4716	4896	6,54%	82838	110,66%	17050	16019	17050	22,78%	18240	0	18.240	24,37%	1075	5392	1.075	1,44%	8.892	6.751	8.892	11,88%	4678	6,25%	0	0,00%
12	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	71	57727	58300	20580	14797	1852	57	9915	0	0,00%	47201	80,96%	38085	0	38085	65,33%	0	0	0	0,00%	306	0	306	0,52%	306	0	306	0,52%	38085	65,33%	0	0,00%
13	KAB. MUSI RAWAS UTARA	89	0	56957	34478	8191	1695	1695	2760	8500	14,92%	48819	85,71%	0	2760	0	0,00%	8500	0	8.500	14,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	KOTA PALEMBANG	107	45803	63547	25861	11793	881	1273	0	0	0,00%	39798	62,63%	15121	0	15121	23,79%	15121	0	15.121	23,79%	6352	8769	6.352	10,00%	14.563	558	14.563	22,92%	7682	12,09%	5	4,67%
15	KOTA PRABUMUJUH	45	24851	14987	5	14643	432	78	0	0	0,00%	15158	101,14%	14788	199	14788	98,67%	14406	581	14.406	96,12%	13109	1878	13.109	87,47%	12.527	2.456	12.527	83,59%	0	0,00%	10	22,22%
16	KOTA PAGAR ALAM	35	46857	46857	17835	6234	6088	16700	0	0	0,00%	46857	100,00%	46857	0	46857	100,00%	46857	0	46.857	100,00%	27486	19371	27.486	58,66%	46.857	0	46.857	100,00%	46857	100,00%	35	100,00%
17	KOTA LUBUK LINGGAU	72	5447	5894	0	5057	590	230	17	0	0,00%	5894	100,00%	5548	346	5548	94,13%	4088	1806	4.088	69,36%	2798	3096	2.798	47,47%	2.853	3.041	2.853	40,41%	2786	47,27%	0	0,00%

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
31.	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	%	80	35,29	44,11	Sangat Rendah

Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat pada tahun 2025 ditargetkan 80% dan terealisasi 35,29 atau sebesar 44,11%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai dari target yang ditetapkan.



Dari Grafik diatas di tahun 2025 sebanyak 1.620 jumlah sarana air minum jaringan perpipaan yang ada di kabupaten/kota diwilayah kerja provinsi Sumatera Selatan dan sebanyak 726 sarana air minum yang sudah diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (Aman) dengan hasil capaian 44,81 %. Berdasarkan Indikator Kinerja Kerja Kabupaten.Kota dengan Kualitas Air Minum 70% pada Kualitas Air Minum Memenuhi Syarat ada 6 Kabupaten /Kota yang sudah mencapai target tesebut yaitu Kota Palembang (100%), Pagar Alam (100%), Lubuk Linggau (100%), Prabumulih (100%), Ogan Ilir (83,14)dan PALI (70,69). Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan capaian terrendah yaitu kabupaten Empat lawang dengan capaian 25,21%.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Minimnya dana untuk kegiatan Pengawas Kualitas Minum (PKAM) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota terutama untuk pengadaan reagian sankit dan anggaran transpotasi turun lapangan bagi petugas sanitarian puskesmas.

2. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kegiatan penyediaan air minum aman bagi Masyarakat
3. Kurangnya peran serta masyarkat dalam menciptakan sarana air minum yang aman dan memenuhi syarat kesehatan
4. Kurangnya tenaga sanitarian dan peralatan laburatorium di Tingkat puskesmas
5. Kurangnya pemahaman petugas sanitarian tentang pengawasan kualitas air minum terutama untuk kegiatan surveilans Kualitas Air minum baik pelaksanaan dilapangan maupun penginputan data dalam aplikasi E-Monev

Tabel 3.14 Jumlah Klinik Pratama dan PMD Berjejaring yang Melaksanakan dan Melaporkan Program Prioritas yang Terdata dalam Dashboard Kemkes
<https://s.kemkes.go.id/DashboardIKK16.2.2>
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

NO	KAB./KOTA	Jumlah Klinik Teregistrasi Per Desember 2025	Jumlah Praktik Mandiri Dokter Teregistrasi Per Desember 2025	Total Jumlah Klinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter Teregistrasi	Jumlah Klinik Pratama dan PMD berjejaring yg melaksanakan dan melaporkan prog prioritas				Persentase kab./kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas (>20%)
					Tarikan data Per tgl 11 November 2025	Tarikan Data Per tgl 03 Desember 2025	Tarikan Data Per tgl 31 Desember 2025	Tarikan Data Per tgl 08 Januari 2026	
1	Ogan Komering Ulu	15	42	57	14	14	14	14	24,56
2	Ogan Komering Ilir	33	20	53	1	7	9	9	16,98
3	Muara Enim	31	33	64	10	18	23	23	35,94
4	Lahat	13	18	31	2	3	14	14	45,16
5	Musi Rawas	18	39	57	3	10	10	10	17,54
6	Musi Banyuasin	33	48	81	17	18	26	26	32,10
7	Banyuasin	43	24	67	0	4	13	13	19,40
8	OKUS	7	9	16	4	6	7	7	43,75
9	OKUT	39	47	86	12	12	12	12	13,95
10	Ogan Ilir	13	17	30	9	11	12	12	40,00
11	Empat Lawang	7	13	20	0	3	3	3	15,00
12	PALI	3	20	23	8	8	8	8	34,78
13	Musi Rawas Utara	3	9	12	0	2	2	2	16,67
14	Palembang	267	170	437	0	0	18	36	8,24
15	Prabumulih	20	45	65	22	38	37	37	56,92
16	Pagar Alam	22	6	28	4	4	4	4	14,29
17	Lubuk Linggau	23	39	62	6	6	6	6	9,68
	TOTAL	590	599	1189	112	164	218	236	19,85 47,06

PKAM

6. Tidak adanya spot dana dari dana APBD kabupaten/Kota untuk pemeriksaan dan pengawasan kualitas air minum di tingkat puskesmas

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
32.	Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	%	20	8	47	Sangat Baik

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Pengampu program Klinik dan PMD di Dinkes Kab/Kota berbeda-beda seksi dan bidang, sehingga waktu koordinasi lebih panjang
- b. Pemetaan/mapping data Klinik Pratama dan Praktik Mandiri Dokter (PMD) teregistrasi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dan Puskesmas belum dilakukan dengan aktif.
- c. Klinik Pratama dan PMD ke Puskesmas
- d. Masih kurangnya klinik pratama dan Praktik Mandiri Dokter yang bersedia bekerja sama dengan Puskesmas dalam melaporkan capaian hasil pelayanan (skrining dan tata laksana) untuk penguatan pelayanan program prioritas.
- e. Kemkes menyiapkan link untuk diisi langsung oleh Klinik dan PMD, sedangkan Dinkes Prov. dan Kab/Kota hanya dapat melihat data yang tampil di dashboard

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
33.	Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	%	94	94	100%	Sangat Baik

Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN pada tahun 2025 ditargetkan 94% dan terealisasi 94% atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.15 Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN

NO	Kota/Kabupaten	Penduduk Nasional	Jumlah Peserta	Pencapaian UHC	Tingkat Keaktifan
1	KAB. BANYUASIN	896.192	898.471	100,25%	80,41%
2	KAB. EMPAT LAWANG	337.578	293.274	86,88%	62,03%
3	KAB. LAHAT	449.951	461.177	102,49%	93,84%
4	KAB. MUARA ENIM	660.533	684.279	103,59%	89,59%
5	KAB. MUSI BANYUASIN	746.735	737.750	98,80%	78,72%
6	KAB. MUSI RAWAS	429.670	433.905	100,99%	82,68%
7	KAB. MUSI RAWAS UTARA	205.366	210.724	102,61%	92,31%
8	KAB. OGAN ILIR	449.215	443.794	98,79%	76,05%
9	KAB. OGAN KOMERING ILIR	809.627	812.728	100,38%	81,22%
10	KAB. OGAN KOMERING ULU	392.649	391.727	99,77%	83,99%
11	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	408.280	404.018	98,96%	75,18%
12	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	700.327	693.007	98,95%	79,38%
13	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	216.100	223.338	103,35%	94,25%
14	KOTA LUBUKLINGGAU	249.573	254.268	101,88%	84,16%
15	KOTA PAGAR ALAM	153.984	151.484	98,38%	78,47%
16	KOTA PALEMBANG	1.814.716	1.861.570	102,58%	89,93%
17	KOTA PRABUMULIH	214.821	214.196	99,71%	86,21%
Grand Total		9.135.317	9.169.710	100,38%	83,41%

Dari tabel diatas Terdapat 16 Kab/Kota yang mencapai tingkat keaktifan lebih dari 75%. Keaktifan sudah tinggi, tetapi masih terdapat potensi risiko pada segmen PBPU dan peserta dengan kepatuhan iuran rendah.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
34.	Persentase Kab/ Kota yang memilik Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	%	50	11.76%	23,52	Sangat Rendah

Persentase Kab/ Kota yang memilik Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik pada tahun 2025 ditargetkan 50% dan terealisasi 11,76% atau sebesar 23,52%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian jauh dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang terjadi antara lain :

- a. Minimnya Anggaran Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- b. Sering pergantian pengelola program,baik di Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun di Puskesmas
- c. Pemahaman pengelola program terhadap indikator dan definisi operasional belum maksimal
- d. Adanya pergantian sistem Aplikasi pelaporan,semula SITKO menjadi Microsite
- e. Belum semua Kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi tentang Aplikasi Microsite
- f. Aplikasi Microsite masih sering Maintenance sehingga input laporan dari Puskesmas dan Kab/Kota menjadi tidak maksimal

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
35.	Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	%	42	37.5	89	Tinggi

Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 42% dan terealisasi 37,5% atau sebesar 89 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.16 Capaian Unit Transfusi Darah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar

NO	Kab/Kota	Jumlah UTD PMI	SPA Standar	Persentase
1	Kab. Ogan Komering Ulu	1	0	0
2	Kab. Muara Enim	1	1	100
3	Kab. Lahat	1	0	0
4	Kab. Musi Banyuasin	1	1	100
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	1	0	0
6	Kota Palembang	2	1	50
7	Kota Lubuk Linggau	1	0	0
Jumlah		8	3	37.5

Dari tabel di atas Jumlah UTD milik Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan 8 Unit, Jumlah UTD milik Pemerintah dengan SPA minimal 60 % sesuai standar 3 unit (37,5%) yaitu UTD PMI Kabupaten Muara Enim, UTD PMI Kabupaten Musi Banyuasin dan UDD PMI Kota Palembang. sedangkan UTD PMI milik Pemerintah dengan SPA kurang dari 60 % belum standar yaitu UTD PMI Kabupaten OKU, UTD PMI Kabupaten Lahat, dan UTD Prov. Sumsel sedang 2 UTD belum menginput data SPA di Aplikasi ASPAK yaitu UTD PMI Kabupaten PALI dan UTD Kota Lubuk Linggau.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
36.	Persentase Lanjut Usia Mandiri	%	75	791.557	94,61	Sangat Baik

Merupakan Persentase lansia 60 tahun atau lebih yang masih mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain . Target RJMD yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 100%.

Berikut dapat kita lihat diagram distribusi puskesmas santun lansia dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.33
Persentase Lanjut Usia Mandiri Tahun 2025

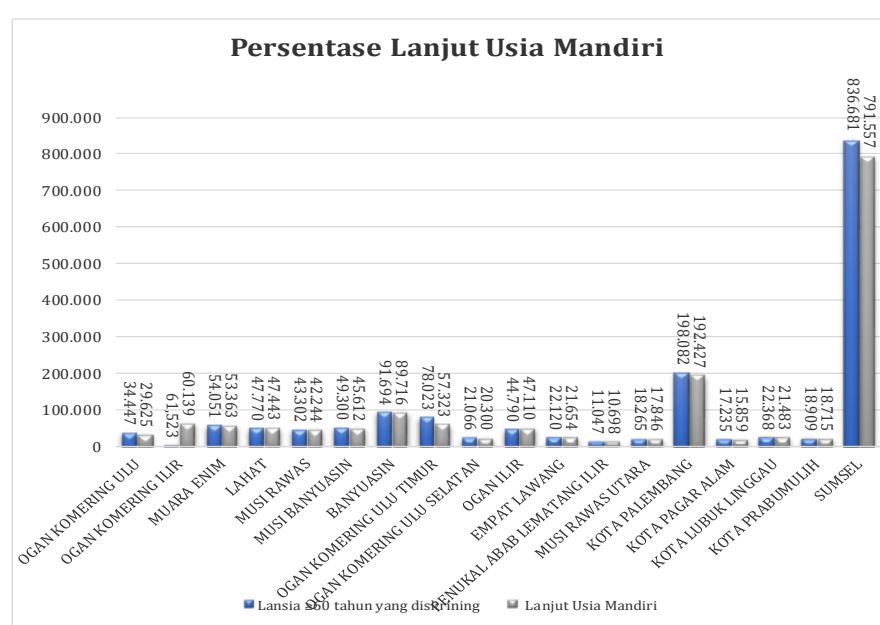


Diagram di atas memperlihatkan bahwa dari 836.681 lansia yang di skrining didapatkan sebanyak 791.557 lansia mandiri dengan persentase sebesar 94,61%. Hal ini menunjukkan capaian Provinsi untuk indikator Persentase Lanjut Usia Mandiri tahun 2025 dengan target RPJMD 77% telah tercapai. Untuk Capaian Semua Kabupaten Kota rata-rata sudah mencapai target yaitu di atas 77%, hanya 1 Kabupaten yang capaiannya masih di bawah target yaitu Kabupaten OKU Timur (Absolut 57.323 (73,47%)). Hal ini di karenakan perbedaan sasaran antara Provinsi dengan sasaran Kabupaten OKU Timur sehingga jika menggunakan sasaran Kabupaten OKU Timur indikator lanjut usia mandiri di Kabupaten OKU Timur sudah tercapai, sedangkan Provinsi mengikuti Pusat menggunakan sasaran sesuai KMK.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
37.	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	%	47,06	17	100%	Sangat Baik

Merupakan Pasangan usia subur yang mulai menggunakan alat kontrasepsi segera setelah melahirkan (0-42 pasca melahirkan) dengan semua metode modern

Berikut dapat kita lihat diagram Kab/Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.34 Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan KB Pasca Persalinan Tahun 2025

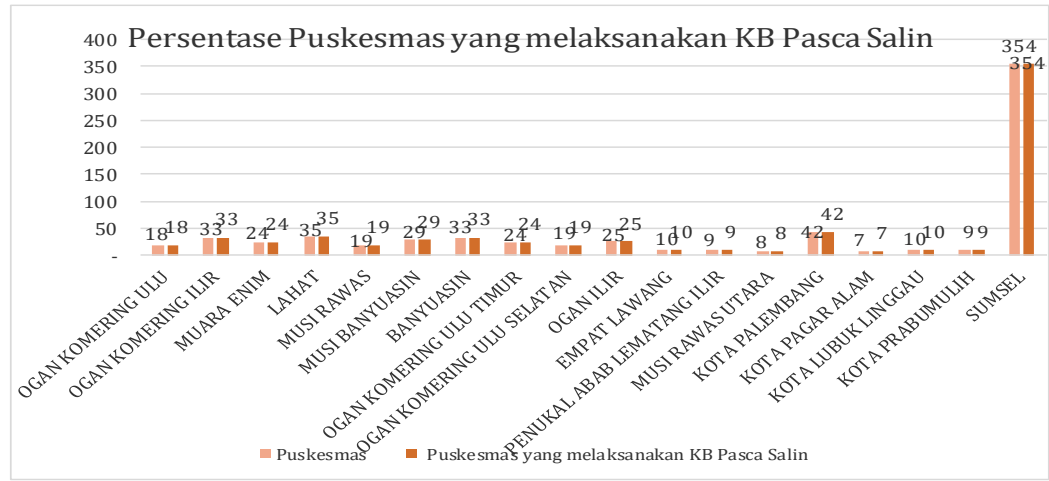


Diagram di atas memperlihatkan capaian Provinsi untuk indikator Kabupaten Kota yang melaksanakan KB Pasca Salin tahun 2025 sebesar 100%, hal ini menunjukkan untuk target RPJMD yaitu 47,06% telah tercapai. Namun jika dilihat dari segi kualitasnya belum semua ibu bersalin di kabupaten Kota menggunakan kontrasepsi (64,54%). Untuk kabupaten Kota dengan capaian masih di bawah 50% antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir (Absolut 3.155 (48,13%)), Kabupaten OKU Selatan (Absolut 1.508 (25,70%)), Kabupaten Ogan Ilir (Absolut 2.480 (40,92%)), dan Kota Palembang (Absolut 13.322 (47,99%)).

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
38.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	%	45	12	70,6	Tinggi

Merupakan Persentase Remaja putri SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang mengkonsumsi tamblet tambah darah (TTD) Sebanyak 1 Tablet setiap minggu (Total

minimal 26 tablet dalam 1 tahun) disuatu wilayah pada kurun waktu tertu . Target RJMD yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 45 %.

Berikut dapat kita lihat diagram distribusi pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri Remaja Putri dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.35
Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Pemantauan Konsumsi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Tahun 2025

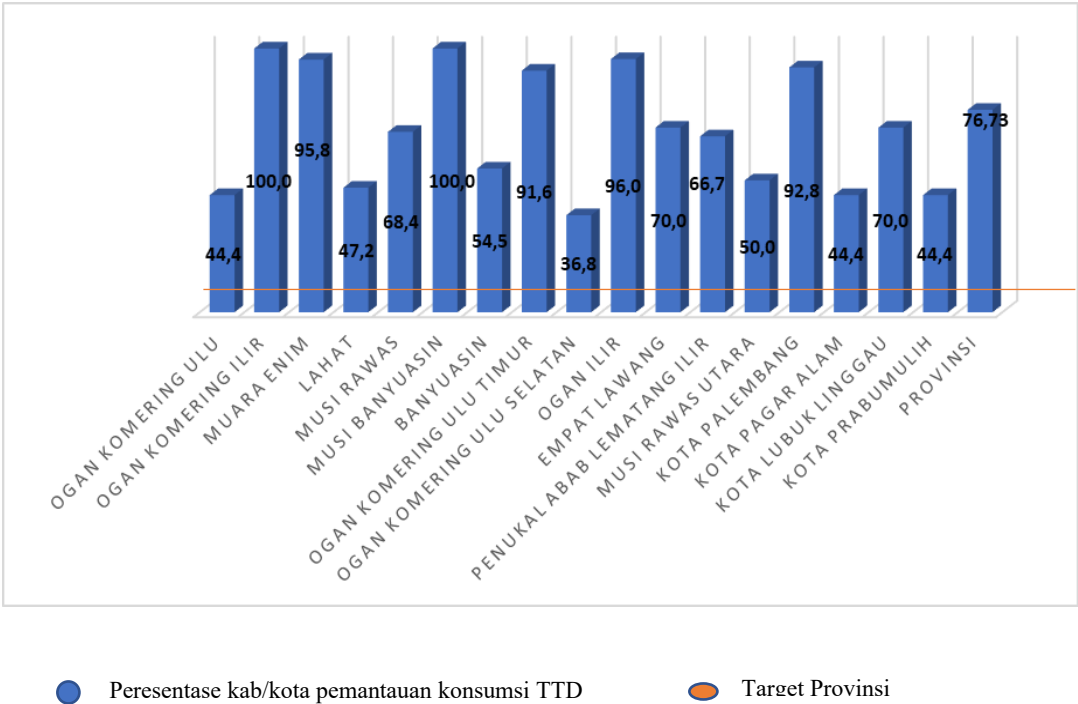


Diagram diatas memperlihatkan capaian kab/kota yang melaksanakan pemantauan konsumsi TTD tahun 2025 sebesar 70,6% (absolut sebanyak 12 kab/kota). Target RPJMD provinsi sumatera selatan yaitu 45%, Hal ini menunjukkan bahwa pada indicator ini telah mencapai target RPJMD yang ditetapkan. Adapun kab/kota yang dimaksud yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 94,43% (absolut sebanyak 33 puskesmas), Kabupaten Muara Enim sebesar 95,73% (absolut sebanyak 23 puskesmas), Kabupaten Lahat sebesar 47,22% (absolut sebanyak 17 puskesmas), Kabupaten Musi Rawas sebesar 68,42% (absolut sebanyak 13 puskesmas), Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100% (absolut sebanyak 29 puskesmas), Kabupaten Banyuasin sebesar 54,55% (absolut sebanyak 18 puskesmas) Kabupaten OKU Timur sebesar 91,67% (absolut sebanyak 22 pusksmas), Kabupaten Ogan Ilir sebesar 96% (absolut sebanyak 24 puskesmas), Kabupaten Empat Lawang

sebesar 70% (absolut sebanyak 7 puskesmas), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 66,67% (absolut sebanyak 6 puskesmas), Musi Rawas Utara sebesar 50% (absolut sebanyak 4 puskesmas), Kota Palembang sebesar 92,86% (absolut sebanyak 39 puskesmas), dan Kota Lubuk Linggau sebesar 70% (absolut sebanyak 7 puskesmas). Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target pada indikator RPJMD (persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan konsumsi TTD pada remaja putri) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sebesar 44,44%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) sebesar 36,84%, Kota Pagaralam sebesar 44,44% dan Kota Prabumulih sebesar 44,44%.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
39.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	%	47,06	17	100%	Sangat Baik

Merupakan Persentase calon pengantin (laki-laki dan perempuan) yang mendapat skrining kesehatan/pemeriksaan kesehatan calon pengantin sesuai standar.

Berikut dapat kita lihat diagram Kab/Kota yang melaksanakan skrining Kesehatan pada calon pengantin dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.36

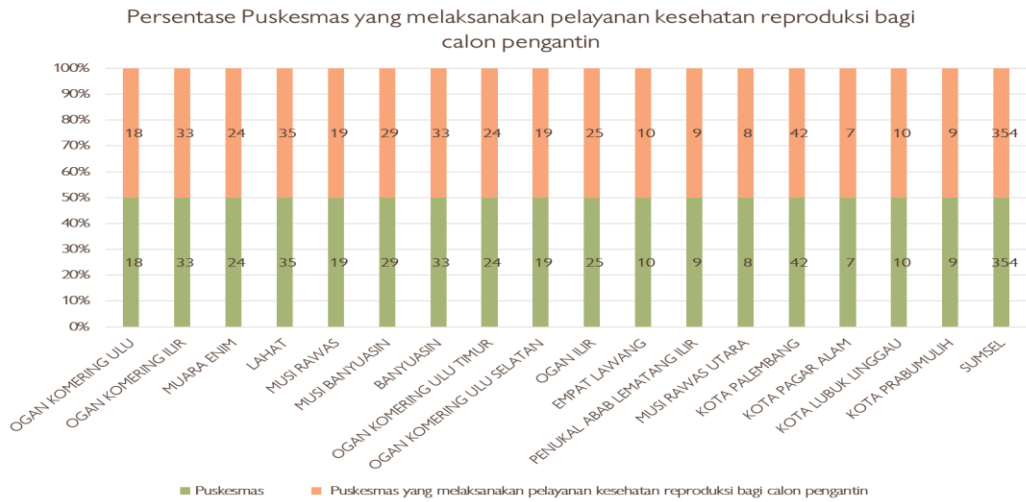


Diagram di atas memperlihatkan capaian Provinsi untuk indikator Kabupaten Kota yang melaksanakan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin tahun 2025 sebesar 100%, hal ini menunjukkan untuk target RPJMD yaitu 47,06% telah tercapai. Namun jika dilihat dari segi kualitasnya belum semua calon pengantin di Kabupaten Kota memeriksakan kesehatannya (38,25%). Untuk Kabupaten Kota yang sudah 100

% calon pengantin mendapatkan pelayanan antara lain Kabupaten Lahat (Absolut 5.574) dan Kabupaten OKU Selatan (Absolut 1.422). Untuk kabupaten Kota dengan capaian masih di bawah 50% antara lain Kabupaten Musi Banyuasin (Absolut 904 (10,40%)) dan Ogan Ilir (Absolut 2.311

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
40.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	%	75	17	94,12%	Sangat Baik

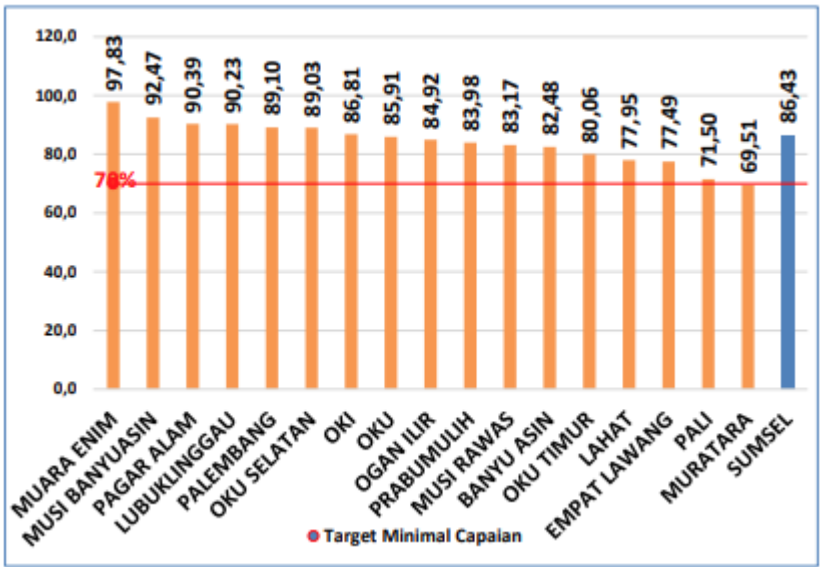
Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan pada tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi 17 Kab/Kota atau sebesar 94,12%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.17
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemberian Suplementasi Vitamin A pada usia 6-59 bulan
Provinsi Smatera Selatan Tahun 2025

Provinsi	Target Indikator	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi
SUMSEL	75,0%	16	17	94,12%

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah agar perencanaan kebutuhan vitamin A disesuaikan dengan sasaran dan menyesuaikan dengan persediaan di gudang farmasi setempat serta sudah dilakukan sweeping untuk meningkatkan cakupan.

Grafik 3.37
Pemberian Suplementasi Vitamin A pada usia 6-59 bulan
Provinsi Smatera Selatan Tahun 2025



Berdasarkan data pada aplikasi web SIGIZI KESGA Tahun 2025, Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 86,43%. Hal ini menunjukkan bahwasannya capaian tersebut sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni 70%. Kabupaten Kota dengan capaian pemberian Vitamin A tertinggi yaitu Kabupaten Muaraenim sebesar 98,37% atau sebanyak 40195 balita dan Kabupaten Kota dengan capaian pemberian Vitamin A terendah yaitu Kabupaten Musi Rawas sebesar 69,51% atau sebanyak 9505 Balita.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
41.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	%	75	8	47,06%	Sangat Rendah

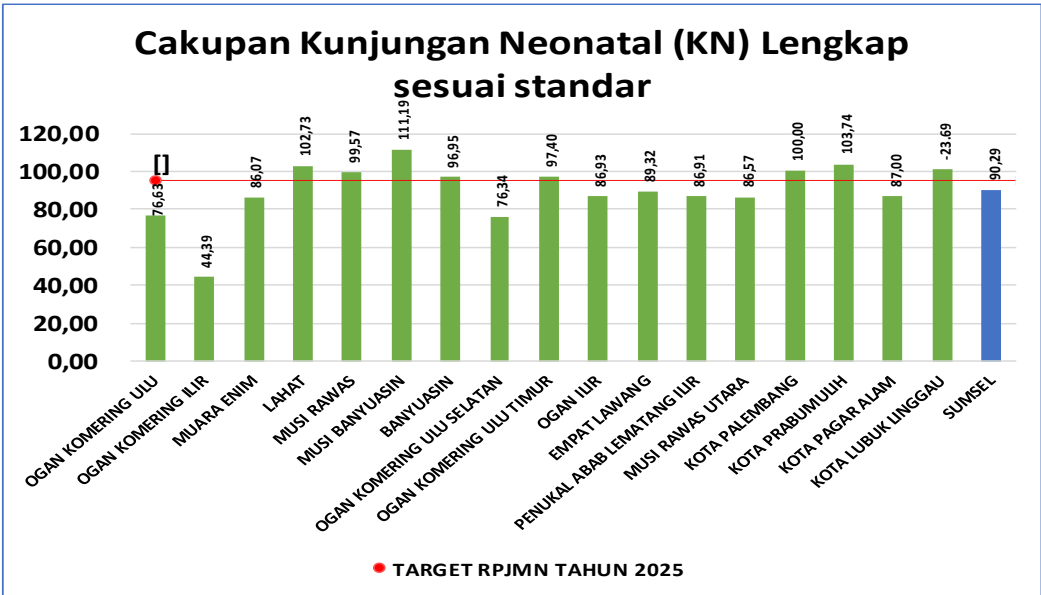
Merupakan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirkan pada wilayah dan kurun waktu yang tertentu.

Standar kunjungan neonatal meliputi:

- Pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
- Perawatan metode Kangguru (PMK) untuk bayi BBLR

Berikut dapat kita lihat diagram Kab/Kota yang melaksanakan kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar dimasing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut:

Grafik 3.38
Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar Tahun 2025



Dari grafik diatas memperlihatkan capaian persentase kab/kota yang melaksanakan kunjungan neonatal (KN) Lengkap sesuai standar sebesar 90,29 % dengan absolute 129.896.

Dari 17 Kabupaten/Kota terapat 8 kabupaten/kota yang telah mencapai target minimal capaian 95 %.

Masih ada 9 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target. Persentase Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar Tahun 2025 sebesar 47,06 % belum mencapai target RPJMD yaitu 75 %.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
42.	Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	%	10	3	51,82%	Sangat Baik

Tabel 3.18
Cakupan Anak Usia 6-23 Bulan mendapat MPASI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Rerata jumlah anak usia 6-23 bulan	Rerata jumlah anak usia 6-23 bulan yang diwawancarai	Persentase anak usia 6-23 bulan yang diwawancarai
1	OKU	4278	1817	42,47
2	OKI	10875	7349	67,58
3	MUARA ENIM	12168	10884	89,45
4	LAHAT	5147	718	13,95
5	MUSI RAWAS	6986	3422	48,98
6	MUSI BANYUASIN	12834	11722	91,34
7	BANYU ASIN	8558	3326	38,86
8	OKU SELATAN	3248	549	16,90
9	OKU TIMUR	6481	1522	23,48
10	OGAN ILIR	6843	5438	79,47
11	EMPAT LAWANG	2603	1421	54,59
12	PALI	3018	926	30,68
13	MURATARA	3782	1690	44,69
14	PALEMBANG	28089	6291	22,40
15	PRABUMULIH	2577	1871	72,60
16	PAGAR ALAM	2222	1295	58,28
17	LUBUKLINGGAU	5289	4539	85,82
	SUMSEL	124998	64780	51,82

Sumber: Sigit Kesga, 15 Februari 2026

Tabel 3.19
Persentase Kab/Kota yang melakukan pemantauan praktik MPASI pada anak usia 6-23 bulan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Provinsi	Target Indikator	Jumlah Kab/Kota	Jumlah kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan
SUMSEL	10,0%	17	3	17,65%

Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan pada tahun 2025 ditargetkan 10% dan terealisasi 3 Kab/Kota atau sebesar 17,65%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan data diatas Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemantauan praktik MPASI pad anak usia 6-23 bulan hanya 3 kabupaten/kota. Rendahnya capaian disebabkan karena belum semua balita dilakukan wawancara MPASI, walaupun sudah dilakukan wawancara TPG lupa untuk menginput datanya,

serta tidak semua puskesmas melakukan pelatihan untuk kader posyandu recall Pratik pemantauan MP Asi sehingga banyak kader yang belum paham mengenai recall tersebut. Menurut definisi operasional cara perhitungan Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan adalah (Jumlah Kab/Kota Yang melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan dibagi jumlah seluruh Kab/Kota) x 100%

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota via zoom dan mengan pertemuan workshop pemberian MPASI dan PMT lokal di ibu kota provinsi dengan mengundang PJ Program Gizi Dinas Kesehatan Kab/Kota.pemberian MPASI dan PMT.

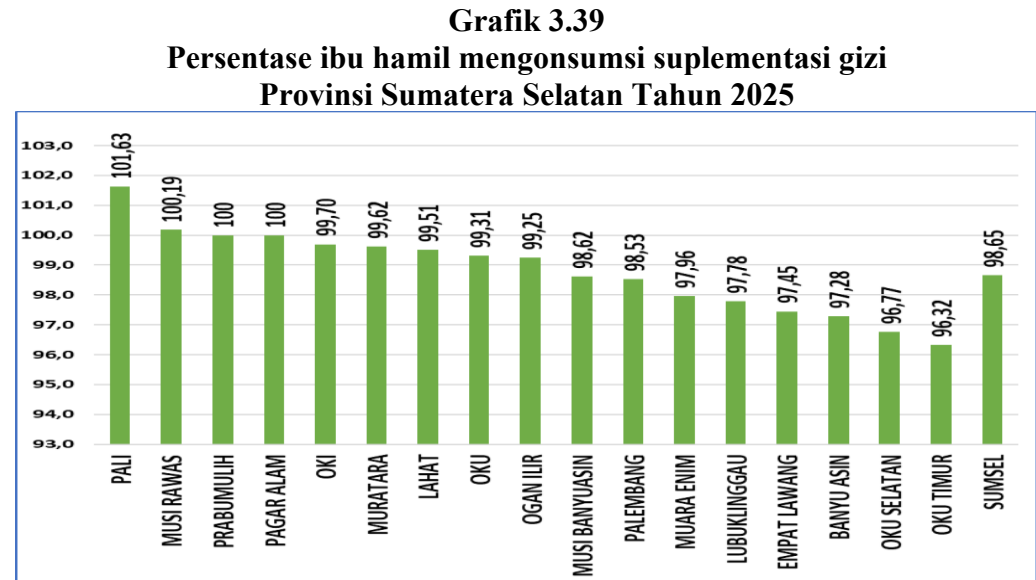
Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
43.	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	%	60	17	100%	Sangat Baik

Persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil pada tahun 2025 ditargetkan 60% dan terealisasi 17 Kab/Kota atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.20
Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah ibu hamil mendapat suplementasi gizi sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi minimal 180 tablet MMS sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi minimal 180 tablet TTD sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi sampai bulan ini	Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi
1	OKU	4072	289	3755	4044	99,31
2	OKI	7917	320	7573	7893	99,70
3	MUARA ENIM	7704	1153	6394	7547	97,96
4	LAHAT	3245	0	3229	3229	99,51
5	MUSI RAWAS	4861	384	4486	4870	100,19
6	MUSI BANYUASIN	9664	51	9480	9531	98,62
7	BANYU ASIN	4187	226	3847	4073	97,28
8	OKU SELATAN	3339	76	3155	3231	96,77

No	Kabupaten/Kota	Jumlah ibu hamil mendapat suplementasi gizi sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi minimal 180 tablet MMS sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi minimal 180 tablet TTD sampai bulan ini	Jumlah ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi sampai bulan ini	Persentase ibu hamil mengonsumsi suplementasi gizi
9	OKU TIMUR	6685	1174	5265	6439	96,32
10	OGAN ILIR	6136	0	6090	6090	99,25
11	EMPAT LAWANG	2392	156	2175	2331	97,45
12	PALI	2088	93	2029	2122	101,63
13	MURATARA	3391	65	3313	3378	99,62
14	PALEMBANG	25022	0	24653	24653	98,53
15	PRABUMULIH	3563	0	3563	3563	100
16	PAGAR ALAM	2071	283	1788	2071	100
17	LUBUKLINGGAU	3111	48	2994	3042	97,78
	SUMSEL	99448	4318	93789	98107	98,65



Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Penugatan pada ANC, Penguatan pada kelas ibu hamil dengan membuat WA grup yang dipantau oleh bidan desa serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian TTD dan Sosialisasi MMS ke Kab/Kota.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
44.	Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	Kab/Kota	10	10	100	Sangat Baik

Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat pada tahun 2025 ditargetkan 10 Kab/Kota dan terealisasi 10 Kab/Kota atau sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Sumatera Selatan tahun 2025 target dan capaiannya adalah 10 Kabupaten/Kota terdiri dari Kabupaten OKU, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten MUBA, Kabupaten OKUS, Kabupaten OKUT, Kabupaten PALI, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih.

Tabel 3.21

NO	Kab / Kota	Indikator					
		SK Tim Pembina	Rencana Kerja	SK Forum	Rencana Kerja	9 tatanan	Hasil Verif. Prov
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Palembang	√	√	√	√	√	√
2.	Prabumulih	√	√	√	√	√	√
3.	Pagar Alam						
4.	Lubuk Linggau	√	√	√	√	√	√
5.	Muara Enim	√	√	√	√	√	√
6.	Lahat						
7.	Empat Lawang						
8.	Banyuasin						
9.	Musi Banyuasin	√	√	√	√	√	√
10.	Musi Rawas	√	√	√	√	√	√
11.	Muratara						
12.	Ogan Komering Ulu	√	√	√	√	√	√
13.	Ogan Komering Ulu Timur	√	√	√	√	√	√
14.	Ogan Komering Ulu Selatan	√	√	√	√	√	√
15.	Penukal Abab Lematang Ilir	√	√	√	√	√	√
16.	Ogan Ilir						
17.	Ogan Komering Ilir						

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
45.	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	%	30	0	0	Sangat Rendah

Permasalahan yang di hadapi antara lain :

- SOTK Kemkes belum diadopsi Dinkes Prov dan Kab/Kota, sehingga waktu koordinasi lebih panjang

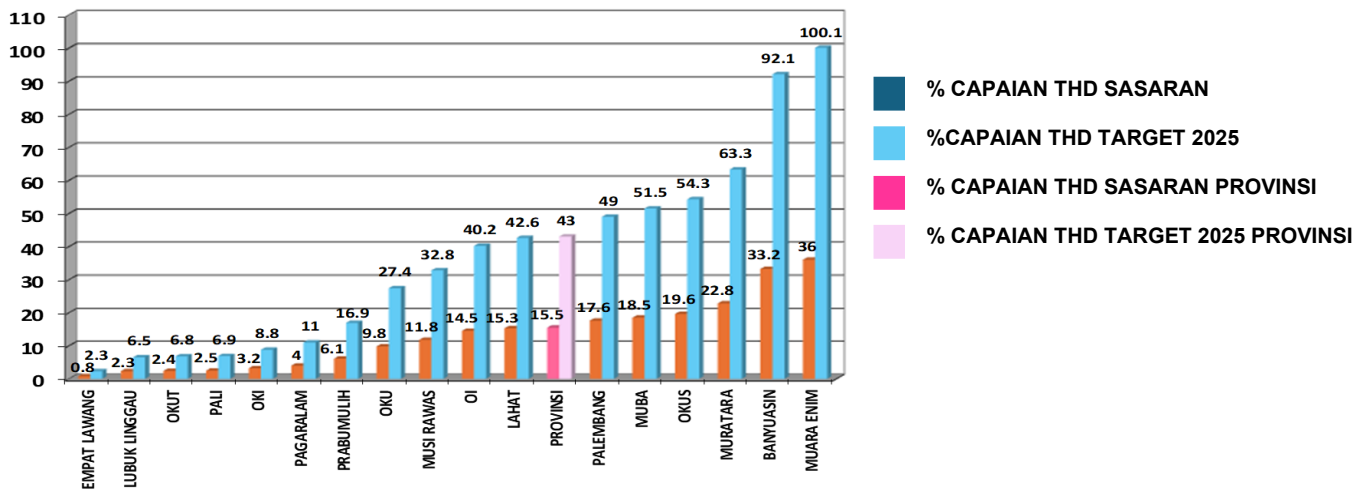
- Belum dipahaminya dengan baik PKG sebagai kegiatan baru dalam tatakelola Puskesmas yang juga baru (Integrasi Layanan Primer), termasuk dalam menentukan penanggung jawab komponen kegiatan (skrining, pencatatan pelaporan, dll)
- Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PKG secara umum
- Belum menerapkan skrining PKG secara lengkap
- Varibel indikator sangat variatif yang melibatkan lintas program di Kemkes
- Aplikasi ASIK sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan PKG sering *maintenance*
- Aplikasi ASIK belum terintegrasi dengan skrining BPJS dan RME Puskesmas
- Data manual belum mencatat semua peserta PKG
- Identitas peserta PKG tidak sesuai (NIK, nama dll) sehingga terkendala dalam input data
- Keterbatasan SDM Puskesmas memberikan pelayanan dalam dan luar gedung
- Partisipasi masyarakat masih rendah terkait dengan kurangnya promosi/sosialisasi ke masyarakat
- Keterbatasan sarpras, alkes serta BMHP sesuai standar
- Belum memanfaatkan seluruh potensi pembiayaan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
46.	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	%	30	0	0	Sangat Rendah

Tabel 3.22 Persentase Kab./Kota Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Pkg) Pada Kelompok Usia Dewasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PKM	SASARAN PKG TAHUN 2025 BERDASARKAN KMK HK.01.07/MENKES/140/2024		CAKUPAN		
			TOTAL PENDUDUK	36% TOTAL PENDUDUK (TARGET 2025)	CAPAIAN	% CAPAIAN THD SASARAN	% CAPAIAN THD TARGET 2025
1	1601 - KAB OKU	18	225.277	81.1	22.181	9,8	27,4
2	1602 - KAB OKI	33	492.103	177.157	15.641	3,2	8,8
3	1603 - KAB MUARA ENIM	24	379.507	136.623	136.699	36,0	100,1
4	1604 - KAB LAHAT	35	268.341	96.603	41.133	15,3	42,6
5	1605 - KAB MURA	19	246.417	88.71	29.138	11,8	32,8
6	1606 - KAB MUBA	29	386.079	138.988	71.606	18,5	51,5
7	1607 - KAB BANYUASIN	33	537.188	193.388	178.137	33,2	92,1
8	1608 - KAB OKUT	24	402.96	145.066	9.823	2,4	6,8
9	1609 - KAB OKUS	19	266.595	95.974	52.132	19,6	54,3
10	1610 - KAB OGAN ILIR	25	257.059	92.541	37.167	14,5	40,2
11	1611 - KAB EMPAT LAWANG	10	218.667	78.72	1.805	0,8	2,3
12	1612 - KAB PALI	9	120.812	43.492	3.019	2,5	6,9
13	1613 - KAB MURATARA	8	118.927	42.814	27.085	22,8	63,3
14	1671 - KOTA PALEMBANG	42	1.009.906	363.566	178.192	17,6	49,0
15	1672 - KOTA PAGARALAM	7	88.077	31.708	3.495	4,0	11,0
16	1673 - KOTA LUBUK LINGGAU	10	146.585	52.771	3.431	2,3	6,5
17	1674 - KOTA PRABUMULIH	9	119.986	43.195	7.295	6,1	16,9
16 - PROV SUMSEL		354	5.284.486	1.902.415	817.979	15,5	43,0

Grafik 3.40 PERSENTASE KAB./KOTA DENGAN CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG) >80% PADA KELOMPOK USIA DEWASA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

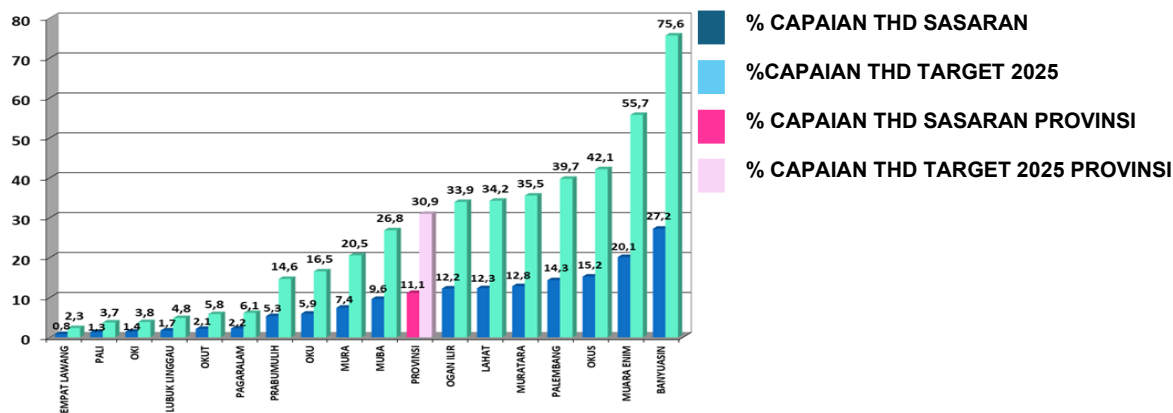


Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
47.	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	%	30	0	0	Sangat Rendah

Dari tabel dan grafik capaian PKG tersebut, terlihat bahwa capaian PKG Sumsel untuk kelompok usia dewasa adalah 15,5% dari jumlah penduduk dan 43% dari target tahun 2025 (yaitu 36% jumlah penduduk). Untuk selanjutnya dibuat interpretasi dalam menghitung/menentukan Kab/Kota mana yang memenuhi target. Data interpretasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 di bawah ini. Dari

Tabel 8 dan Tabel 9, terlihat bahwa Kab. Muara Enim memiliki capaian terbesar. Walaupun terhadap target 2025 yaitu 36% penduduk usia dewasa telah PKG Kab. Muara Enim mencapai target dengan capaian 100,1% namun dengan capaian 36% terhadap jumlah penduduk tidak mencapai target sebagai Kab/Kota > 80% penduduk usia dewasa telah PKG. Adapun capaian terendah yaitu Kab. Empat Lawang sebesar 0,8% terhadap jumlah penduduk dewasa dan 2,3% terhadap target tahun 2025 (yaitu 36% jumlah penduduk dewasa).

Grafik 3.41 Persentase Kab./Kota Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Pkg) Gratis >80% Pada Kelompok Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Dari tabel dan grafik capaian PKG tersebut, terlihat bahwa capaian PKG Sumsel untuk kelompok lanjut usia adalah 11,1% dari jumlah penduduk dan 30,9% dari target tahun 2025 (yaitu 36% jumlah penduduk). Untuk selanjutnya dibuat interpretasi dalam menghitung/menentukan Kab/Kota mana yang memenuhi target. Data interpretasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12 di bawah ini. Dari Tabel 11 dan Tabel 12, terlihat bahwa tidak ada Kab/Kota yang mencapai target terhadap jumlah penduduk usia lanjut. Adapun capaian terhadap target tahun 2025 (yaitu 36% jumlah penduduk usia lanjut), ada 4 Kab/Kota memiliki capaian terbesar : Kab. Banyuasin (75,6%), Kab. Muara Enim (55,7%), Kab. OKU Selatan (42,1%) dan Kota Palembang (39,7%). Akan tetapi capaian 4 Kab/Kota tersebut tidak ada yang >80%.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
48.	Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	%	60	10	58,8	Rendah

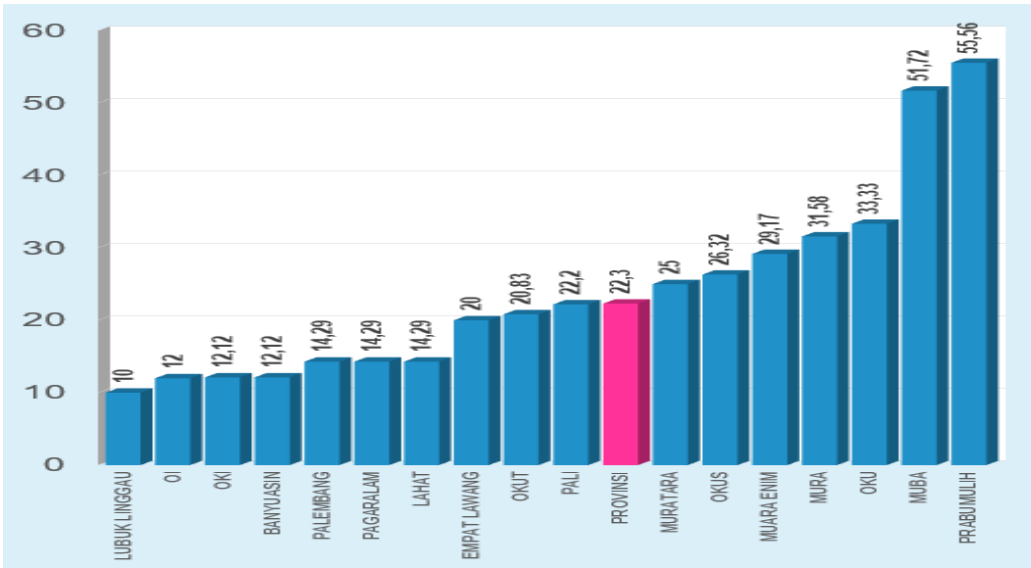
Permasalahan yang di hadapi :

- Keterbatasan SDM terlatih kesehatan tradisional
- Kesehatan tradisional tidak menjadi program prioritas sehingga kurangnya dukungan dalam banyak hal (SDM, dana/anggaran sarpras dan peningkatan kapasitas, pemanfaatan dan pembinaan kestrad)
- Regulasi Kesehatan Tradisional banyak yang dalam proses revisi sehingga kurang optimal dalam pembinaan, sosialisasi dan edukasi massif
- Belum adanya Surat Edaran dan Surat Keputusan tentang pelaksanaan program kesehatan tradisional di fasyankes.
- Belum ada standarisasi mutu kesehatan tradisional di fasyankes dan penyehat tradisional
- Keterbatasan bibit tanaman obat (TOGA) dan alat-alat pendukung program kestrad Puskesmas.
- Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan lintas Sektor dan mitra pemberdayaan masyarakat.
 - Perilaku dan keyakinan masyarakat terhadap pemanfaatan TOGA masih rendah

Tabel 3.23 Persentase Kab./Kota yang Melakukan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL			
			JUMLAH KELOMPOK ASMAN	JUMLAH PUSKESMAS MELAKUKAN PEMBINAAN KELOMPOK ASMAN	PERSENTASE PUSKESMAS MELAKUKAN PEMBINAAN KELOMPOK ASMAN	INTERPRETASI (>15% PUSKESMAS PEMBINAAN)
1	2	3	4	5	6	7
1	OKU	18	117	6	33,33	1
2	OKI	33	15	4	12,12	0
3	MUARA ENIM	24	125	7	29,17	1
4	LAHAT	35	78	5	14,29	0
5	MUSI RAWAS	19	8	6	31,58	1
6	MUSI BANYUASIN	29	231	15	51,72	1
7	BANYUASIN	33	145	4	12,12	0
8	OKU SELATAN	19	187	5	26,32	1
9	OKU TIMUR	24	30	5	20,83	1
10	OGAN ILIR	25	116	3	12	0
11	EMPAT LAWANG	10	15	2	20	1
12	PALI	9	66	2	22,22	1
13	MURATARA	8	11	2	25	1
14	PALEMBANG	42	70	6	14,29	0
15	PAGAR ALAM	7	1	1	14,29	0
16	LUBUK LINGGAU	10	2	1	10	0
17	PRABUMULIH	9	38	5	55,56	1
PROVINSI		354	1255	79	22,3	10 (58,8%)

Grafik 3.42 Persentase Kab./Kota Yang Melakukan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional



Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
49.	Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	%	68	17.64	25,94	Sangat Rendah

Tabel 3.24 Data Kabupaten/Kota Dengan Tpp Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan E-Monev Hsp Tahun 2025

No	Kab/Kota	TPP Terdaftar	TPP IKL	TPP Peningkatan Kapasitas	TPP Uji lab	TPP Memenuhi Syarat	Persentase
1	Lahat	539	398	33	0	26	4,82
2	Banyuasin	664	603	0	0	0	-
3	Lubuk Linggau	363	326	0	0	0	-
4	OKUS	250	220	0	0	0	-
5	Empat Lawang	92	70	0	0	0	-
6	Muara Enim	260	227	4	4	4	1,54
7	Musi Banyuasin	491	405	64	64	63	12,83
8	Musi Rawas Utara	130	116	0	0	0	-
9	OKU	222	154	8	0	0	-
10	OKUT	114	111	29	0	0	-
11	OKI	424	361	2	0	2	0,47
12	OI	330	230	1	0	1	0,30
13	Pali	159	135	1	0	1	0,63
14	Prabumulih	155	124	0	0	0	-

No	Kab/Kota	TPP Terdaftar	TPP IKL	TPP Peningkatan Kapasitas	TPP Uji lab	TPP Memenuhi Syarat	Persentase
15	Pagar Alam	106	75	1	0	1	0,94
16	Musi Rawas	0	0	0	0	0	-
17	Palembang	1371	1201	22	12	13	0,95
18	Sumatera Selatan	5670	4756	165	80	111	1,96

Dilihat data di atas dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan, ada 3 Kab/Kota yang TPPnya memenuhi syarat karena melaksanakan 3 persyaratan yaitu insepksi kesehatan lingkungan (IKL), melakukan peningkatan kapasitas dan pemeriksaan laboratorium. 3 Kab/Kota tersebut adalah Kabupaten Musi Banyuasin (12.83%) Muara Enim (1.54%) dan Kota Palembang (0.95%).

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan hambatan yang ada di Program Penyehatan Pangan di Provinsi Selatan antara lain :

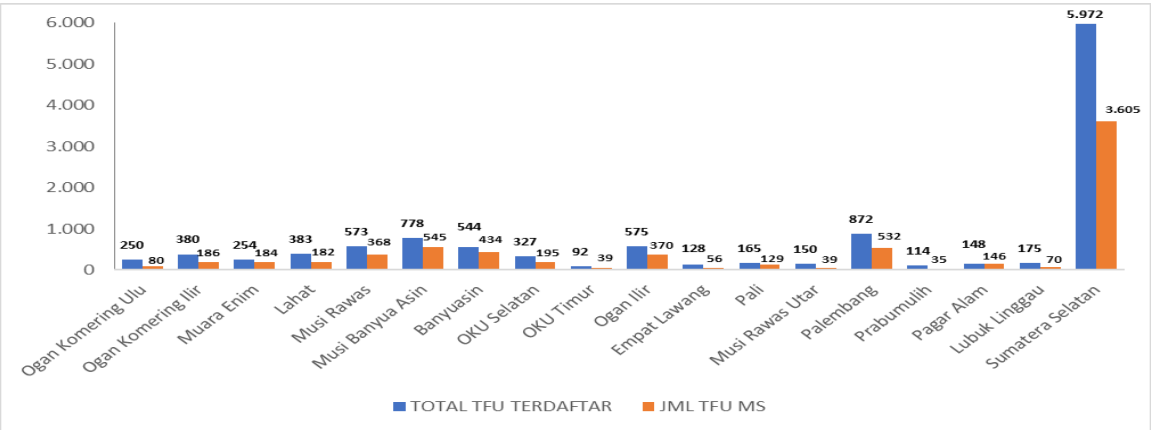
1. Adanya perubahan persyaratan TPP memenuhi syarat yang dulu cukup dengan melakukan IKL pada TPP sekarang harus memenuhi 3 persyaratan seperti IKL, peningkatan kapasitas dan pemeriksaan laboratorium.
2. Seringnya terjadi pergantian petugas/penanggung jawab program TPP di Kab/Kota.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten/Kota.
4. Tidak adanya pertemuan secara offline pada program TPP sehingga teman-teman Kabupaten/Kota kurang update untuk isu-isu terkini terkait dengan pangan.
5. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga fokus Kabupaten/Kota ke program MBG sehingga kegiatan pokok atau krusial yang berhubungan dengan program terabaikan.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
50.	Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	%	80	52,94	66	Sedang

Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat pada tahun 2025 ditargetkan 80% dan terealisasi 52,94 atau sebesar 66%. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.43 Kabupaten Kota Jumlah Tfu Terdaftar Dengan Jumlah Tfu Memenuhi Syarat



Kota Palembang dengan total TFU terdaftar sebanyak 87,2 dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 77,8 %, dan Kabupaten dengan jumlah TFU terdaftar paling rendah Kota Prabumulih sebesar 39 %, kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten dengan jumlah TFU yang Memenuhi Syarat (MS) pada Kabupaten Musi Banyuasin 54,4 %.

Dilihat data di atas dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan, ada 7 Kab/Kota yang TFU yang realisasi sudah mencapai target yang sudah ditentukan dengan target Tahun 2025 80%, adapun Kabupaten / Kota yang realisasinya sudah melebihi target : Kabupaten OKU realisasi 97,6%, Kabupaten Muara Enim 98,4%, Kabupaten Musirawas 86,6%, Kabupaten Musi Banyuasin 96,2%, Kabupaten OKUS 84,7%, Kabupaten Pali 83,6%, dan Koata Prabumulih 93,8%, sedangkan Kabupaten / Kota yang sudah melakukan IKL dan hasilnya sudah memenuhi syarat ada 3 Kabupaten /Kotat yaitu Kabupaten Musi Banyuasin 545%, Kabupaten Banyuasin 434, dan Kota Palembang 53,2% yangmemenuhi syarat karena telah melaksanakan insepsi kesehatan lingkungan (IKL), melakukan IKL seperti melakukan IKL Sekolah, pasar Puskesmas dengan menggunakan alat Sanitaria KIT yang ada di Puskesmas.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan hambatan yang ada di Program Tempat Fasilitas Umum (TFU) di Provinsi Selatan antara lain :

1. Adanya perubahan dan penambahan TFU lainnya karna sebelumnya locus TFU ada 3 yaitu Puskesmas, Sekolah dan Pasar, di tahun 2025 ada

penambahan TFU lainnya seperti akomodasi (hotel), stasiun, tempat ibadah taman hiburan dengan ada penambahan dapat menyulitkan petugas Puskesmas untk melakukan IKL karena sudah banyak yang harus dilakukan IKL

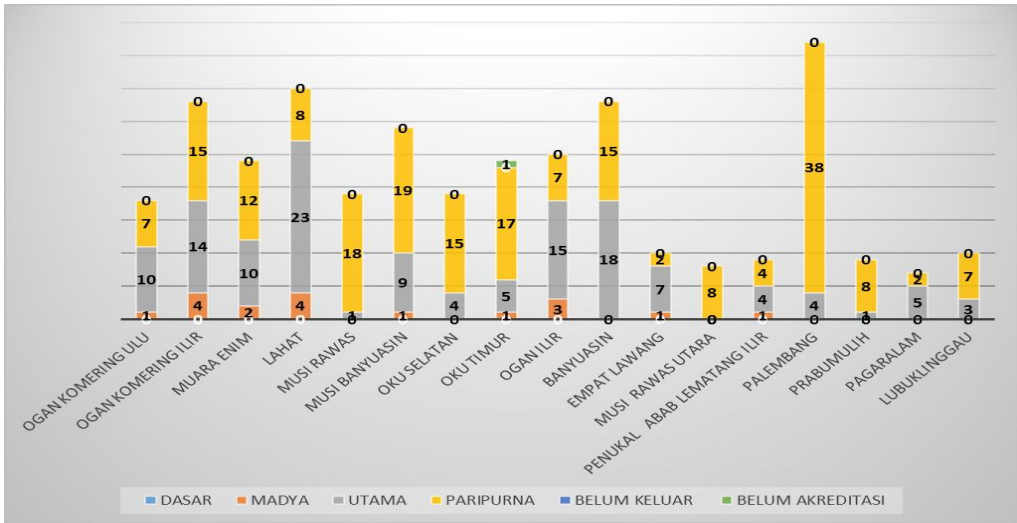
- 2. Seringnya terjadi pergantian petugas/penanggung jawab program TFU di Kab/Kota.
- 3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten/Kota
- 4. Tidak adanya pertemuan secara offline pada program TFU sehingga Petugas Kabupaten/Kota kurang update untuk isu-isu terkini terkait dengan pangan.
- 5. Penambahan aplikasi SKUDR Surve Kualitas Udara Dalam Ruangan) di dalam aplikasi e monev TFU, sedangkan sosialisasi atau pertemuan masalh aplikasi SKUDR masih terbatas dan sangat kurang
- 6. Ditahun 2026 seluruh Puskesmas sudah dapat mengimput alikasi SKUDR di emonev TFU dengan lokus sasaran sebanyak 30 sampel Rumah Tangga / KK.

2

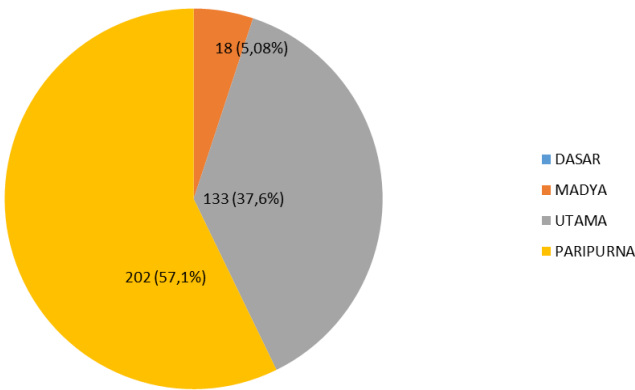
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
51.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	%	30	68,97	230	Sangat Baik

Grafik 3.44 Capaian status akreditasi Puskesmas Kab/Kota Tahun 2025



Grafik 3.45 Capaian Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Dari data diatas, diketahui capaian status akreditasi puskesmas dari 354 puskesmas yang telah diakreditasi 353 (99,72%) yaitu status paripurna ada 202 puskesmas (57.10%), status utama ada 133 Puskesmas (37,60%), status madya ada 18 puskesmas (5,08%) dan ada 1 Puskesmas yang belum akreditasi di Kabupaten OKU Timur (0,3%).

Upaya pencapaian indikator kinerja Akreditasi Puskesmas tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan :

- Monitoring dan evaluasi survey akreditasi Puskesmas yang dipantau secara rutin setiap akhir bulan melalui aplikasi DFO.kemkes.go.id
- Analisis data survey akreditasi Puskesmas yang dipantau secara rutin setiap akhir bulan melalui aplikasi DFO.kemkes.go.id di analisis rutin setiap bulan secara kumulatif dengan table Distribusi Frekuensi dan Diagram
- Menyusun laporan monitoring, Evaluasi dan analisis secara rutin dilakukan setiap bulan
- Hasil monev dan analisis di umpan balikkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan secara rinci per bulan terlampir ([link googledrive](#))

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
52.	Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	83	56,89	69	Sedang

Tabel 3.25 Persentase Capaian Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Standar Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	SPA Standar	Persentase	SPA Belum Standar	Persentase
1	Ogan Komering Ulu	18	1	5.56	17	94
2	Ogan Komering Ilir	33	1	3.03	32	97
3	Muara Enim	24	23	95.83	1	4
4	Lahat	35	7	20.00	28	80
5	Musi Rawas	19	8	42.11	11	58
6	Musi Banyu Asin	29	3	10.34	26	90
7	Banyu Asin	33	5	15.15	28	85
8	OKU Selatan	19	4	21.05	15	79
9	OKU Timur	24	6	25.00	18	75
10	Ogan Ilir	25	1	4.00	24	96
11	Empat Lawang	10	3	30.00	7	70
12	PALI	9	1	11.11	8	89
13	Musi Rawas Utara	8	2	25.00	6	75
14	Palembang	42	14	33.33	28	67
15	Prabumulih	9	0	0.00	9	100
16	Pagaralam	7	1	14.29	6	86
17	Lubuk Linggau	10	0	0.00	10	100
Prov Sumsel		354	80	22.60	274	77.40

Dari data diatas, diketahui capaian puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar ada 80 puskesmas (22,60%) dan belum standar 274 Puskesmas (77,40 %) dari jumlah seluruh puskesmas yaitu 354 unit.

Tabel 3.26 Capaian Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah RS	SPA Standar	Persentase	Belum Standar	Persentase
1	Kab. Ogan Komering Ulu	8	4	50	4	50
2	Kab. Ogan Komering Ilir	2	2	100	0	0
3	Kab. Muara Enim	7	7	100	0	0
4	Kab. Lahat	4	2	50	2	50
5	Kab. Musi Rawas	3	2	66.7	1	33
6	Kab. Musi Banyu Asin	3	3	100	0	0
7	Kab. Banyuasin	6	6	100	0	0
8	Kab. OKU Selatan	1	1	100	0	0
9	Kab. OKU Timur	4	4	100	0	0
10	Kab. Ogan Ilir	2	2	100	0	0
11	Kab. Empat Lawang	2	2	100	0	0
12	Kab. PALI	2	1	50	1	50
13	Kab. Musi Rawas Utara	1	1	100	0	0
14	Kota Palembang	33	33	100	0	0
15	Kota Prabumulih	4	4	100	0	0
16	Kota Pagar Alam	1	1	100	0	0
17	Kota Lubuklinggau	6	6	100	0	0
Prov Sumsel		89	81	91.00%	8	9.00%

Dari tabel diatas jumlah RS di Prov Sumsel 89 unit. Jumlah RS yang memiliki SPA standar ada 81 Unit (91 %). Jumlah RS yang memiliki SPA belum standar ada 8 unit (9%).

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
53.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	4.9	3,88	79,18	Tinggi

Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi pada tahun 2025 ditargetkan 4,9 rasio dan terealisasi 3,88 atau sebesar 79,18%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Kendala ataupun Hambatan :

- Distribusi Tidak Merata, Tenaga Kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di Kota besar disbanding daerah terpencil.
- Migrasi tenaga kesehatan, adanya tenaga yang ke luar negeri, dan perpindahan dari sektor public ke swasta
- Kesejahteraan dan Fasilitas Kurang,Insentif rendah, dan sarana /prasarana tidak memadai
- Pertumbuhan penduduk Tinggi, pertumbuhan lebih cepat di banding penambahan tenaga kesehatan.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
54.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83	88.70	107%	Sangat Baik

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 83% dan terealisasi 88,70 atau sebesar 107%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.27

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			
No	Kab/Kota	Jml. Puskesmas	Persentase (%)
1	OKU	18	82, 65%
2	OKI	33	99, 50%
3	M. Enim	24	99, 50%
4	Lahat	35	86, 40%
5	MURA	19	73, 38%
6	MUBA	29	98, 00%
7	Banyuasin	34	77, 94%
8	OKUT	24	92, 16%
9	OKUS	19	63, 73%
10	Ogan Ilir	25	97, 17%
11	Empat Lawang	10	76, 84%
12	PALI	9	88, 24%
13	Muratara	8	99, 50%
14	Palembang	42	97, 11%
15	Pagar Alam	7	91, 67%
16	Lubuk Linggau	10	84, 67%
17	Prabumulih	9	99, 50%
Provinsi Sumatera Selatan			88, 70%

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
55.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	25	69.8	279%	Sangat Baik

Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman pada tahun 2025 ditargetkan 25% dan terealisasi 69,8 atau sebesar 279%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.28 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi

No	Kab/Kota	Jumlah Puskesmas	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi
1	OKU	18	47,68
2	OKI	33	91,66
3	M. Enim	24	100
4	Lahat	35	53,57
5	MURA	19	26
6	MUBA	29	95,8
7	Banyuasin	34	38,27
8	OKUT	24	68,66
9	OKUS	19	54,56
10	Ogan Ilir	25	98,66
11	Empat Lawang	10	83,33
12	PALI	9	70
13	Muratara	8	100
14	Palembang	42	57
15	Pagar Alam	7	100
16	Lubuk Linggau	10	62,5
17	Prabumulih	9	39,165
Provinsi Sumatera Selatan			69,80%

Seperti data yang terdapat pada tabel diatas untuk persentase cakupan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman di Provinsi Sumatera Selatan mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 ini sebesar 25 %.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
56.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	77		79,84	Tinggi

Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan pada tahun 2025 ditargetkan 77% dan tercapai sebesar 79,84%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.29 LAPORAN
TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA PELAYANAN DI FASYANKES
(PUSKESMAS, KLINIK, RUMAH SAKIT, LABKESMAS)
DESEMBER 2025

NO	FASYANKES	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Puskesmas	354	86,65
2	Klinik	658	88,96
3	Rumah Sakit	89	64,85
4	Labkesmas	26	78,92
TOTAL		1127	79,84

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
57.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70	17	100	Sangat Baik

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan pada tahun 2025 ditargetkan 70% dan terealisasi 17 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil sudah melebihi target yang ditetapkan.

Peningkatan kompetensi SDM kesehatan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan **pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kinerja** tenaga kesehatan agar pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.

Tujuan Peningkatan Kompetensi:

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
- Menjamin keselamatan pasien
- Memenuhi standar akreditasi fasilitas kesehatan
- Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi medis
- Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bentuk Peningkatan Kompetensi:

- Pendidikan & Pelatihan (Diklat)
- Continuing Professional Development (CPD)
- Pendidikan Lanjutan
- Supervisi & Mentoring

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan mencapai fisik 100% dari target yang 70%, dan dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota.

Kendala Peningkatan Kompetensi

- Keterbatasan anggaran pelatihan
- Tenaga sulit meninggalkan tempat kerja
- Akses pelatihan terbatas di daerah 3T
- Kurangnya sistem perencanaan berbasis kebutuhan

Strategi Penguatan/Rekomendasi

- Digitalisasi pelatihan (e-learning nasional)
- Perencanaan pelatihan berbasis analisis kebutuhan (Training Need Analysis)
- Alokasi anggaran khusus pengembangan SDM
- Sistem reward bagi tenaga yang meningkatkan kompetensi
- Kerja sama dengan institusi pendidikan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
58.	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	67	18	55,15	Rendah

Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 67% dan terealisasi 18 atau sebesar 55,15%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Indikator Program Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum milik Pemerintah memiliki SDM sesuai standar minimah memiliki 7 spesialis yaitu 4 Spesialis Dasar dan 3 spesialis penunjang, yaitu:

- Spesialis Penyakit Dalam
- Spesialis Anak
- Spesialis OBGYN
- Spesialis Bedah

- Spesialis Patologi Klinik
- Spesialis Radiologi
- Spesialis Anastesi.

Di Sumatera Selatan capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar sudah mencapai 55,15% dari target di Renstra 2025-2029 yaitu 67%. Belum mencapai target.

Tabel.3.30 Rumah Sakit Umum Daerah Lengkap 7 Spesialis

No	Total	29	100%
1	Lengkap	16	55,15
2	Belum Lengkap	13	45,85

Kendala:

- Distribusi tidak merata, Spesialis terkonsentrasi di kota besar, fasilitas pendukung lebih lengkap di kota besar
- Keterbatasan Kuota pendidikan Spesialis, Biaya pendidikan tinggi dan tidak semua fakultas kedokteran memiliki program spesialis lengkap, akibatnya suplay tidak seimbang denngan kebutuhan
- Sistem Kepegawaian dan Formasi ASN, Formasi CPNS/PPPK spesialis terbatas, Proses rekrutmen lama dan birokratis,Banyak RS pemerintah hanya mampu merekrut kontrak jangka pendek, sehingga Rumah sakit sulit mengisi kekosongan jabatan secara permanen
- Ketimpangan Insentif dan Remunerasi, Pendapatan di RS swasta atau praktik mandiri lebih tinggi, Jasa medis di RS pemerintah sering lebih rendah,Sistem pembagian jasa pelayanan belum merata, sehingga banyak spesialis memilih bekerja di Rumah sakit Swasta atau pindah ke kota besar.
- Beban kerja tinggi , jumlah pasien banyak tapi sepsialis sedikit.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
59.	Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Unit	27	27	100%	Sangat Baik

Grafik 3.46



Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator *Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut perizinan* menunjukkan capaian yang optimal. Dari target 27 unit, seluruhnya berhasil direalisasikan sebanyak 27 unit, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Grafik menggambarkan kesesuaian antara target dan realisasi yang sesuai, ini menunjukkan perencanaan yang realistis serta pelaksanaan pengawasan yang efektif. Capaian ini didukung oleh ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas, pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital (simponi alkes sumsel), serta monitoring dan evaluasi yang konsisten. Secara keseluruhan, kinerja pada indikator ini mencerminkan pengelolaan pengawasan perizinan Cabang PAK yang berjalan baik.

Meskipun capaian indikator telah mencapai 100%, terdapat beberapa potensi permasalahan yang perlu dipertimbangkan, antara lain ketergantungan pada tingkat kepatuhan pelaku usaha yang apabila menurun dapat mempengaruhi kinerja pengawasan, keterbatasan SDM pengawas terutama jika jumlah sarana bertambah, dinamika perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat di lapangan, serta risiko administratif seperti ketidaklengkapan dokumen dan keterlambatan pelaporan oleh pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja meliputi optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital guna mendukung monitoring secara real-time, penguatan pembinaan dan sosialisasi regulasi kepada Cabang PAK, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kepatuhan perizinan. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan pelaku usaha untuk mempercepat tindak lanjut perizinan, serta pemetaan risiko sarana sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan secara lebih terarah dan efektif.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
60.	Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Unit	14	14	100	Sangat Baik

Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan pada tahun 2025 ditargetkan 14% dan terealisasi 14 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.31

DATA PBF PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025		
NO	NAMA	JUMLAH
1	PBF Pusat	30
2	PBF Cabang	35

Pada Tahun 2025 Jumlah PBF cabang yang berhasil dibina sebanyak 14 sarana seusai dengan terget yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Sarana tersebut antara lain PT. Belibis Muda Perkasa cabang Musi Rawas, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palembang, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Palembang, PT. Rajawali Nusindo Cabang Palembang, PT. Antarmitra Sembada Cabang Palembang, PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palembang, PT. Daya Muda Agung Cabang Palembang, PT. Tempo Cabang Palembang, PT. Bina San Prima Cabang Palembang, PT. Kebayoran Pharma Cabang Palembang, PT. Tri Sapta Jaya Cabang Palembang, PT. Adia Artha Abadi Cabang Palembang, PT. Penta Valent Cabang Palembang dan PT. Distriversa Buanamas Cabang Palembang.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
61.	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	75	100	133%	Sangat Baik

Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan pada tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi 100 atau

sebesar 133%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025 Jumlah PBF cabang yang rekomendasi berhasil terbit sebanyak 14 sarana dan semuanya memenuhi persyaratan karena bila ada salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka izin PBF cabang tersebut tidak akan terbit. Sarana yang berhasil terbit surat rekomendasinya antara lain PT. Belibis Muda Perkasa cabang Musi Rawas, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palembang, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Palembang, PT. Rajawali Nusindo Cabang Palembang, PT. Antarmitra Sembada Cabang Palembang, PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palembang, PT. Daya Muda Agung Cabang Palembang, PT. Tempo Cabang Palembang, PT. Bina San Prima Cabang Palembang, PT. Kebayoran Pharma Cabang Palembang, PT. Tri Sapta Jaya Cabang Palembang, PT. Adia Artha Abadi Cabang Palembang, PT. Penta Valent Cabang Palembang dan PT. Distriversa Buanamas Cabang Palembang. Sehingga capaian untuk indikator ini sebanyak 100%.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
62.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	70	100	142.9	Sangat Baik

Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2025 ditargetkan 70% dan terealisasi 100 atau sebesar 142,9%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
63.	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	%	91	75.33	83%	Tinggi

Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 91% dan terealisasi 75,33 atau sebesar 83%. Jika

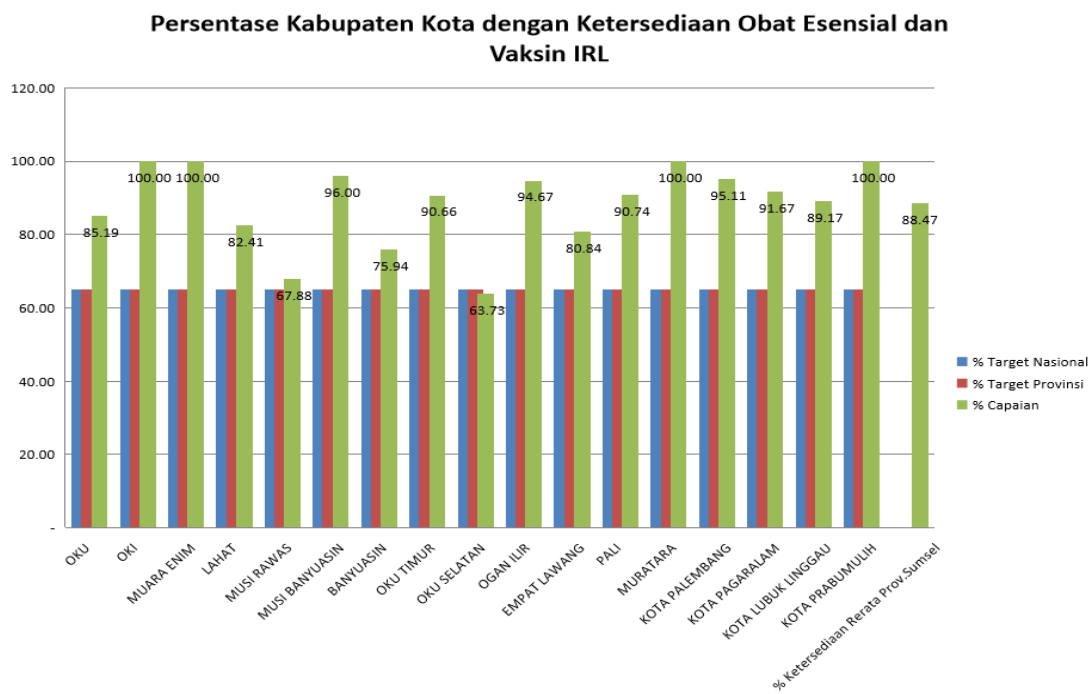
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3.32 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Kefarmasian di Faskes Dasar
Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	% Puskesmas yang melakukan Yanfar	
		Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas Yang melakukan Yanfar (%)	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas Yang melakukan Yanfar (%)	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas Yang melakukan Yanfar (%)	Jumlah Puskesmas yang Melapor		
1	OKU	18	100,00	18	100,00	18	100,00	17	94,44	98,61
2	OKI	21	63,64	17	51,51	13	39,39	13	39,39	48,48
3	MUARA ENIM	22	91,67	22	91,67	22	91,67	21	87,50	90,63
4	LAHAT	30	85,71	30	85,71	33	94,29	30	85,71	87,86
5	MUSI RAWAS	17	89,47	17	89,47	19	100,00	19	100,00	94,74
6	MUSI BANYUASIN	29	100,00	29	100,00	29	100,00	29	100,00	100,00
7	BANYUASIN	23	69,70	22	66,67	20	60,61	17	51,52	62,13
8	OKU SELATAN	1	5,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5,26
9	OKU TIMUR	22	91,67	22	91,67	21	87,50	21	87,50	89,59
10	OGAN ILIR	25	100,00	23	92,00	25	100,00	23	92,00	96,00
11	EMPAT LAWANG	8	80,00	8	80,00	8	80,00	5	50,00	72,50
12	PALI	8	88,90	8	88,89	8	88,89	8	88,89	88,89
13	MURATARA	8	100,00	8	100,00	7	87,50	7	87,50	93,75
14	KOTA PALEMBANG	37	88,10	40	95,24	42	100,00	41	97,62	95,24
15	KOTA PRABUMULIH	9	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	100,00
16	KOTA PAGARALAM	7	100,00	7	100,00	6	85,71	6	85,71	92,86
17	KOTA LUBUK LINGGAU	8	80,00	8	80,00	8	80,00	5	50,00	72,50

Fasilitas Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian antara lain Pengkajian Resep, Pelayanan Informasi Obat, Konseling Obat, Resep Kasus ISPA Non Pneumonia, Jumlah Resep Kasus ISPA Non Pneumonia dengan Antibiotik, Jumlah Resep Kasus Diare Non Spesifik, Jumlah Resep Kasus Diare Non Spesifik dengan Antibiotik Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan / Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar tahun 2025 Adalah 75,33%, capaian ini masih dibawah target indikator Nasional atau Provinsi sebesar 91%

Grafik 3.47



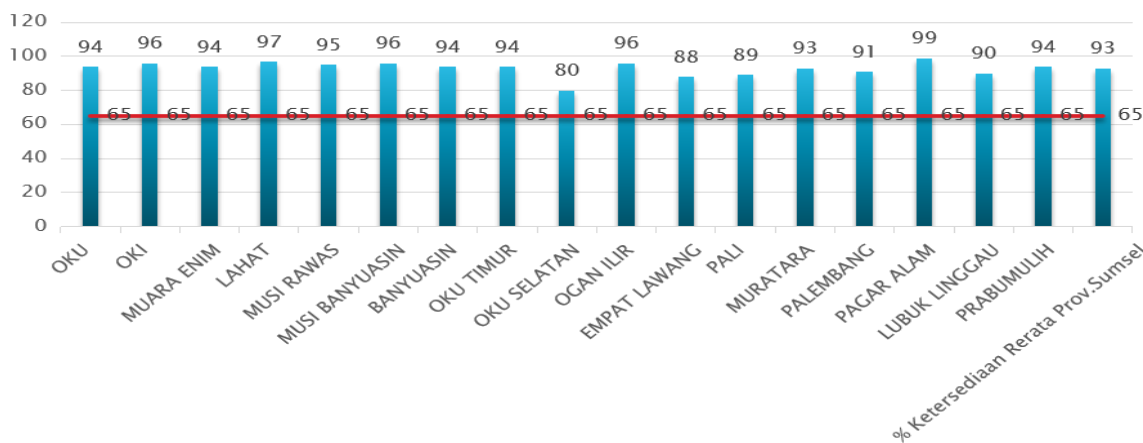
Persentase Ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL dari target 65% yang ditetapkan realisasi capaian tahun 2025 adalah 88,47%, yang terdiri dari ketersediaan obat esensial di Kab/Kota 81,76 % dan Vaksin IRL 93,0

Pemantauan ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan dasar perlu dilaksanakan untuk mengetahui kondisi real di lapangan terkait ketersediaan vaksin. Hal ini untuk mendukung pelayanan kesehatan prima di tingkat pelayanan dasar Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi melakukan pengumpulan dan pengolahan data ketersediaan vaksin di kabupaten/kota dari hasil laporan per triwulan Kabupaten/Kota. Berikut adalah gambaran di wilayah kabupaten/kota :

Tabel 3.33 Ketersediaan Rerata Prov Sumsel

NO	Kab/Kota	% Vaksin	% Target Provinsi
1	OKU	94	65
2	OKI	96	65
3	MUARA ENIM	94	65
4	LAHAT	97	65
5	MUSI RAWAS	95	65
6	MUSI BANYUASIN	96	65
7	BANYUASIN	94	65
8	OKU TIMUR	94	65
9	OKU SELATAN	80	65
10	OGAN ILIR	96	65
11	EMPAT LAWANG	88	65
12	PALI	89	65
13	MURATARA	93	65
14	PALEMBANG	91	65
15	PAGAR ALAM	99	65
16	LUBUK LINGGAU	90	65
17	PRABUMULIH	94	65
	% Ketersediaan Rerata Prov.Sumsel	93	65

Grafik 3.48 Persentase Ketersediaan Vaksin IRL di Puskesmas se Prov.
Sumatera Selatan Tahun 2025



Jika dilihat berdasarkan target Tahun 2025 dari Kemenkes RI 65% Ketersediaan Vaksin IDL di Puskesmas, rata rata diatas 90 % persen 14 Kabupaten / Kota dan 3 Kabupaten/Kota dibawah 90 % Kabupaten/Kota tertinggi dengan ketersediaan Vaksin IRL adalah Kota Pagaram sebesar 99%, dan terendah adalah Kabupaten OKU Selatan sebesar 80%

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
64.	Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	%	65	91.2	140%	Sangat Baik

Tabel 3.34 Persentase ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2025

No	Kab/Kota	% Obat	% Target Provinsi
1	OKU	70,37	65,00
2	OKI	100,00	65,00
3	MUARA ENIM	100,00	65,00
4	LAHAT	73,81	65,00
5	MUSI RAWAS	51,75	65,00
6	MUSI BANYUASIN	100,00	65,00
7	BANYUASIN	59,88	65,00
8	OKU SELATAN	87,32	65,00
9	OKU TIMUR	42,45	65,00
10	OGAN ILIR	97,33	65,00
11	EMPAT LAWANG	66,67	65,00
12	PALI	81,48	65,00
13	MURATARA	100,00	65,00
14	KOTA PALEMBANG	97,22	65,00
15	KOTA PRABUMULIH	83,33	65,00
16	KOTA PAGARALAM	78,33	65,00
17	KOTA LUBUK LINGGAU	100,00	65,00
	% Ketersediaan Rerata Prov.Sumsel	81,76	65,00

Jika dilihat berdasarkan target Tahun 2025 dari Kemenkes RI 65% Ketersediaan Obat di Puskesmas, rata rata diatas 81,76 % persen 14 Kabupaten / Kota di atas 65 % dan 3 Kabupaten/Kota dibawah 65 % Yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur

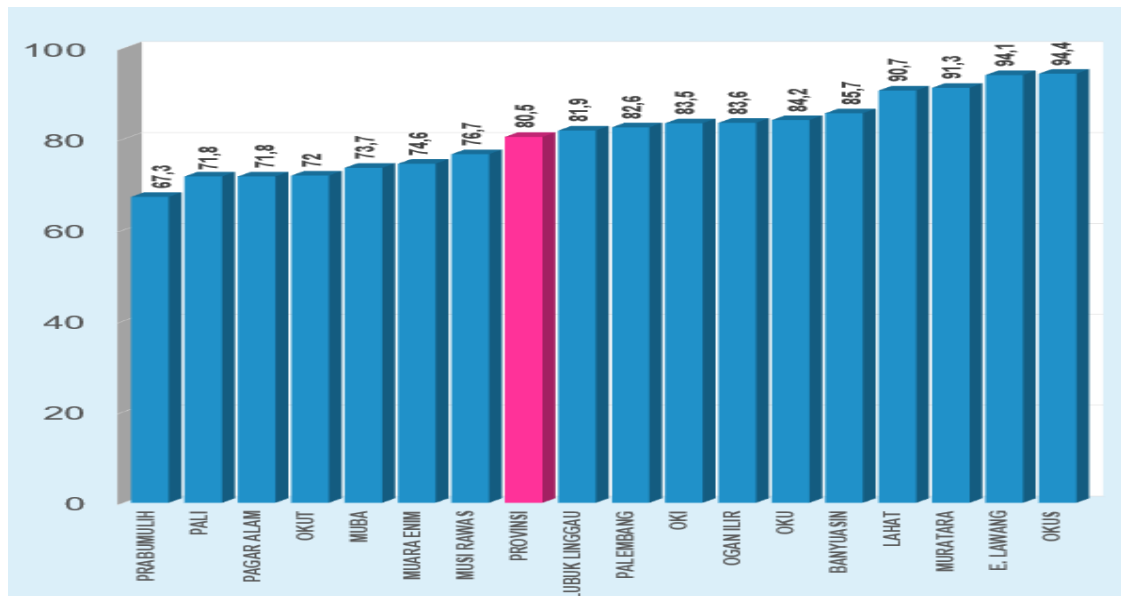
Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
65.	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	%	50	17	100	Sangat Baik

**Tabel 3.35 PERSENTASE FASYANKES TERDAFTAR KE SIKN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH FASYANKES TEREISTRASI						JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI RME TERDAFTAR DI SIKN						RME TERDAFTAR SIKN (TARGET 50%)	
		RS	PKM	KLINIK	LABKES	TPMD/D G	JUMLAH	RS	PKM	KLINIK	LABKES	TPMD/ DG	JUMLAH	%	Interpretasi
1	OKU	8	18	18	2	49	95	8	18	16	0	38	80	84,2	Tercapai
2	OKI	2	33	41	0	27	103	2	33	33	0	18	86	83,5	Tercapai
3	MUARA ENIM	7	24	32	2	53	118	7	24	31	1	25	88	74,6	Tercapai
4	LAHAT	4	35	13	1	22	75	4	35	10	0	19	68	90,7	Tercapai
5	MUSI RAWAS	3	19	20	1	47	90	3	19	14	0	33	69	76,7	Tercapai
6	MUSI BANYUASIN	3	29	36	2	63	133	3	29	32	1	33	98	73,7	Tercapai
7	BANYUASIN	6	33	43	0	30	112	6	33	38	0	19	96	85,7	Tercapai
8	OKUT	4	24	43	1	60	132	4	23	37	0	31	95	72,0	Tercapai
9	OKUS	1	19	7	0	9	36	1	19	7	0	7	34	94,4	Tercapai
10	OGAN ILIR	2	25	14	0	20	61	2	25	11	0	13	51	83,6	Tercapai
11	E. LAWANG	2	10	7	0	15	34	2	10	7	0	13	32	94,1	Tercapai
12	PALI	2	9	4	0	24	39	2	9	4	0	13	28	71,8	Tercapai
13	MURATARA	1	8	3	1	10	23	1	8	3	0	9	21	91,3	Tercapai
14	PALEMBANG	33	42	310	12	294	691	33	42	261	9	226	571	82,6	Tercapai
15	PAGAR ALAM	1	7	22	1	8	39	1	7	14	0	6	28	71,8	Tercapai
16	LUBUK LINGGAU	6	10	25	3	61	105	6	10	24	2	44	86	81,9	Tercapai
17	PRABUMULIH	4	9	21	2	65	101	4	9	19	2	34	68	67,3	Tercapai
PROVINSI		89	354	659	28	857	1987	89	353	561	15	581	1599	80,5	Tercapai 100

**Grafik 3.49 PERSENTASE FASYANKES TERDAFTAR KE SIKN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

Implementasi penerapan Rekam Medis elektronik terintegrasi SATUSEHAT 2025 adalah :



1. Dari 17 kab/kota, ada 10 kab/kota yang memiliki puskesmas dengan pelaporan RME pada aliran data SATUSEHAT minimal 50%, target tahunan tercapai.
2. Dari 17 kab/kota, ada 11 kab/kota yang memiliki klinik dengan RME terkoneksi SATUSEHAT minimal 75%, target tahunan tercapai.
3. Dari 17 kab/kota, ada 10 kab/kota yang memiliki TPMD/Dg dengan RME terkoneksi SATUSEHAT minimal 50%.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
66.	Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	%	45	53	117%	Sangat Baik

Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 45% dan terealisasi 53% atau sebesar 117%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai dari target yang ditetapkan.

Capaian melampaui target, namun distribusi RS PONEK masih belum merata. Ketersediaan fasilitas belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan wilayah dengan angka kematian maternal yang tinggi.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih ada Kab/Kota belum memiliki RS PONEK standar.
2. Kematian maternal masih signifikan, termasuk di wilayah dengan RS PONEK.

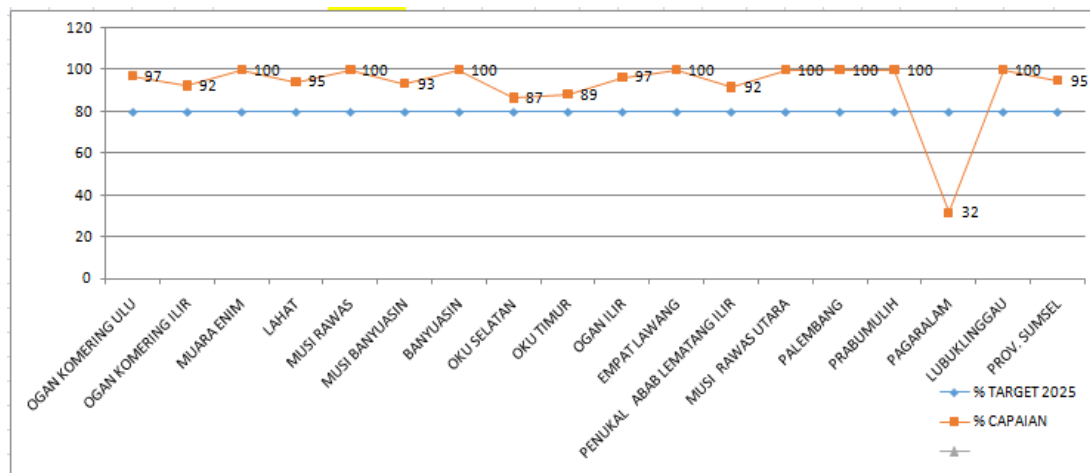
Analisis:

Permasalahan bukan hanya ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas layanan, SDM, dan efektivitas sistem rujukan maternal.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
67.	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	%	75	95	127	Sangat Baik

Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas pada tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi 95% atau sebesar 127%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Grafik 3.50
KEPATUHAN PUSKESMAS MELAPORKAN INM
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



Ket Grafik 3.50 :

Berdasarkan diagram 3 dapat dilihat bahwa Puskesmas Dari 17 Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran INM KKT, yang mencapai target cakupan pelaporan Pengukuran INM KKT sebanyak 16 Kabupaten/Kota dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 Kabupaten/ Kota yaitu **Kota Pagaralam**.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
68.	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	%	75	95	127	Sangat Baik

Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi 95% atau sebesar 127%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Tabel 3.36 Capaian pelaporan INM dan IKP Laboratorium Kesehatan tahun 2025

CAPAIAN LAPORAN INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM) LABORATORIUM KESEHATAN BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2025				
NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA LABORATORIUM	CAPAIAN YANG MELAPOR (%)	KETERANGAN
1	Palembang	1 Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Palembang	100	Proses tutup
		2 Lab. Klinik Intan Palembang	18	
		3 Lab. Klinik Kimia Farma Diagnostika Palembang	100	
		4 Lab. Klinik Pramita Palembang Cabang Veteran (1610014)	100	
		5 Lab. Klinik Pramita Palembang (Utama)	100	
		6 Lab. Klinik Pramita Palembang Cabang Plaza (1610011)	100	
		7 Lab. Klinik Prodia Cabang veteran Palembang	100	
		8 Lab. Klinik Prodia Palembang Cabang Basuki Rahmat	100	
		9 Lab. Khusus Patologi Anatomi Dyatmihis	100	
		10 Lab. Khusus Patologi Anatomi Barokah	100	
		11 Lab. Parahita Diagnostic Center	100	
		12 Lab. Zafir Palembang	100	
2	Ogan Komering Ulu	UPT Labkesda Kab. OKU	100	
		Loka Labkesmas Baturaja	64	
3	Ocu Timur	UPTD Labkesda Kab. OKU Timur	100	
4	Lubuklinggau	1 Labkesda Kota Lubuklinggau	100	
		2 Lab. Klinik Kimia Farma Lubuk Linggau	100	
		3 Lab. Klinik Mitra Prima Lubuklinggau	100	
5	Musi Rawas	Labkesda Kab. Musi Rawas	100	
6	Murata	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Musi Rawas Utara	91	
7	Prabumulih	1 UPTD Labkesda Kota Prabumulih	100	
		2 Lab. Pramitra Biolab Indonesia	100	
8	Muara Enim	UPTD Labkesda Kab. Muara Enim	100	
9	Lahat	UPT Labkesda Lahat	100	
10	Pagaralam	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pagaralam	100	
11	Musi Banyuasin	Laboratorium Medis Sehat Medical Center	100	
12	Ogan Komering Ilir	-	-	
13	Banyuasin	-	-	
14	Ogan Ilir	-	-	
15	Empat Lawang	-	-	
16	PALI	-	-	
17	Ocu Selatan	-	-	
		26 LABORATORIUM	95	

Berdasarkan capaian laporan INM dan IKP laboratorium kesehatan tahun 2025 dari 26 Laboratorium Kesehatan adalah 95%.

Berdasarkan data diatas ada 11 Kabupaten/Kota yang telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dari 17 Kabupaten/Kota.

Dari 17 kabupaten/kota di wilayah kerja, sebanyak 11 kabupaten/kota telah melaksanakan pelaporan INM, dengan 10 kabupaten/kota mencapai capaian maksimal 100% dan 1 kabupaten (Muratara) mencapai capaian 91%. Seluruh kabupaten/kota yang melaporkan telah melampaui batas minimal target 75%.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Aplikasi sering eror
- b. Ada laboratorium yang belum lapor INM dan IKP yaitu laboratorium Klinik Intan Palembang, karena dalam proses tutup pelayanan.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
69.	Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	Ratio	3	3	100%	Sangat Baik

Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000 pada tahun 2025 ditargetkan 3 per 1000 penduduk dan terealisasi 3 per 1000 penduduk atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai dari target yang ditetapkan.

Capaian sesuai target, tetapi menunjukkan ketimpangan signifikan. Kota besar memiliki rasio tinggi, sementara kabupaten tertentu masih sangat rendah, mengindikasikan ketidakmerataan akses rawat inap.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
70.	Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan	%	70	91.18	130	Sangat Baik

	Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 70% dan terealisasi 91,18% atau sebesar 130 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.37 Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Daerah dengan ketersediaan SPA sesuai standar

NO	Kab/Kota	Jumlah RS	SPA Standar	Persentase
1	Kab. Ogan Komering Ulu	1	1	100
2	Kab. Ogan Komering Ilir	2	2	100
3	Kab. Muara Enim	4	4	100
4	Kab. Lahat	2	1	50
5	Kab. Musi Rawas	3	2	66.7
6	Kab. Musi Banyu Asin	3	3	100
7	Kab. Banyuasin	3	3	100
8	Kab. Oku Selatan	1	1	100
9	Kab. Oku Timur	2	2	100
10	Kab. Ogan Ilir	1	1	100
11	Kab. Empat Lawang	2	2	100
12	Kab. PALI	2	1	50
13	Kab. Musi Rawas Utara	1	1	100
14	Kota Palembang	3	3	100
15	Kota Prabumulih	1	1	100
16	Kota Pagar Alam	1	1	100
17	Kota Lubuklinggau	2	2	100
	Total	34	31	91.18

Berdasarkan Grafik di atas dari 17 Kabupaten / kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan ketersediaan Sarana Prasarana dan alat kesehatan (SPA). Jumlah RS Pemerintah Daerah di Prov. Sumsel 34 Unit. Jumlah RS Pemerintah Daerah yang memiliki ketersediaan Sarana prasarana dan alat kesehatan minimal 60 % sesuai standar 31 Unit (91,18 %) sedangkan Jumlah RS Pemerintah Daerah yang memiliki ketersediaan Sarana prasarana dan alat kesehatan belum standar 3 Unit (8,82%) yaitu RSUD Tanjung Tebat Kabupaten

Lahat, RSUD Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, RSUD Pratama Tanah Abang Kabupaten Pali.

Adapun permasalahan SPA RS adalah sebagai berikut :

- a. Kekurangan sarana untuk RS yaitu 48% dari target 100%

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelengkapan dan pemenuhan sarana RS.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
71.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	%	17	185	52,26	Rendah

Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar pada tahun 2025 ditargetkan 17% dan terealisasi 185 atau sebesar 52,26%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah mencapai dari target yang ditetapkan.

Kendala/Hambatan:

- Kekurangan jumlah tenaga kesehatan:
- Formasi tidak terpenuhi
- Rekrutmen terbatas karena kuota ASN/PPPK sedikit
- Puskesmas di daerah terpencil sulit menarik tenaga kesehatan
- Distribusi tidak merata, Tenaga kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di kota besar dibanding daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Dokter & dokter gigi enggan ditempatkan di daerah terpencil, Fasilitas & akses terbatas (transportasi, pendidikan anak, tempat tinggal)
- Keterbatasan Anggaran Daerah, dana operasional lebih banyak untuk program daripada SDM, INSentif daerah belum kompetitif
- Tenaga pindah ke rumah sakit atau sektor swasta
- Penugasan sementara tanpa berkelanjutan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
72.	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	%	29	23,5	81,03	Tinggi

Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 ditargetkan 29% dan terealisasi 23,5% atau sebesar 81,03%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang diinginkan.

Pembinaan dan pengawasan adalah fungsi manajemen untuk memastikan fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS pemerintah/swasta) berjalan sesuai standar mutu, keselamatan pasien, dan regulasi.

a. Pembinaan

Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas melalui:

- Bimbingan teknis
- Pelatihan
- Supervisi
- Pendampingan
- Evaluasi kinerja

b. Pengawasan

Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap:

- Kepatuhan terhadap regulasi
- Standar pelayanan
- Kinerja SDM
- Mutu dan keselamatan pasien

TUJUAN:

- Menjamin pelayanan sesuai standar
- Meningkatkan mutu layanan
- Melindungi masyarakat sebagai penerima layanan
- Mencegah pelanggaran etik dan hukum

Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar saat ini mencapai 23,5% dari target 29 %.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan:

- Supervisi manajemen dan program
- Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pembinaan SDM

Kendala Pembinaan & Pengawasan

- Aplikasi yang di keluarkan belum tersosialisasi ke Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Selatan karena masih dilakukan pembaharuan aplikasi
- SDM pengawas terbatas
- Wilayah kerja luas
- Data pelaporan belum terintegrasi
- Kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan

Strategi Penguatan/Rekomendasi Solusi

- Digitalisasi sistem pelaporan
- Supervisi berbasis risiko
- Peningkatan kompetensi pengawas
- Integrasi data pusat–daerah
- Penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien

3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
----------	---

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
73.	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.342		0.342	Sangat Baik

Faktor Penghambat :

- Dinkes Prov. Sumsel tidak dapat menyediakan data IKS karena tidak tersedia lagi instrument pencatatan dan pelaporan mulai dari tingkat Puskesmas
- Aplikasi Keluarga Sehat sebagai instrument pencatatan dan pelaporan tidak bisa diakses sejak Desember 2024 tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga Kabupaten/Kota dan Puskesmas belum sempat mendownload raw data untuk diolah manual, sedangkan back-up data yang sudah dientry ke aplikasi Keluarga Sehat juga tidak ada.
- IKS yang terdiri atas 12 indikator tidak dapat diambil datanya dari masing-masing indikator, karena definisi operasional yang berbeda serta sasaran yang berbeda pula (sasaran IKS adalah keluarga, sasaran indikator dalam IKS adalah individu)
- Tidak ada arahan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan PIS-PK dengan indikator IKS, hal ini sesuai dengan telah berakhirnya RPJMN 2019 – 2024, dan dengan terbitnya PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029 tidak lagi mencantumkan indikator IKS ataupun PIS-PK
- Akan ditemui hambatan besar dalam pelaksanaan PIS-PK untuk mendapatkan IKS sehubungan dengan Puskesmas sedang difokuskan pada Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden sejak Februari 2025 dalam tatakelola Puskesmas berupa Integrasi Layanan Primer (ILP)

- f. Tidak tersedianya lagi penganggaran kegiatan PIS-PK di Kab/Kota dan Puskesmas
- g. Masih kurangnya dukungan lintas program
- h. Kunjungan rumah oleh nakes dalam PIS-PK berbeda tatacaranya dengan kunjungan rumah dalam ILP yang dilakukan oleh kader

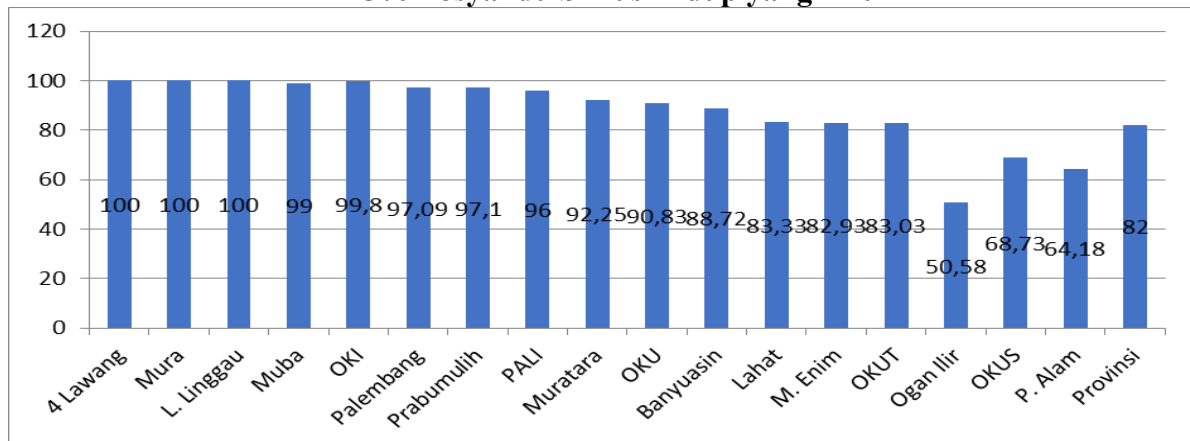
Tabel 3.38 Perubahan IKS Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024

No	Kabupaten/ Kota	IKS 2019	IKS 2020	IKS 2021	IKS 2022	IKS 2023	IKS 2024
1	OKU	0.362	0.297	0.285	0.276	0.277	0.277
2	OKI	0.039	0.074	0.09	0.101	0.104	0.119
3	Muara Enim	0.121	0.212	0.261	0.304	0.341	0.377
4	Lahat	0.097	0.136	0.145	0.148	0.162	0.17
5	Musi Rawas	0.08	0.107	0.136	0.177	0.196	0.203
6	Musi Banyuasin	0.094	0.193	0.266	0.299	0.335	0.339
7	Banyuasin	0.065	0.191	0.097	0.124	0.173	0.372
8	OKUS	0.045	0.081	0.112	0.121	0.158	0.162
9	OKUT	0.333	0.118	0.117	0.127	0.125	0.127
10	Ogan Ilir	0.087	0.113	0.128	0.135	0.149	0.152
11	Empat Lawang	0.295	0.087	0.087	0.09	0.092	0.225
12	PALI	0.172	0.182	0.129	0.194	0.229	0.23
13	Muratara	0.082	0.084	0.092	0.115	0.216	0.216
1	Palembang	0.302	0.285	0.322	0.504	0.694	0.735
15	Prabumulih	0.194	0.175	0.237	0.124	0.551	0.551
16	Pagar Alam	0.186	0.129	0.124	0.271	0.128	0.185
17	Lubuk Linggau	0.196	0.125	0.231	0.444	0.293	0.298

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
74.	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	30	82	274	Sangat Baik

Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif pada tahun 2025 ditargetkan 30% dan terealisasi 82% atau sebesar 274%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang diinginkan.

Grafik 3.51 Capaian Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif



- Target Nasional & Provinsi: 40% capaian Posyandu siklus hidup.
- Capaian Aktual: Dari 17 kabupaten/kota, 14 daerah ($\pm 82\%$) sudah mencapai $\geq 75\%$ (kategori *Memenuhi*).
- Daerah yang belum memenuhi (di bawah 75%): Kab. Ogan Ilir (50,58%), Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (68,73%), dan Kota Pagar Alam (64,18%)

Secara keseluruhan, capaian provinsi **jauh melampaui target nasional 40%**, namun belum ada daerah yang mencapai **100% secara merata** (meski beberapa sudah 100% seperti Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas, dan Kota Lubuk Linggau). Kemudian untuk Kabupaten yang tidak mencapai 75 % posyandu siklus hidup ada kabupaten Ogan komering Ulu Selatan 68,73%, Kabupaten Pagar Alam 64,18%, dan Kabupaten Ogan Ilir 50,58 %, namun secara keseluruhan sudah mencapai target provinsi sebesar 40%.

Tabel 3.39 Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif

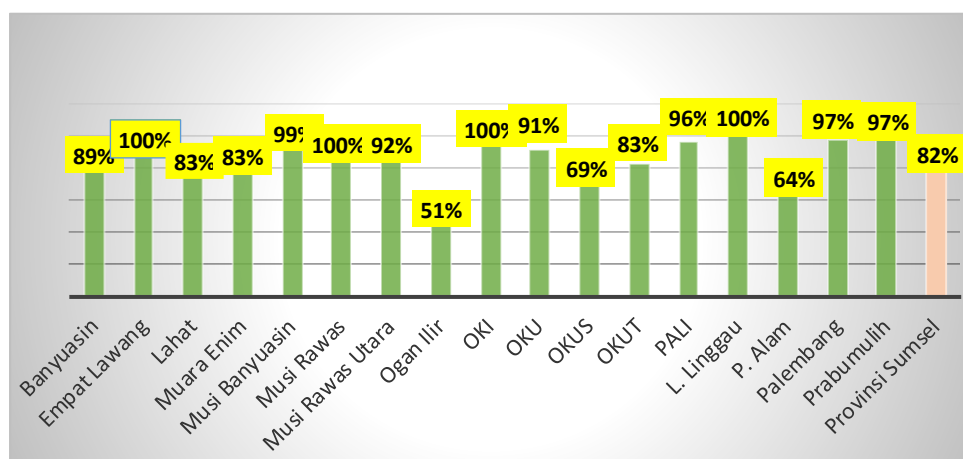
NO	Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Posyandu Siklus Hidup	Status
1	Empat Lawang	100%	Memenuhi
2	Musi Rawas	100%	Memenuhi
3	Lubuk Linggau	100%	Memenuhi
4	Musi Banyuasin	99%	Memenuhi
5	Ogan Komering Ilir	99,88%	Memenuhi
6	Palembang	97,09%	Memenuhi

NO	Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Posyandu Siklus Hidup	Status
7	Prabumulih	97,10%	Memenuhi
8	Penukal Abab Lematang Ilir	96%	Memenuhi
9	Musi Rawas Utara	92,25%	Memenuhi
10	Ogan Komering Ulu	90,83%	Memenuhi
11	Banyuasin	88,72%	Memenuhi
12	Lahat	83,33%	Memenuhi
13	Muara Enim	82,93%	Memenuhi
14	Ogan Komering Ulu Timur	83,03%	Memenuhi
15	Ogan Ilir	50,58%	Tidak Memenuhi
16	Ogan Komering Ulu Selatan	68,73%	Tidak Memenuhi
17	Pagar Alam	64,18%	Tidak Memenuhi

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
75.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	%	20	82,35	412	Sangat Baik

Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan pada tahun 2025 ditargetkan 20% dan terealisasi 82,35% atau sebesar 412%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi target yang diinginkan.

Grafik 3.52 Capaian Posyandu yang memberikan Layanan Siklus hidup



Hampir semua kabupaten/kota melampaui target. Empat Lawang, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Lubuk Linggau mencapai 100%. Ogan Ilir (51%), Pagar Alam (64%), dan OKU Selatan (69%) relatif lebih rendah dibanding daerah lain, namun tetap di atas target provinsi. Capaian untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah : 82 %

Tabel 3.40 Distribusi Capaian Posyandu Siklus Hidup

NO	Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Posyandu Siklus Hidup	Status
1	Empat Lawang	100%	Memenuhi
2	Musi Rawas	100%	Memenuhi
3	Lubuk Linggau	100%	Memenuhi
4	Musi Banyuasin	99%	Memenuhi
5	Ogan Komering Ilir	99,88%	Memenuhi
6	Palembang	97,09%	Memenuhi
7	Prabumulih	97,10%	Memenuhi
8	Penukal Abab Lematang Ilir	96%	Memenuhi
9	Musi Rawas Utara	92,25%	Memenuhi
10	Ogan Komering Ulu	90,83%	Memenuhi
11	Banyuasin	88,72%	Memenuhi
12	Lahat	83,33%	Memenuhi
13	Muara Enim	82,93%	Memenuhi
14	Ogan Komering Ulu Timur	83,03%	Memenuhi
15	Ogan Ilir	50,58%	Tidak Memenuhi
16	Ogan Komering Ulu Selatan	68,73%	Tidak Memenuhi
17	Pagar Alam	64,18%	Tidak Memenuhi

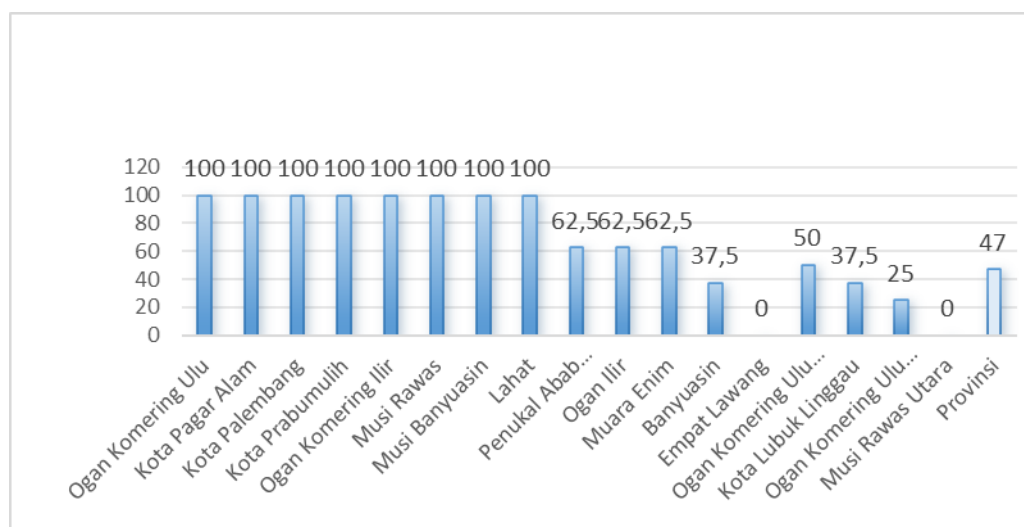
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumtera Selatan yang tidak mencapai 75 % target tiap daerah mengenai capaian posyandu siklus hidup yakni kabupaten Ogan komering Ulu Selatan 68,73%, Kabupaten Pagar Alam 64,18%, Kabupaten Ogan Ilir 50,58 %, Namun secara keseluruhan sudah mencapai target provinsi sebesar 30%. Maka dari itu capaian Persentase Kabupaten/kota yang melakukan Posyandu Bidang Kesehatan Memberikan Layanan Kesehatan Sesuai Siklus Hidup tahun 2025 sudah memenuhi target karena capaian jumlah kabupaten / kota yang memenuhi target yakni 14 Kabupaten / Kota jika di persentase capaiannya 82% dari target awal 30% sama dengan minimal 6 jumlah Kabupaten / Kota yang harus memenuhi target. Dimana 14 Kabupaten / Kota yang memenuhi tersebut yakni EmpatLawang, Musi Rawas, Lubu linggau, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir,

Palembang, Prabumulih, PALI, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Lahat, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Sedangkan Kaupaten/ Kota yang belum memenuhi target ada 3 yaitu Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pagar Alam.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
76.	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	%	30	47	156,86	Sangat Baik

Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat) pada tahun 2025 ditargetkan 30% dan terealisasi 47% atau sebesar 156,86%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Grafik 3.53 Capaian Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Hidup Sehat)



Secara keseluruhan mencapai target : 30 %, Target Provinsi dan Nasional : 40 %

- Daerah memenuhi indikator (≥ 8 kegiatan, ≥ 2 jenis pergerakan): 8 kabupaten/kota (47%), dengan target Provinsi 30 %

- Daerah tidak memenuhi indikator: 9 kabupaten/kota (53%)
- Capaian tertinggi: Kab. Ogan Komering Ulu (70 kegiatan, 100%)
- Capaian terendah: Kab. Empat Lawang & Kab. Musi Rawas Utara (0 kegiatan, 0%)

Tabel 3.41 Distribusi Capaian Kampanye Germas

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Status	% Capaian Kampanye Germas
1	Ogan Komering Ulu	70	Memenuhi	100
2	Kota Pagar Alam	14	Memenuhi	100
3	Kota Palembang	15	Memenuhi	100
4	Kota Prabumulih	11	Memenuhi	100
5	Ogan Komering Ilir	11	Memenuhi	100
6	Musi Rawas	12	Memenuhi	100
7	Musi Banyuasin	9	Memenuhi	100
8	Lahat	9	Memenuhi	100
9	Penukal Abab Lematang Ilir	5	Tidak Memenuhi	62,5
10	Ogan Ilir	5	Tidak Memenuhi	62,5
11	Muara Enim	5	Tidak Memenuhi	62,5
12	Banyuasin	3	Tidak Memenuhi	37,5
13	Empat Lawang	0	Tidak Memenuhi	0
14	Ogan Komering Ulu Timur	4	Tidak Memenuhi	50
15	Kota Lubuk Linggau	3	Tidak Memenuhi	37,5
16	Ogan Komering Ulu Selatan	2	Tidak Memenuhi	25
17	Musi Rawas Utara	0	Tidak Memenuhi	0

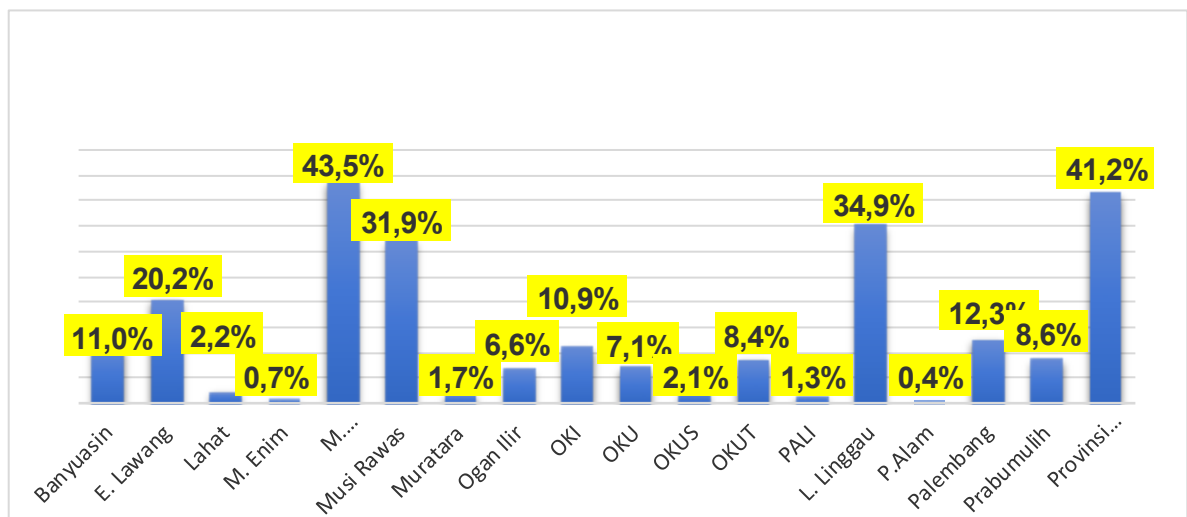
Maka dari itu capaian Persentase Kabupaten/kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat) tahun 2025 sudah memenuhi target karena capaiannya sudah 47% jumlah Kabupaten / Kota yang status capaian kegiatannya sudah memenuhi dari target awal 30% jumlah Kabupaten / Kota yang dimana ada 8 kabupaten / kota sudah memenuhi capaian tersebut yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasian, dan Kabupaten Lahat.

Sedangkan yang belum mencapai ada 9 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
77.	Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	%	10	41	412	Sangat Baik

Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader pada tahun 2025 ditargetkan 10% dan terealisasi 41% atau sebesar 412%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Grafik 3.54 Capaian Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader



Jumlah Kabupaten kota yang telah memiliki kader yang telah mengikuti 25 kompetensi dasar 25 keterampilan kecakapan dasar kader dengan target

capaian masing – masin 10% yakni berjumlah 7 Kabupaten / Kota yang sudah mencapai target dan jika di persentase berjumlah 41,2 % capaian provinsi dari target minimal capaian provinsi 10% jumlah kabupaten / kota yang sudah memenuhi dalam hal ini berjumlah minimal 2 Kabupaten / Kota.

Tabel 3.42 Distribusi Capaian Kader Posynadu yang mengikuti 25 Keterampilan Dasar Kecakapan Kader

No	Kabupaten / Kota	Tingkatan Kader		Status capaian
		Mengikuti 25 keterampilan dasar	% Mengikuti 25 keterampilan dasar	
1	Banyuasin	295	10,95	Tercapai
2	Empat Lawang	202	20,20	Tercapai
3	Lahat	65	2,21	Tidak tercapai
4	Muara Enim	14	0,72	Tidak tercapai
5	M.Banyuasin	789	43,54	Tercapai
6	Musi Rawas	567	31,91	Tercapai
7	Muratara	15	1,66	Tidak tercapai
8	Ogan Ilir	128	6,63	Tidak tercapai
9	OKI	445	10,87	Tercapai
10	OKU	167	7,08	Tidak tercapai
11	OKUS	34	2,13	Tidak tercapai
12	OKUT	308	8,44	Tidak tercapai
13	PALI	9	1,34	Tidak tercapai
14	Lubuk Linggau	233	34,93	Tercapai
15	Pagar Alam	4	0,42	Tidak tercapai
16	Palembang	672	12,28	Tercapai
17	Prabumulih	91	8,56	Tidak tercapai
	Provinsi	4038	41,18	Melampau target

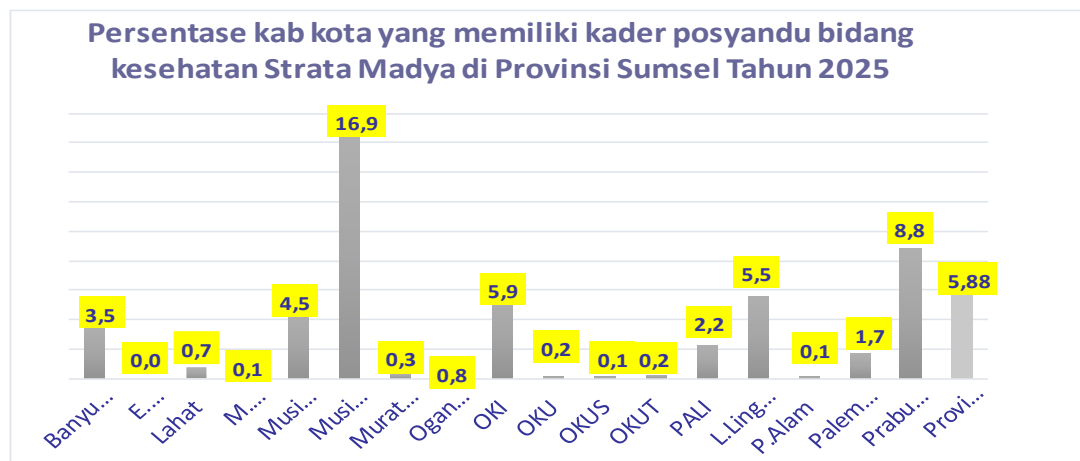
Berdasarkan Data Microsite Jumlah Keseluruhan Kader Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan 35.532 orang dengan jumlah 4.038 kader sudah mengikuti pelatihan peningkatan 25 kecakapan dasar kader. Dari 17 Kabupaten / Kota yang sudah memiliki kader yang telah mengikuti pelatihan 25 kecakapan dasar kader ada 7 Kabupaten / Kota yang sudah tercapai target dengan minimal 10% dari jumlah kader masing – masing daerah, Kabupaten Kota yang memenuhi target tersebut yakni Banyuasin, Empat Lawang, Musi Banyuasin, Musi Rawas,

Ogan Komering Ilir, Lubuk Linggu, dan Palembang. Sedangkan yang Kabupaten / Kota yang belum mencapai target yakni ada 10 yaitu Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, PALI, Pagar Alam, dan Prabumulih.

Indikator Kinerja		Capaian Triwulan IV Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
78.	Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	%	10	5,88	59	Rendah

Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya pada tahun 2025 ditargetkan 10% dan terealisasi 5,88% atau sebesar 59%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.55 Capaian Kabupaten / Kota yang memiliki Strata Madya



Jumlah Kabupaten kota yang memiliki kader dengan strata Madya dengan masing – masing capaian target minimal 10% ada 1 Kabupaten / Kota yang sudah mencapai target yaitu Kabupaten Musi Rawas, jika di persentase dari target minimal 10% jumlah Kabupaten / Kota yang harus mencapai target minimal 2 Kabupaten / Kota maka dapat dikatakan bahwa capaian kader posyandu dengan strata Madya belum mencapai target karena hanya 1 kabupaten / kota saja yang

sudah memenuhi dan bila dimuat persentase capain di Tahu 2025 ini hanya 5,8% beum mencapai target minimal indikator kinerja sebesar 10%.

Tabel 3.43 Distribusi Capaian Kader Posyandu yang memiliki tingktan strata Madya

NO	Kabupaten / Kota	Jumlah Seluruh Kader Posyandu	Jumlah Tingkatan Kader Posyandu Madya	Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu strata madya
1	Banyuasin	2693	95	3,5
2	E. Lawang	1000	-	0,0
3	Lahat	2945	22	0,7
4	M. Enim	1958	2	0,1
5	Musi Banyuasin	1812	82	4,5
6	Musi Rawas	1777	300	16,9
7	Muratara	902	3	0,3
8	Ogan Ilir	1930	16	0,8
9	OKI	4095	241	5,9
10	OKU	2358	4	0,2
11	OKUS	1594	2	0,1
12	OKUT	3649	9	0,2
13	PALI	673	15	2,2
14	L.Linggau	667	37	5,5
15	P.Alam	945	1	0,1
16	Palembang	5471	93	1,7
17	Prabumulih	1063	94	8,8
	Provinsi Sumsel	35532	1016	5,88

Berdasarkan Data Microsite Jumlah Keseluruhan Kader 17 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan 35.532 orang dan untuk jumlah kader posyandu dengan tingkatan strata berjumlah 1.016 kader. Dari 17 Kabupaten / Kota yang sudah memiliki kader dengan tingkatan strata Madya yang sudah tercapai target dengan minimal 10% dari jumlah kader masing – masing daerah, Kabupaten / Kota yang memenuhi target tersebut yakni Musi Rawas Hanya 1 Kabupaten saja. Sedangkan 16 Kabupaten/ Kota belum memenuhi target artinya capain kader dengan strata madya belum mencapai target karena capaian target minimal 2 kabupaten/ kota atau dengan persentase 10% sedangkan yang didapat hanya 5,8% dengan jumlah 1 Kabupaten / Kota saja.

3.3 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Maju Pelayanan Publik Berkualitas	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana	100%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	75%	
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	75%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (1212/or/bln)	12 bulan	
				Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	
				Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	60%	
				Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	60%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 paket	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Umum	60%	
				Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
				Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	
				Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	1 Paket	
				Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah	60%	
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
				Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	60%	
				Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan)	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	102 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan	140 %	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100 %	Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 paket	
				Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 paket	
		Persentase Stunting pada anak balita	1,04%	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	5.431 orang	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.511 orang	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3 dokumen	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 dokumen	
				Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 dokumen	
				Subkegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 dokumen	
				Subkegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 dokumen	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 unit	
				Subkegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	5 dokumen	
				Subkegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20 dokumen	
				Subkegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 dokumen	
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terlaksananya kegiatan sistem informasi Kesehatan	75%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	1.17 %	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100%	
				Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan fasyankes yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perizinannya	100 Unit	
				Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	90 Unit	
				Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah rumah sakit yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standard	90 Unit	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
		Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (9) jenis tenaga kesehatan	79,18 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM	75%	Menunjang
		Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100%	
				Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 orang	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Subkegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	30 orang	
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	75%	
				Subkegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1 paket	
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan	87,5 %	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
		Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)		Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Tersedianya sarana penyalur alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	1 dokumen	
				Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	35 sarana	
4	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup Sehat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase posyandu aktif	82,35%	
				Subkegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	8 dokumen	
				Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya dokumen desa siaga aktif purnama dan mandiri	1 dokumen	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil Promosi Kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Paket	

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sampai Desember 2025 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 5 program 18 kegiatan dan total sub kegiatan sebanyak 58 jenis. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan sampai September 2025 semula adalah sebesar Rp 493.358.555.875,00 dan terealisasi sebesar Rp 455.442.002.050,00 atau sebesar 92,31 persen untuk realisasi keuangan dan 100 persen untuk realisasi fisik.

Secara detail alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian menurut Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan sampai Desember 2025 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sampai Desember 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana	242.903.488.277	220.876.191.854	90,93
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	764.300.000	520.191.168	68,06
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	764.300.000	520.191.168	68,06
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	202.662.721.200	187.351.454.377	92,44
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201.851.886.000	186.606.158.157	92,45

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	722.040.000	679.600.000	94,12
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.795.200	65.696.220	73,99
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	180.000.000	93.514.425	51,95
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.000.000	93.514.425	51,95
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	1.130.525.000	614.819.311	54,38
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.026.525.000	511.619.311	49,84
7	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peraturan perundang- undangan	104.000.000	103.200.000	99,23
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Umum	3.250.458.500	3.194.194.845	98,27
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250.000.000	249.435.000	99,77
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250.000.000	246.486.600	98,59
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	520.458.500	481.450.000	92,50
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	450.000.000	449.839.650	99,96

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.400.000.000	1.399.472.595	99,96
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	380.000.000	367.511.000	96,71
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.665.900.000	2.590.206.980	97,16
14	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang Disediakan	519.000.000	509.626.300	98,19
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.146.900.000	2.080.580.680	96,91
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	11.731.435.957	9.980.688.262	85,08
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	8.523.410	42,62
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.435.000.000	2.444.044.355	71,15
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.276.435.957	7.528.120.497	90,96
VII I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah	17.018.147.620	14.956.633.911	87,89
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.900.000.000	1.839.355.541	96,81
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14.568.147.620	12.650.234.870	86,83

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	550.000.000	467.043.500	84,92
IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	3.500.000.000	1.574.488.575	44,99
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3.500.000.000	1.574.488.575	44,99
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Kematian Ibu	247.565.948.598	232.075.107.897	93,74
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai kebutuhan	15.956.818.200	15.706.691.767	98,43
23	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	200.000.000	53.718.340	26,86
24	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	900.000.000	899.939.094	99,99
25	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	14.856.818.200	14.753.034.333	99,30
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi Stunting pada Balita	230.105.458.398	215.159.787.578	93,50

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	761.718.000	441.345.323	57,94
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	906.706.000	9.954.000	1,10
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.225.462.000	1.182.360.523	96,48
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	194.334.000	115.932.000	59,66
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	101.830.000	101.187.000	99,37
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	555.206.000	545.253.353	98,21
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.238.425.000	1.042.082.078	84,15
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	512.647.500	384.365.640	74,98
34	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.520.000	158.090.000	89,56
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75.345.000	74.447.500	98,81

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.329.388.800	1.312.713.849	98,75
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100.000.000	93.344.800	93,34
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	177.950.000	126.618.000	71,15
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	217.537.817.598	205.231.513.600	94,34
40	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	835.140.000	500.636.371	59,95
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	415.000.000	209.654.154	50,52
42	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas	125.765.000	97.899.500	77,84
43	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	289.962.500	270.559.999	93,31
44	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	360.255.000	332.464.485	92,29

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
45	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	2.665.876.000	2.414.942.803	90,59
46	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Jumlah paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional yang didistribusikan	70.110.000	67.946.600	96,91
47	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	450.000.000	446.476.000	99,22
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terlaksananya kegiatan sistem informasi Kesehatan	447.194.000	370.485.683	82,85
48	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	447.194.000	370.485.683	82,85
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	1.056.478.000	838.142.869	79,33
49	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	22.230.000	13.340.000	60,01
50	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan Peningkatan Tata Kelola sesuai Standar	525.280.000	344.098.500	65,51
51	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	508.968.000	480.704.369	94,45
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standard (9) jenis tenaga Kesehatan	772.885.000	586.725.108	75,91

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
I	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	88.100.000	71.609.105	81,28
52	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	53.906.000	38.773.750	71,93
53	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	34.194.000	32.835.355	96,03
II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	684.785.000	515.116.003	75,22
54	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	209.257.000	153.834.003	73,51
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	475.528.000	361.282.000	75,97
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai Kebutuhan	141.246.000	115.585.501	81,83
I	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	141.246.000	115.585.501	81,83

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	141.246.000	115.585.501	81,83
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	1.974.988.000	1.788.391.690	90,55
I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	477.988.000	403.075.616	84,33
57	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	477.988.000	403.075.616	84,33
II	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	1.497.000.000	1.385.316.074	92,54
58	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.497.000.000	1.385.316.074	92,54
	JUMLAH (58 Kegiatan)		493.358.555.875	455.442.002.050	92,36

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Sumsel Desember 2025

3.4.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Desember Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	100	100	100	493.358.555.875	455.442.002.050	92,31	7,69
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	100	100	100	247.565.948.598	232.304.553.107	93,84	6,16
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100	100	100	772.885.000	586.725.108	75,91	24,09
4	Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	100	100	100	1.974.988.000	1.788.391.690	90,55	9,45

3.4.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.4.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Desember 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	100	100	242.903.488.277	220.876.191.854	90,93	9,07
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	764.300.000	520.191.168	68,06	31,94
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	202.662.721.200	187.351.454.377	92,44	7,56
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	180.000.000	93.514.425	51,95	48,05
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	1.130.525.000	614.819.311	54,38	45,62
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	3.250.458.500	3.194.194.845	98,27	1,73
	Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	2.665.900.000	2.590.206.980	97,16	2,84
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	11.731.435.957	9.980.688.262	85,08	14,92
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	17.018.147.620	14.956.633.911	87,89	12,11
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100	60	60	3.500.000.000	1.574.488.575	44,99	15,01

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	100	100	247.565.948.598	232.304.553.107	93,84	6,16
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	15.956.818.200	15.706.691.767	98,43	1,57
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	230.389.330.398	215.389.232.788	93,60	6,4
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100	100	100	447.194.000	370.485.683	82,85	17,15
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	1.056.478.000	838.142.869	79,33	20,67
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100	100	100	772.885.000	586.725.108	75,91	24,09
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100	100	100	88.100.000	71.609.105	81,28	18,72
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	684.785.000	515.116.003	75,22	24,78

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	100	141.246.000	115.585.501	81,83	18,17
	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100	100	100	141.246.000	115.585.501	81,83	18,17
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	100	100	1.974.988.000	1.788.391.690	90,55	9,45
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	477.988.000	403.075.616	84,33	15,67
	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	1.497.000.000	1.385.316.074	92,54	7,46

3.5 Penghargaan di Bidang Kesehatan

Sebagai salah satu bukti keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, maka penghargaan yang didapatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibidang kesehatan Desember 2025 sebanyak 12 (dua belas) penghargaan yaitu :

1. Penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) diberikan pada Kota Palembang atas Upaya Baik Dalam Pengendalian Stunting Tahun 2025.



2. Penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) diberikan pada Kabupaten Muara Enim atas Upaya Baik Dalam Pengendalian Stunting Tahun 2025.



3. Penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) diberikan pada Kabupaten Musi Banyuasin atas Upaya Baik Dalam Pengendalian Stunting Tahun 2025.

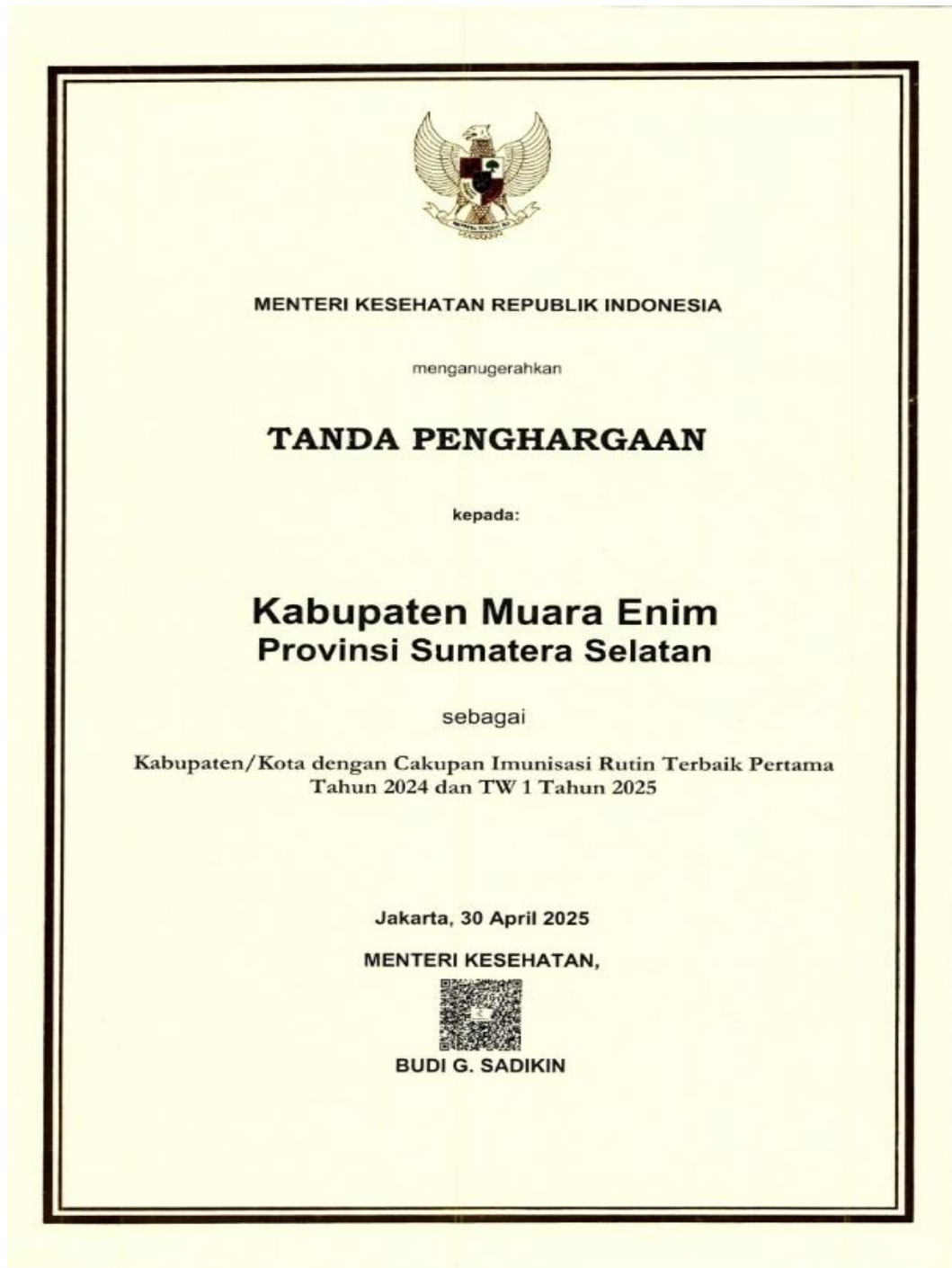


4. Penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) diberikan pada Kabupaten Banyuasin atas Upaya Baik Dalam Pengendalian Stunting Tahun 2025.



5. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia diberikan kepada Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten/Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin Terbaik Pertama Tahun 2024 dan TW I Tahun 2025.

Penghargaan Kabupaten Muara Enim sebagai Kab/Kota dengan cakupan rutin terbaik pertama tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025



6. Penghargaan dari Kemenkes diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penghargaan diberikan pada Provinsi Sumsel sebagai Provinsi dengan seluruh Kab/Kota yang memiliki peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR)



7. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Sebagai Provinsi Dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik II








**PERNYATAAN KOMITMEN
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

Dalam rangka memastikan sumber daya manusia Indonesia berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah kerja kami dengan melakukan upaya yang konvergen melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menjadikan pencegahan dan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah.
2. Melakukan analisis situasi yang komprehensif dan hasilnya digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program.
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan intervensi prioritas, kapasitas pengelola program, inovasi, dan kolaborasi.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja program dan melakukan perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
5. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh seluruh unsur dan masyarakat.

Jakarta, 12 November 2025

Mengetahui,

Pt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Pembangunan Sumber Daya Manusia



Dyah Kosumastuti

Gubernur Sumatera Selatan selaku
Penanggung Jawab Pelaksana
Percepatan Penurunan Stunting



Herman Deru

8. Penghargaan diberikan kepada Kota Palembang Sebagai Kota Terinovatif dari Innovative Government Award (IGA) 2025



9. Penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2025





10. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda diberikan kepada Kabupaten Musi Banyuasin Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2025





11. Penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada Kabupaten Muara Enim Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2025





12. Penghargaan diberikan kepada Kota Palembang Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan atas pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. LKjIP dibuat dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Materi LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program dan kegiatan yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan tiga sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kesehatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar Dinas/Badan/Instansi, di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan *stakeholders* kesehatan lainnya yang terkait, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi juga perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan pencapaian dari 3 (tiga) sasaran strategis terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 maka telah dilaksanakan sebanyak 5 program, 18 kegiatan dengan 58 subkegiatan. Untuk pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan sebanyak 78 indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator kinerja tersebut, 49 indikator telah memenuhi

target yang ditetapkan, 18 indikator mendekati progress pencapaian dan 11 indikator masih jauh dari target yang diinginkan. Belum tercapainya target indikator tersebut salah satunya disebabkan belum tuntasnya penanganan penyakit-penyakit menular klasik seperti : TBC, Campak, Polio, Kusta ditambah dengan semakin meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular seperti : Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung Koroner, Stroke dan Kanker dan adanya penyakit re-emerging disease (penyakit infeksi emerging) yaitu munculnya penyakit infeksi baru atau penyakit yang pernah menghilang namun muncul lagi seperti : Mpox (Monkeypox), COVID-19, AI (H5N1), Demam Rift Valley, Polio, Legionellosis, Listeriosis, dan Meningitis Meningokokus. Disparitas sarana pelayanan kesehatan dimana daerah perkotaan memiliki sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan dengan kabupaten. Jumlah tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di setiap kabupaten/kota. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. Akses sanitasi dan air bersih masyarakat yang belum optimal. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih rendah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 28 Februari 2026

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan**



Dr. H. Trisnawarman, M.Kes,Sp. KKL
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008